

Tender LPG - Pertamina, Bangkitnya Mafia Baru?

# AKTUAL

Edisi 361 1 - 15 Juni 2015

## *BALADA TPPI*

Sempat menyandang gelar sebagai kilang pengolahan minyak terbesar di Asia Tenggara, TPPI ternyata menyimpan "getah". Triliunan uang negara menguap, siapa saja yang terciprat?



Rp. 30.000

ISSN 2337-8395



WWW.AKTUAL.CO

# PASANG SEKARANG!

# 50%

**DISKON PASANG IKLAN DI MAJALAH AKTUAL & AKTUAL.CO  
SELAMA JAKARTA FAIR 2015, 29 MEI - 5 JULI 2015**

**aktual**  
News Online - Internet TV - Magazine

48  
mulia Ibn Khaldun  
"Susunan masyarakat sebagai  
berdasarkan pada susunan  
itu berada".  
**JAKARTA FAIR**  
KEMAYORAN  
2015



**PENDIRI** M Danial Nafis  
**KOMISARIS** Yudi Latif  
**PEMIMPIN REDAKSI** Faizal Rizki Arief  
**SEKRETARIS REDAKSI** Hanny Haniffa  
**REDAKTUR SENIOR** Dhia Prekasha Yoedha, Satrio Arismunandar, Hendrajit, Eko Maryadi, Nia S Amira  
**SIDANG REDAKSI** Faizal Rizki Arief, Satrio Arismunandar, Hendrajit, Dhia Prekasha Yoedha, Eko Maryadi, Wahyu Romadhony  
**DIREKTUR MAJALAH** Wahyu Romadhony  
**REDAKTUR** Andy Abdul Hamid, Nebby Mahbubirrahman, Tino Oktaviano (Foto), Sukardjito, Ismed Eka Kusuma  
**ASISTEN REDAKTUR** Zaenal Arifin, M Vidia Wirawan, Karel Stefanus Ratulangi, Wisnu Yusep, Ferro Maulana, Tri Harningsih  
**STAF REDAKSI** Soemitro-Deddy Kusnaedi-Moh Sahlan (Majalah), Fahrul Anwar, Fadlan Syam Buttho, Maulana Khamal Macharani, Nailin In Saroh, Mochammad Zaky Kusumo, Novrizal Sikumbang, Nicha Muslimawati, Munzir (Foto), Junaidi Mahbub (Foto), Warnoto (TV)

**IT** Radius Rasmangun  
**DESAIN GRAFIS** Shofrul Hadi, Nelson Nafis

**KONTRIBUTOR LUAR NEGERI** Fitra Ismu (Meksiko)  
**REPORTER DAERAH** Masriadi Sambo (Aceh), Achmadi Parandangi (Makassar), Aceng Mukkaram (Pontianak), Albertus Vincentius (Kupang), Damai Oktavianus Mendrofa (Medan), Muhammad Dasuki (Semarang), Ahmet Haris B (Surabaya), Muchammad Nasrul Hamzah (Malang), Arie Nugraha (Bandung), Bobby Andalan (Denpasar), Fajar Sodiq (Solo), Imam Muhlas (Bojonegoro), Ikbal Kukuh (Bandung), Joko Pramono (Lumajang Jatim)

**DIREKTUR OPERASIONAL** Rinrin Sukmariana  
**MANAGER KEUANGAN** Kasep Natakusumah  
**STAF KEUANGAN** Zulkarnain, Vinka  
**SIRKULASI** Widhi Maulana  
**MARKETING OFFICER** Ranie Anggoro, Rhiza Aditya

**ALAMAT REDAKSI**  
 PT Caprof Media Negeri  
 Cawang Kencana Building  
 1st Floor Suite 101  
 Jl. Mayjen Sutoyo Kav. 22 Cawang  
 DKI Jakarta 13630 Indonesia  
 No Telp : (021) 8005520  
 Fax : (021) 80886466  
 Email : majalah@aktual.co  
 iklan@aktual.co

**aktual.co**  
 TERHANGAT TERPERCAYA

**aktualTV**

## Kilang TPPI Harus Bersih



Riuh isu politik, ekonomi dan hukum di seputar sektor migas dan minerba semakin tak terkendali.

Kasus-kasus lama yang sempat terpetieskan muncul kembali ketika Polri mulai membuka *file-file* kasus dugaan korupsi triliunan Rupiah di sektor itu.

Kasus TPPI misalnya. Di Laporan Utama Aktual khusus melaporkan apa yang sebenarnya terjadi di kasus yang diduga merugikan negara triliunan Rupiah itu. Bareskrim bahkan sudah memanggil Raden Priyono untuk kasus yang begitu kompleks kapungannya karena banyak kepentingan di sana.

Kasus ini berawal saat SKK Migas pada 2009 melakukan proses penunjukan langsung penjualan kondensat bagian negara kepada PT TPPI. Namun ironisnya, proses yang dilalui tidak sesuai ketentuan yang berlaku sehingga menyalahi aturan keputusan BP Migas nomor: KPTS-20/BP00000/2003-50 tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjual Minyak Mentah/ Kondensat Bagian Negara.

Aktual menganggap kasus ini perlu diselesaikan dengan cepat karena kilang TPPI adalah kilang

terbesar se Asia Tenggara yang sangat strategis artinya untuk menjaga ketahanan energi di Indonesia dan kawasan regional ASEAN.

Beberapa kasus lain yang juga diungkap dalam edisi ini adalah soal mafia migas. Terutama soal tudingan bahwa ISC tidak transparan dalam tender-nya. Plus, ekspansi bisnis Kalla di industri migas.

Hal lain yang kali disorot Aktual adalah soal tantangan tim ekonomi Jokowi yang cukup berat. Beberapa kerawanan terjadi dengan melihat gerakan indikator ekonomi penting seperti inflasi, angka pengangguran dan nilai Rupiah. Aktual menganggap ini sudah jadi "early warning" buat Jokowi untuk segera memecahkan masalah itu.

Aktual juga menyorot soal kinerja DPR yang dinilai lamban kinerjanya. Sebanyak 37 RUU ternyata masih jadi tumpukan kertas saja tanpa ada ketok palu. Diduga, lamanya masa reses dan kegaduhan politik menjadi salah satu alasan mengapa DPR tak kunjung menyelesaikan tugasnya.

Ada hal lain yang cukup penting untuk disimak adalah soal Sabda Raja yang dikeluarkan Sri Sultan Hamengkubuwono X beberapa waktu lalu. Sabda Raja kali ini adalah sabda raja yang sangat penting untuk melihat arah kerajaan Mataram di Jawa. Benarkah Sabda Raja ini adalah titik awal, babak baru Mataram menatap perubahan dan modernitas. Atau justru sebaliknya, selesainya era Mataram di Jawa?

Selamat membaca... ■

## Laporan Utama

### 23 Kasus Mega Korupsi TPPI Berawal

Kasus ini berawal saat SKK Migas pada 2009 melakukan proses penunjukan langsung penjualan kondensat bagian negara kepada PT TPPI.



### 26 Hasil Penggeledahan Bareskrim Polri

Victor menuturkan, para penyidik berusaha mencari surat perjanjian antara PT TPPI dan SKK Migas.



### 30 Setumpuk 'Dosa' BP Migas

sebelum kasus ini terungkap sudah banyak kejanggalan kebijakan di era Raden yang janggal. Misalnya tentang uang sewa gedung Wisma Mulia sebagai kantor BP Migas.



### 34 Bau Tak Sedap di Kapal Joko Tole

'Aroma tak sedap' itu diduga terkait proyek penyewaan kapal Floating Production Unit (FPU) BW Joko Tole



### 38 Jangan Lokalisir Kondensat

Sejak awal 2012, TPPI diketahui telah default atau gagal bayar terhadap utangnya kepada Pertamina yang pada medio tersebut Dirutnya dijabat Karen Agustiawan menggantikan Ari Soemarno.



### 40 Raksasa Petrokimia dalam Kubangan Utang

Dalam sebuah situs disebutkan, berjibunnya utang TPPI ini antara lain disebabkan karena penyalahgunaan dalam pengelolaan kilang TPPI.



### 44 Kilang Minyak dalam Perspektif Ketahanan Nasional

Dengan keadaan seperti ini, maka langkanya jumlah kilang minyak kita itulah yang kemudian jadi musabab daulat migas kita dalam bahaya.



## 10 NASIONAL

### Tujuh Bulan Kerja, Fungsi Legislasi DPR Kedodoran

Hingga akhir Mei 2015 atau kurang lebih 7 bulan kerja DPR periode 2014-2019, dewan belum menyentuh secara keseluruhan substansi usulan.

## 16 POLITIK

### Sandiwara di Balik Pembubaran Petral

Kebijakan Pemerintah membubarkan PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) memicu perang urat syarat antara Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dan Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

## 48 HUKUM

### Gardu Listrik Menyengat Dahlan

Alasan ketidakhadiran Dahlan pada pemanggilan ketiga, karena dirinya tengah berada di Indiana, AS.

## 52 EKONOMI

### Early Warning Buat Jokowi

Realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I tahun 2015 ini begitu jauh dari harapan.

## 44 ENERGI

### Tender LPG ISC-Pertamina, Bangkitnya Mafia Baru?

Pertamina memenangkan Total dengan loading FOB (Free on Board) Ruwais, UAE dengan harga CP Aramco Maret minus USD 7,5.

## 60 ENERGI

### Pat-Gulipat Bisnis Kalla di LNG Receiving Terminal Bojonegara

Pertamina tutup mulut dan mengabaikan asas transparansi. Mereka mengaku tidak tahu terkait MoU yang melibatkan Anak Wapres RI Jusuf Kalla, Solihin Kalla.

## 64 INTERNASIONAL

### 'Mem-Pingpong' Nasib Pengungsi Muslim Rohingya

Thailand, Malaysia, dan Indonesia menghadapi problem masuknya manusia perahu asal Myanmar.

## 68 INTERNASIONAL

### Palestina Sesudah Pengakuan Vatikan

Pengakuan Vatikan pada Negara Palestina adalah kemenangan politis dan simbolis Palestina.

## 70 NUSANTARA

### Sabda Untuk Mataram Baru

Apakah Sabda Raja Sri Sultan HB X ini adalah titik awal menuju Mataram Baru atau justru titik awal kehancuran Mataram.

3 Tatap Redaksi

5 Terkini

6 Kaki Hari

8 Lensa Aktual

14 Kilas Nasional

20 Kilas Politik

50 Kilas Hukum

54 Kilas Ekonomi

62 Kilas Energi

72 Kilas Nusantara

74 Oase

## Permasalahan Permen Smelter, Faisal Basri Tuding Hatta Pro-Rusia

Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) Faisal Basri menuding mantan menteri perekonomian, Hatta Rajasa sebagai biang keladi kekacauan industri bauksit nasional.

"Hatta Rajasa biang keladinya. Ini tunjuk nama saja *deh* biar semua jelas," ujar Faisal Basri di Jakarta, Senin (25/5).

Menurutnya, kekacauan tersebut bermula pada masa pencalonan Hatta Rajasa menjadi calon wakil presiden 2014 lalu. Hatta melarang ekspor mineral mentah (*raw material*) termasuk bauksit. Pelarangan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 terbit pada tanggal 12 Januari 2014.

Faisal Basri menuding, pelarangan tersebut terkait permintaan perusahaan alumunium terbesar di Rusia, UC Rusal. Perusahaan tersebut ingin membangun pabrik di Kalimantan, namun mereka ingin mengurangi jumlah bauksit yang beredar di dunia hingga 40 juta ton. Dampaknya harga alumina Rusal melonjak.

"Sudah nampak nyata, Rusal yang paling diuntungkan. Ini mau pemilu, pilpres, dan Hatta Rajasa menjadi calon wakil presiden," ucap dia.

Namun, apabila melihat peraturan menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 berkaitan dengan pembangunan *smelter* untuk peningkatan nilai tambah mineral dalam negeri, dalam Bab III, pasal 5 disebutkan bahwa pemegang IUP operasi produksi mineral logam dan IUPK operasi produksi mineral logam wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum pengolahan dan pemurnian mineral logam tertentu.

Permasalahan kewajiban pembangunan *smelter* ini tentu mengingatkan aturan yang ditabrak menteri ESDM, Sudirman Said yang memperbolehkan Newmont dan

Freeport melakukan ekspor konsentrat tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu.

Pembangunan *smelter* Freeport di Papua yang rencananya akan dikerjakan oleh BUMD dan investor China tersebut membutuhkan waktu hingga lima tahun.

"Jadi artinya, bisa saja perencanaan (pembangunan *smelter*) berubah," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Minerba Kementerian ESDM R Sukhyar di kantornya, Jakarta.

Ia juga mengatakan, molornya waktu pembangunan *smelter* tersebut menyebabkan Pemerintah harus merevisi Permen ESDM Nomor 1 tahun 2014 tersebut. Pasalnya, di peraturan tersebut *smelter* diharuskan rampung pada 2017 mendatang. Ismed Eka Kusuma

## Jet Pribadi Petral Terbangkan Sudirman

Fasilitas jet pribadi yang diterima Menteri ESDM Sudirman Said dari Petral bisa dikategorikan sebagai gratifikasi. Begitu penilaian juru bicara Prodem, Iwan Sumule. Sudirman diketahui naik *private jet* yang dibiayai Petral, disewa dari Singapura-Medan-Singapura di sela pertemuan dengan petinggi Petral

Dikatakan Iwan, pengertian gratifikasi jelas disebut dalam Pasal 12B Ayat (1) UU 31/1999 juncto UU 20/2001. Dalam pasal itu disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan

"gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Selain itu, kata Iwan, tindakan Sudirman Said tersebut menjadi petunjuk siapa sebenarnya yang jadi mafia migas. "Perlu diketahui Petral dan PES adalah anak perusahaan BUMN dan cucu Perusahaan BUMN, dan Sudirman Said adalah menteri sebagai pejabat negara. Mari kita jernih melihat masalah siapa yang terlibat dalam lingkaran mafia migas," tegas Iwan Sumule.

Sudirman Said naik *private jet* yang dibiayai Petral di sela *blusukan* ke kantor Petral pada 9 Mei 2015. Jet pribadi disewa dari Singapura-Medan-Singapura. Pada Jumat sore, 8 Mei 2015, Sudirman tiba di Singapura bersama Faisal Basri selaku Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi. Pada malam harinya, Sudirman dan Faisal dengan ditemani Direktur SDM Pertamina Dwi Wahyu Daryoto, dan Dirut Integrated Supply Chain (ISC) Daniel Purba bertemu dengan Direktur Utama Petral di Hotel Four Season.

Besok paginya, atau beberapa jam sebelum pertemuan kedua dengan Petral digelar di kantor PES, Sudirman kembali ke Tanah Air untuk mendampingi Presiden Jokowi *blusukan* ke Lhoksemawe.

Informasi yang dihimpun redaksi, jet pribadi yang digunakan Sudirman Said adalah pesawat khusus Gulfstream G-550. Biaya sewa pesawat sebesar USD 35.750 (dengan kurs Rp 13.200 menjadi setara Rp 471.900.000) ditagihkan seluruhnya ke Petral Singapura. Jet itu diparkir di Bandara Kualanamu. Setelah acara di Lhoksemawe selesai, Sudirman pun kembali ke Singapura dengan menggunakan jet tersebut, untuk bergabung dengan Faisal Basri cs.

Faisal Basri sudah membenarkan fasilitas yang dinikmati Sudirman tersebut. Ismed Eka Kusuma



# Mengapa Pancasila Begitu Penting?



**D**i muka Kongres Amerika Serikat, dalam kunjungan pertamanya ke negeri itu (16 Mei-3 Juni 1956), Bung Karno dengan kepercayaan diri yang tinggi berpidato menguraikan Pancasila. Setiap sila disebutkan, hadirin bertepuk riuh, diakhiri dengan tepuk tangan panjang. Tampak di sana, meski rumusan Pancasila itu digali dari bumi Indonesia, kandungan nilainya bisa diterima secara universal.

Keberanian Bung Karno mengampanyekan Pancasila kepada dunia kembali disampaikan dalam pidatonya di PBB, 30 September 1960, yang berjudul "To Build the World Anew". Ia menyangka seorang pendapat filsuf Inggris, Bertrand Russell, yang membagi dunia ke dalam dua poros ideologis.

"Maafkan, Lord Russell. Saya kira Tuan melupakan adanya lebih dari 1.000 juta rakyat, rakyat Asia dan Afrika, dan mungkin pula rakyat Amerika Latin, yang tidak menganut ajaran Manifesto Komunis ataupun Declaration of Independence."

Selanjutnya ia katakan, Indonesia tidak dipimpin oleh kedua paham itu, tidak mengikuti konsep liberal ataupun komunis. "Dari pengalaman kami sendiri dan dari sejarah kami sendiri, tumbuhlah sesuatu yang lain, sesuatu yang jauh lebih sesuai, sesuatu yang lebih cocok." Lantas ia simpulkan, "Sesuatu itu kami namakan Pancasila."

**Karakter Keindonesiaan**  
Jalan tengah Pancasila itu

bukan pilihan oportunistis yang timbul dari lemahnya kepercayaan diri, melainkan pancaran karakter keindonesiaan. Karakter keindonesiaan itu awalnya tercetak karena pengaruh ekosistemnya.

Sesuai karakteristik lingkungan alamnya, sebagai negeri lautan yang ditaburi pulau-pulau, karakter keindonesiaan juga merefleksikan sifat lautan. Sifat lautan adalah menyerap dan membersihkan, menyerap tanpa mengotori lingkungannya, sifat lautan juga dalam keluasannya mampu menampung segala keragaman jenis dan ukuran.

Sebagai "negara kepulauan" terbesar di dunia, yang membujur di titik strategis persilangan antarbenua dan antarsamudra, dengan gaya tarik kekayaan sumber yang berlimpah, Indonesia sejak lama jadi titik temu penjelajahan bahari yang membawa berbagai arus peradaban. Maka jadilah Indonesia sebagai taman dari peradaban dunia dengan mental penduduknya yang berjiwa kosmopolitan.

Karakter keindonesiaan juga merefleksikan sifat tanahnya yang subur, terutama akibat debu muntahan deretan pegunungan vulkanik. Tanah yang subur memudahkan segala yang ditanam, sejauh sesuai sifat tanahnya, untuk tumbuh. Seturut dengan itu, karakter keindonesiaan adalah kesanggupan menerima dan menumbuhkan. Di sini, apa pun budaya dan ideologi yang masuk, sejauh dapat dicerna sistem sosial dan tata nilai setempat, dapat berkembang.



Etos pertanian masyarakat Nusantara bersifat religius dan gotong royong dalam rangka penggarapan lahan bersama.

Sifat religius dan sensitivitas kekeluargaan juga memijarkan daya-daya etis dan estetis yang kuat. Maka, jadilah Nusantara sebagai pusat persemaian dan peryerbukan silang budaya, yang mengembangkan berbagai corak kebudayaan yang lebih banyak dari kawasan Asia mana pun (Oppenheimer, 2010).

Penindasan ekonomi-politik oleh kolonialisme-kapitalisme memang banyak menggerus sifat-sifat kemakmuran, kosmopolitan, religius, toleran dan kekeluargaan dari Tanah Air ini.

Di sisi lain kolonialisme-kapitalisme juga mengandung kontradiksi internalnya yang membawa unsur-unsur emansipasi baru, seperti humanisme, peri kebangsaan, demokrasi, dan keadilan, yang dapat memperkuat karakter keindonesiaan.

Persenyawaan antara anasir karakter asal yang mengendap laten dalam jiwa penduduk dan visi emansipasi baru itu diidealisasikan oleh para pendiri bangsa sebagai sumber jati diri, falsafah dasar, dan pandangan hidup bersama.

Oleh karena itu, kategorisasi yang bersifat saling mengucilkan antara "golongan kebangsaan" dan "golongan Islam", dengan identifikasi turunannya bahwa yang satu disebut pro-Pancasila dan yang lain kontra-Pancasila, sesungguhnya suatu keserampangan.

Kenyataannya, baik anggota golongan kebangsaan maupun golongan Islam tidaklah monolitik. Lebih dari itu, secara substansif, kedua golongan memiliki kesepahaman yang luas.

Apa yang mereka idealisasikan sebagai dasar kehidupan bersama itu disarikan Bung Karno pada pidato 1 juni 1945 ke dalam lima sila, yang disebut sebagai dasar falsafah (*philosofische grondslag*) atau pandangan dunia (*weltanschauung*) negara/bangsa Indonesia.

### Gotong Royong

Selanjutnya, Bung Karno menyatakan, "Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan 'gotong royong'. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong."

Dengan kata lain, dasar dari semua



sila Pancasila adalah gotong-royong. Maknanya adalah: prinsip ketuhanannya harus berjiwa gotong-royong (ketuhanan yang berkebudayaan, yang lapang dan toleran), bukan ketuhanan yang saling menyerang dan mengucilkan. Prinsip internasionalismenya harus berjiwa gotong-royong (yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan), bukan internasionalisme yang menjajah dan eksploitatif. Prinsip kebangsaan harus berjiwa gotong-royong (mampu mengembangkan persatuan dari aneka perbedaan, "Bhinneka Tunggal

Ika"), bukan yang meniadakan perbedaan atau menolak persatuan.

Prinsip demokrasi juga harus berjiwa gotong-royong (mengembangkan musyawarah mufakat), bukan demokrasi yang didikte oleh suara mayoritas atau minoritas elite penguasa-pemodal (minorokrasi).

Prinsip kesejahteraan pun harus berjiwa gotong-royong (mengembangkan partisipasi dan emansipasi di bidang ekonomi dengan semangat kekeluargaan), bukan visi kesejahteraan yang berbasis individualisme-kapitalisme, bukan pula yang mengekang kebebasan individu seperti dalam sistem etatisme.

Dengan semangat dasar kelima sila tersebut, negara/bangsa Indonesia memiliki pandangan dunia begitu visioner dan tahan banting.

Prinsip-prinsip dalam Pancasila mampu mengantisipasi dan merekonsiliasikan paham kenegaraan radikalisme sekularis dengan radikalisme keagamaan, paham kebangsaan homogenis dengan tribalisme atavistis, kebangsaan yang chauvinis dengan globalisme triumphalis, pemerintahan otokratik dengan demokrasi pasar-individualis, serta ekonomi etatisme dengan kapitalisme predatoris.

Bangsa-bangsa lain perlu puluhan tahun sejak Perang dunia ke II untuk memasuki jalan tengah keemasan itu. Adapun bangsa Indonesia telah meletakkannya di titik awal berdirinya republik ini.

Sayang, masalah bangsa ini memang kerap pandai memulai, tetapi gagal memelihara dan mengakhiri.

Tatkala bangsa-bangsa lain mulai menengok warisan pemikiran terbaik bangsa ini, bangsa Indonesia sendiri mulai mengabaikannya. ■





A photograph capturing a chaotic protest scene. In the foreground, a man in a blue shirt is seen from the back, looking towards a group of people. To the right, a large fire burns brightly, casting a red glow. The background is filled with thick white smoke, obscuring many of the participants. A police officer in a blue uniform and cap is visible in the middle ground, looking towards the camera. The overall atmosphere is one of tension and disorder.

**LENSA AKTUAL**

## **Aksi Turunkan Jokowi - JK di Istana Mulai Bakar Ban, Spanduk Hingga Penangkapan Mahasiswa**

Beberapa anggota polisi berusaha menangkap mahasiswa yang membakar ban, poster dan spanduk saat berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (21/5/2015). Aksi mahasiswa menuntut Jokowi-JK turun sempat bentrok dengan polisi dan mengakibatkan beberapa anggota mahasiswa IMM ditangkap.

**Aktual - Munzir**

# Tujuh Bulan Kerja, Fungsi Legislasi DPR Kedodoran

**T**etapan target 37 Rancangan Undang-Undang Program Legislasi Nasional (RUU Prolegnas) Prioritas di tahun 2015 dikhawatirkan tidak akan tercapai. Hingga akhir Mei 2015 atau kurang lebih 7 bulan kerja DPR periode 2014-2019, dewan belum menyentuh secara keseluruhan substansi usulan.

DPR memang sudah menyelesaikan dua Undang-Undang (UU), namun dua UU tersebut tidak mengurangi beban Prolegnas 2015. Sebab dua UU ini merupakan tinggalan DPR periode sebelumnya. DPR periode 2014-2019 hanya menyundulnya.

Dua UU itu adalah UU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota serta UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.

Dengan alokasi waktu yang ada, lima bulan ke depan, DPR akan menyelesaikan 35 RUU tersebut. Tetap target ini telah dibahas dan disepakati bersama oleh seluruh fraksi di parlemen untuk disahkan menjadi UU.

Jumlah keseluruhan RUU lebih realistis saat disepakati bersama untuk diprioritaskan pada 2015. Hal itu berkaca pada tetapan target tahun-tahun sebelumnya yang jumlahnya lebih banyak.

Salah satu kambing hitam yang dijadikan sasaran publik adalah bertambahnya masa reses. Dari sebelumnya 4 kali menjadi 5 kali dalam setahun menjadi. Dalam satu kali reses, setiap anggota diberi waktu yang sangat panjang, sebulan. Dengan kata lain, lima

kali masa reses dalam setahun sudah memakan waktu 5 bulan.

Reses atau masa reses adalah masa dimana anggota DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung

DPR. Misalnya dengan melakukan kunjungan kerja, baik perseorangan maupun secara berkelompok.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Firman Soebagyo belum lama ini mengusulkan agar waktu reses diperpendek. Sebulan reses bagi anggota DPR misalnya, dipotong separuh menjadi 2 minggu saja. Sisanya bisa dialokasikan untuk membahas RUU agar target yang telah ditetapkan bisa tercapai.

Alokasi waktu yang ada



**Rapat Paripurna DPR.** Anggota dewan diantara bangku-bangku kosong saat mengikuti rapat paripurna pembukaan masa sidang ke IV tahun 2014-2015 di gedung Paripurna DPR, Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/5).

dimaksimalkan sebagaimana DPR periode sebelumnya. Dengan begitu ada waktu khusus untuk membahas RUU.

“Ini harus dilakukan untuk mengejar target itu,” tegas Firman, politisi Golkar.

Meski demikian, publik masih pesimistis alokasi yang ada tidak akan dipergunakan dengan baik di Senayan. Berkaca pada tujuh bulan kerja awal menjadi buktinya. Di mana targetan legislasi yang ditetapkan belum juga dibahas, DPR justru membahas revisi UU lain.

Padahal pembahasan revisi itu tidak masuk dalam target Prolegnas. Misalnya rencana revisi UU No 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Revisi keduanya terkait proses pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Pencalonan.

PKPU tentang Pencalonan ini merupakan satu-satunya dari 10 PKPU yang belum disepakati KPU bersama DPR. Konflik internal Partai Golkar dan PPP yang belum berujung menjadi pangkalnya.

Ketua Eksekutif Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) Ridwan Darmawan mengatakan, apa yang ditunjukkan DPR membuktikan bagaimana kerja-kerjanya selama ini kerap berhubungan dengan kepentingannya sendiri. Kepentingan publik yang jauh lebih besar justru dikesampingkan.

“Sejak awal, kami sudah memperkirakan proses legislasi di DPR ini akan kedodoran. Mereka tidak bisa lepas dari kepentingan mereka sendiri, oligarki kekuasaan,” tegasnya kepada *Aktual*, Sabtu (16/5).

Kerja legislasi DPR demikian menurutnya tidak bisa diharapkan. Belum lagi mengenai fungsi lain, baik fungsi anggaran maupun fungsi pengawasan. Dengan sisa waktu yang ada, Ridwan pesimis ke-35 RUU Prolegnas 2015 bisa diselesaikan.

Ia akan mempertanyakan apabila nantinya tetapan target tersebut rampung. Utamanya menyangkut kualitas Undang-Undang yang

### Daftar 37 RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2015 :

Sudah dibahas dan disahkan			
1	RUU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota	17	RUU tentang Arsitek
2	RUU tentang Pemerintah Daerah	18	RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat
Belum dibahas		19	RUU tentang BUMN
1	RUU tentang Penyiaran	20	RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
2	RUU tentang Radio dan Televisi RI	21	RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol
3	RUU tentang ITE	22	RUU tentang Pertembakauan
4	RUU tentang Wawasan Nusantara	23	RUU tentang Kewirausahaan Nasional
5	RUU tentang Pertanahan	24	RUU tentang Minyak dan Gas Bumi
6	RUU tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah	25	RUU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
7	RUU tentang Penerimaan Bukan Pajak	26	RUU tentang Penyandang Disabilitas
8	RUU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	27	RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umroh
9	RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	28	RUU tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri
10	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	29	RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan
11	RUU tentang Merek	30	RUU tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
12	RUU tentang Paten	31	RUU tentang Sistem Perbudakan
13	RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	32	RUU tentang Perbankan
14	RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	33	RUU tentang Bank Indonesia
15	RUU tentang Kedaulatan Pangan	34	RUU tentang Penjaminan
16	RUU tentang Jasa Konstruksi	35	RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK)

dihasilkan. Untuk hal ini, Ridwan meminta DPR berkaca ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan produk legislasi DPR.

“DPR jangan memaksakan diri dalam lima bulan ke depan. Di sini publik harus terus memantaunya, kan publik memang harus dilibatkan dalam proses pembahasan Undang-Undang,” imbuhnya.

Mengenai penambahan masa reses, IHCS juga meminta DPR mengkaji ulang. Apakah penyerapan aspirasi di masing-masing daerah pemilihan anggota DPR berdampak besar pada pembahasan Undang-Undang. Sebab kenyataannya justru berkebalikan, yang ada justru kepentingan DPR dengan mitra kerjanya.

Selain itu, keberadaan tim ahli di Badan Legislasi (Baleg) juga dipertanyakan. Mereka turut bertanggungjawab terhadap lambannya pembahasan RUU Prolegnas 2015.


“Tim ahli ini betul-betul ideal apa tidak, bagaimana kemampuannya, mumpuni apa tidak? Atau jangan-jangan keberadaan mereka bagian dari

bagi-bagi jatah belaka,” sebut Ridwan.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengakui kinerja legislasi DPR belum memuaskan. Akan tetapi ia meminta publik memahaminya secara utuh. Dijelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 sebagaimana diubah menjadi UU 42/2014, DPR tengah memperkuat fungsi legislasi.

Selanjutnya DPR bersama pemerintah membentuk Pusat Kajian Legislasi yang Kepresnya sudah diterbitkan. Diharapkan ke depan keberadaan Pusat Kajian Legislasi ini bisa mengakselerasi pembahasan RUU. Dengan adanya sistem pendukung sudah kuat, ia yakin proses legislasi akan semakin cepat.

Politisi PKS ini menjanjikan ke depan DPR akan konsisten memperbaiki berbagai sistem pendukung untuk melaksanakan tugas parlemen dengan baik. Baleg DPR misalnya, harus terus dikejar untuk menuntaskan banyak regulasi internal.

“Ini adalah syarat suksesnya transformasi menuju DPR modern ke depan,” demikian Fahri. 





Presiden pertama Timor Leste Xanana Gusmao, Wakil Presiden RI 6 Try Sutrisno, Presiden RI 3 BJ Habibie, Presiden RI 6 Susilo Bambang Yudhoyono bersalaman saat mengisi acara Supermentor-6: Leaders, Jakarta, Minggu (17/5/2015), malam.

## Renungan Bermakna dari Petuah Sesebuah Bangsa

**R**uh tepuk tangan terus membahana menyambut tiga mantan presiden dan wakil presiden naik ke atas mimbar. BJ Habibie (presiden ke-3 RI), Susilo Bambang Yudhoyono (presiden ke-6 RI), dan Xanana Gusmao (presiden pertama Timor Leste), dan Try Sutrisno (wakil presiden ke-6 RI) secara bergiliran menyampaikan petuah dalam forum Super Mentor di Grand Ballroom XXI Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, Minggu (17/5).

Acara yang digelar pukul 19.00 hingga 22.00 itu memang mengundang banyak perhatian. Tiga mantan presiden dan satu mantan wakil presiden yang menjadi bintang acara tampil memikat dengan petuah-petuah yang tertuju pada generasi muda.

Satu per satu para tokoh ini menyampaikan pidatonya. Dimulai oleh Try Sutrisno yang kini sudah berusia 79 tahun. Dengan suara tegas, mantan panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)

dan wakil presiden periode 1993–1998 ini menceritakan kisah hidupnya di masa penjajahan Belanda yang penuh liku. Tri Sutrisno kecil hidup berpindah dari satu kota ke kota lain.

"Ini membuat saya harus kreatif. Saat masih kecil dan bapak saya pergi berperang, saya berjualan air dalam kendi, rokok, hingga koran di kereta api dan pasar," tuturnya.

Setelah Tri Sutrisno, Giliran BH Habibie yang mengisahkan tentang masa-masa menjadi Presiden, yakni ketika Indonesia mengalami pergolakan politik, sosial, dan ekonomi yang dahsyat pasca reformasi 1998. Pada masa itu, Habibie dikondisikan untuk berani mengambil banyak kebijakan penting dalam waktu singkat. Termasuk referendum yang berujung lepasnya Timor Timur dari NKRI.

Petuah yang tak kalah mengena dilontarkan Mantan Presiden Timor Leste, Xanana Gusmao. Dia mengatakan bahwa Timor Leste dan Indonesia saat ini menghadapi

masalah yang sama, yakni krisis toleransi.

"Kita berada di suatu zaman yang sulit. Zaman sulit karena intoleransi. Sekarang penjajahan bisa berasal dari sosial media, juga dari teknologi," ujar Xanana.

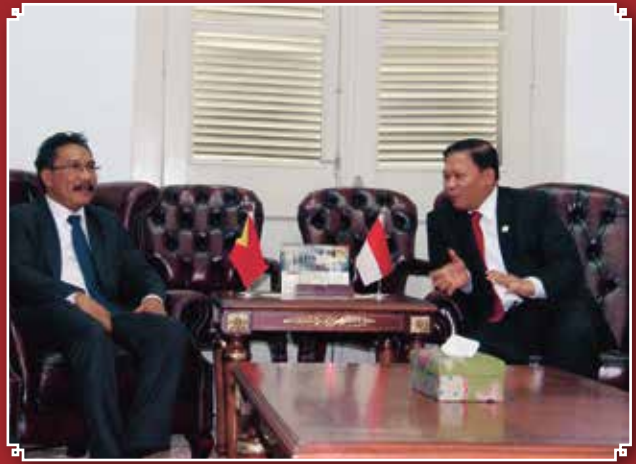
Kondisi ini, lanjut Xanana, adalah tantangan bagi generasi muda untuk menyaring apa yang dilihat di media sosial dan mampu mengambil hal yang positif demi meraih cita-citanya di masa depan. "Agar generasi muda mampu meraih cita-cita itu, kuncinya hanya dengan kerja keras dan keyakinan," ucap Xanana.

Tentang kemerdekaan Timor Leste, Xanana mengatakan bahwa kedaulatan bernegara itu sudah menjadi milik Timor Leste. "Kami punya jalan sendiri memperjuangkannya. Kerja keras, keyakinan, dan yakin mimpi akan menjadi kenyataan," tegasnya.

Forum Super Mentor merupakan acara yang digagas Mantan Dubes R untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal. Acara yang juga menjadi ajang nostalgia para tokoh nasional ini bertajuk 'Empat Negarawan Berbicara Mengenai Filosofi Hidup, Resep Sukses, Etos Kerja dan Ilmu Kepemimpinan'. ■ Moh Sahlan



**KUOTA PELATIHAN** - Didit Hernawan, Wakil Gubernur Lemhanas, menerima cinderamata dari Menhan Timor Leste, Cirilo Cristovao, di Kantor Lemhanas, Jl Merdeka Selatan 10, Jakarta Pusat, Senin (4/5/2015). Didit dan Cirilo mewakili kedua negara membicarakan kerjasama mengenai penambahan kuota siswa pelatihan pertahanan bagi kelembagaan di Timor Leste.



**SERIOUS** - Wakil Gubernur Lemhanas Didit Hernawan menjelaskan kerjasama bilateral dengan Menhan Timor Leste Cirilo Cristovao di Kantor Lemhanas, Jl Merdeka Selatan 10, Jakarta Pusat, Senin (4/5/2015). Keduanya membicarakan mengenai penambahan kuota siswa pelatihan pertahanan bagi kelembagaan di Timor Leste.



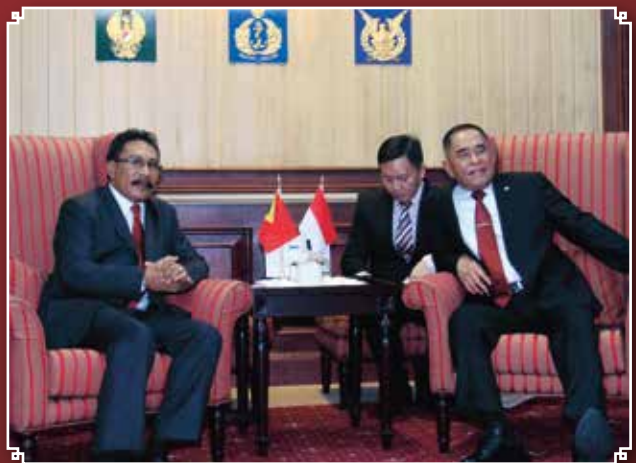
**CINDERAMATA** - Kepala RSPAD Gatot Soebroto yang kini menjadi Kepala Pusat Kesehatan (Kapuskes) TNI, Brigjen TNI Dr. Ponco Agus Prasojo, menerima cinderamata dari Menhan Timor Leste, Cirilo Cristovao, di RPSAD, Jakarta, Senin 4 Mei 2015.



**BERBINCANG** - Kepala RSPAD Gatot Soebroto yang kini menjadi Kepala Pusat Kesehatan (Kapuskes) TNI, Brigjen TNI Dr. Ponco Agus Prasojo, tengah berbincang dengan Menhan Timor Leste, Cirilo Cristovao, dalam kunjungan bilateral sektor kesehatan di Jakarta, Senin 4 Mei 2015.



**CINDERAMATA** - Menhan RI Ryamizard Ryacudu menerima cinderamata dari Menhan Timor Leste Cirilo Cristovao di Kantor Kemenhan RI, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin 4 mei 2015. Kunjungan Menhan Timor Leste dalam rangka meningkatkan kerjasama bilateral antara kedua negara di bidang pertahanan.



**BERBINCANG** - Menhan RI Ryamizard Ryacudu menerima kunjungan Menhan Timor Leste Cirilo Cristovao di Kantor Kemenhan RI, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin 4 mei 2015. Kunjungan Menhan Timor Leste dalam rangka meningkatkan kerjasama bilateral antara kedua negara di bidang pertahanan.



## Awat! Aset Negara Dijual

Sikap pemerintah yang labil dalam menentukan kebijakan dinilai dapat merugikan posisi pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla ke depan. Salah satunya pendapatan pajak negara yang diprediksi akan merosot dan berimbas pada pendanaan pembangunan maupun program pemerintah lainnya.

“Bisa saja pendapatan pajak dan lainnya tidak sesuai target, maka dalam pembahasan APBN 2016 di Agustus nanti akan penuh dilema lantaran memasukkan negara turun, sehingga belanja negara turun,” kata Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah di Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (15/5).

“Artinya, bila terjadi, maka sangat mungkin pemerintah akan melakukan pencabutan subsidi, ini akan membuat kekacauan di masyarakat,” tambah dia.

Mengenai kemungkinan pendapatan negara turun dan berujung pada penjualan aset negara sebagaimana pernah dilakukan pemerintahan dulu, politisi PKS itu menyebut adanya konsekuensi logis.

“Itu konsekuensi, karena mobilitas ekonomi melemah. Bila dasar itu, artinya dana untuk membiayai masyarakat dan pembangunan itu tentu akan terjadi, sehingga jual aset dan cabut subsidi pun akan terjadi untuk memperkuat belanja negara,” cakup Fahri.

Pemerintah awalnya akan menaikkan harga BBM non subsidi. Namun, ternyata hal itu urung dilakukan, padahal pengumuman telah disampaikan. Sikap demikian memberikan sinyal buruknya manajemen kabinet Jokowi-JK. Bahkan, hingga adanya peringatan agar pemerintah tak lagi menjejir popularitas dan pencitraan saja.

Novrizal Sukumbang-Sumitro



## Relawan Sampaikan Lima Maklumat ke Jokowi



Sejumlah komponen pendukung Joko Widodo pada Pilpres lalu yang tergabung dalam Komunitas Juang Relawan Jokowi menyampaikan lima maklumat bagi Presiden dan Wakil Presiden. Maklumat diserahkan langsung ke Presiden pada Jambore Komunitas Juang Relawan Jokowi di Bumi Perkemahan Cibubur Jakarta Timur, Sabtu (16/5) siang.

Dalam pengantarnya, relawan menyampaikan senantiasa mengamati seluruh kebijakan yang diambil pemerintah. Utamanya terkait pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Dimana selama ini belum terkonsolidasi secara efektif.

Maklumat pertama, relawan menyatakan perlunya konsolidasi politik dan konsolidasi birokrasi sesegera mungkin agar pemerintahan dapat berjalan dengan lebih efektif.

Kedua, perlunya dilakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan

yang tidak mendukung implementasi Tri Sakti dan Nawacita yang menjadi mandat bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.

Ketiga, Presiden perlu mengevaluasi kabinet agar dapat bekerja secara efektif dan sejalan dengan semangat Tri Sakti dan Nawacita.

Keempat, perlunya pembangunan ekonomi dan percepatan proyek-proyek infrastruktur dilakukan dalam semangat berdiri di atas kaki sendiri. Di mana modal asing diletakkan sebagai pelengkap terhadap kekuatan modal nasional, bukan sebagai sumber utama.

Terakhir, perlu segera mungkin dilahirkan berbagai kebijakan dan program yang mendorong produktivitas rakyat sebagai peyanga ketahanan ekonomi dan sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Sejumlah komponen yang menghadiri Jambore tersebut antara lain Cemara 19, Bara JP, Pospera, Kawan Jokowi, Relawan Merah Putih, Gerakan Nasional Rakyat, Sekber Jokowi, Kebangkitan Indonesia Baru, Seknas Jokowi, Relawan Rakyat Merah Putih, Cakra Naga, Gerakan Relawan Indonesia, Arus Bawah Jokowi, Srikandi Jokowi dan EP for Jokowi. Ant/Andy Abdul Hamid-Sumitro

## Harga BBM Urung Naik Untuk Aksi 20 Mei



Pengamat Politik Idil Akbar mengamini jika ada penilaian labilnya sikap pemerintah dalam penaikan harga BBM sebagai antisipasi aksi besar-besaran pada 20 Mei lalu.

Meski begitu, ia sebenarnya tidak melihat adanya tanda-tanda akan terjadi aksi besar-besaran dari gerakan

mahasiswa dan masyarakat pada 20 Mei 2015. Isu yang sebelumnya sempat ramai dibicarakan kelompok mahasiswa berbagai daerah.

“Saya belum melihat ada cukup letupan yang membawa 20 Mei aksi besar, tapi sebagai antisipasi iya,” kata Idil, Jumat (15/5).

Ditambahkan, pemerintah kemungkinan juga melihat secara kondisional masyarakat, bahwa kenaikan harga solar dan pertamax tidak cukup rasional.

Dari kejadian ini, Presiden Jokowi diharapkan bisa benar-benar mempertimbangkan *reshuffle* kabinet terhadap kinerja menteri-nya. Karel Stefanus-Sumitro





## Mega-SBY Masih Panas Karena Gaya Politik

Kongres Demokrat berhasil menghadirkan Presiden Joko Widodo, namun hal itu belum cukup melegakan untuk politik nasional. Sebab, kongres tersebut tidak dihadiri oleh beberapa ketua umum partai.

Bahkan yang hadir di Kongres Demokrat hanya beberapa ketua umum, seperti Zulkifli Hasan (PAN), Romahurmuziy (PPP hasil muktamar Surabaya), Wiranto (Hanura), Agung Laksono (Golkar munas Ancol) dan Sutiyoso (PKPI). Sementara Megawati dan ketua umum partai-partai tidak hadir.

Demikian pengamat politik LIPI, Siti Zuhro, Jum'at (15/5). Menurutnya, ketidakhadiran Megawati dalam Kongres ke IV partai Demokrat disebabkan gaya komunikasi politik Susilo Bambang Yudhoyono.

"Secara umum belum cukup melegakan karena belum cairnya komunikasi SBY-Megawati, dan komunikasi SBY dengan ketua-ketua umum partai lainnya," papar Siti.

Ketidakhadiran ketum parpol lain di Kongres Demokrat bisa diterjemahkan bahwa dalam kegiatan-kegiatan besar parpol lain, SBY sebagai ketua Demokrat juga tidak hadir. Oleh karenanya wajar jika ketua umum parpol lain juga enggan hadir jika diundang SBY.

"Kalau ada tokoh politik yang tak suka melakukan silaturahmi, maka jangan salahkan kalau orang lain pun tak melakukan juga," pungkasnya. / Sumitro

## Yudi Latif dan Ichsanudin Noorsy Layak Masuk Kabinet

Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin menyebut ada beberapa nama yang layak masuk dalam Kabinet Kerja bila Presiden Joko Widodo melakukan perombakan kabinet.

"Ichsanuddin Noorsy, Imam Prasodjo, Yudi Latif, Jimly Asshiddiqie, Faisal Basri, Busro Muqoddas atau Saldi Isra yang layak masuk dalam kabinet," kata Said kepada Aktual, Kamis (14/5).

Menurutnya, Presiden Jokowi perlu menunjuk orang-orang baru yang lebih prospektif dan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah untuk menggantikan menteri-menteri saat ini yang performanya kurang optimal.

Dalam penilaiannya, Ichsanuddin Noorsy tepat menempati posisi Menko Bidang Perekonomian. Ia memiliki komitmen yang sangat tinggi untuk membangun perekonomian yang sesuai dengan konstitusi. Hal itu cocok dengan program Nawa Cita Presiden Jokowi.

Sofyan Jalil yang saat ini menjabat Menko Perekonomian bisa digeser di posisi kementerian lain. Begitu pula beberapa nama yang lain yang mungkin bisa direposisi di tempat yang lebih tepat.

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kebudayaan, Said menilai pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla memerlukan orang-orang seperti sosiolog Imam Prasodjo, budayawan

Yudi Latif atau nama lain yang memiliki integritas dan keahlian di bidang tersebut.

"Presiden Jokowi bisa memilih Jimly Asshiddiqie atau orang lain yang setaraf dengan Jimly untuk menggantikan Tedjo," ujarnya.

Said mengatakan Jimly merupakan pendiri dan ketua pertama Mahkamah Konstitusi (MK) yang memiliki integritas tinggi dan mengerti betul persoalan politik negara, peraturan perundang-undangan serta masalah hukum dan keamanan yang sesuai dengan konstitusi.

"Kewibawaan lembaga Kepresidenan juga akan terangkat bila Jimly bisa duduk sebagai Menkopolkumham," katanya.

Said juga mengusulkan nama ekonom Faisal Basri untuk menggantikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said atau Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.

"Presiden Jokowi perlu figur yang memiliki komitmen tinggi untuk melindungi sumber daya alam dan mineral guna dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Faisal Basri, atau nama-nama lain yang lebih mementingkan kesejahteraan rakyat daripada kepentingan bangsa lain, tepat menjadi Menteri ESDM atau Menteri BUMN," tuturnya.

Sedangkan nama-nama seperti Busro Muqoddas atau Saldi Isra bisa menggantikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly. /Sumitro



Kebijakan Pemerintah membubarkan PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) memicu perang urat syarat antara Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dan Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Banyak masalah yang tertutupi dibalik kisruh pembubaran anah usaha PT Pertamina (Persero) ini.

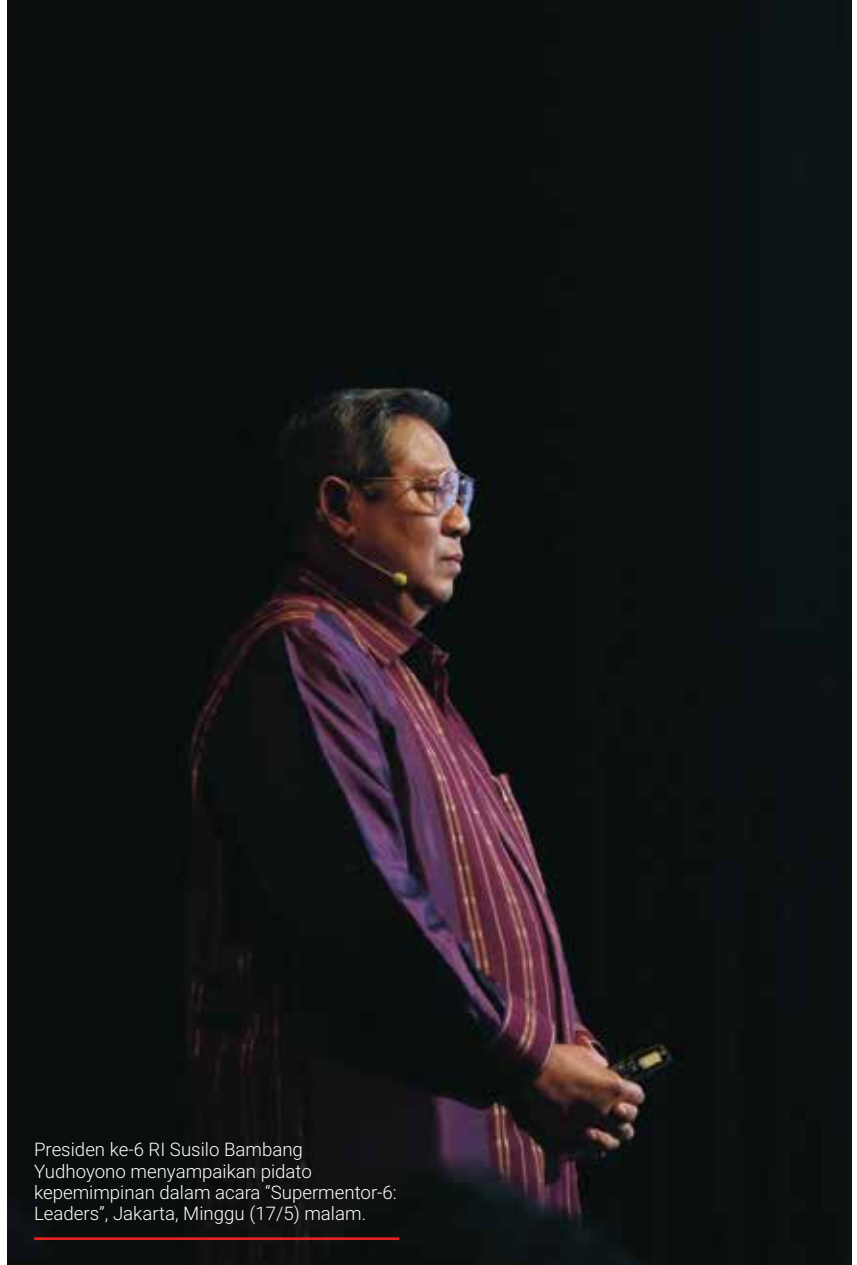
**M**engenakan baju hem biru dan celana hitam, Kuntoro Mangkusubroto mendatangi kantor Kementerian ESDM pada penghujung Oktober 2014 silam. Bulan itu adalah masa-masa bahagia bagi Sudirman Said yang baru dilantik sebagai menteri oleh Presiden Joko Widodo. Kuntoro sendiri termasuk orang pertama yang memeluk Sudirman dan membisikkan ucapan selamat atas jabatan bergengsi yang baru disandanginya.

“Sudirman Said sahabat saya. Saya datang ke sini memberikan selamat,” ujar Kuntoro tujuh bulan silam.

Kedatangan Kuntoro itu sebenarnya membawa pesan tertentu yang ingin disampaikan kepada sang menteri. Besar kemungkinan pesan itu masih terkait dengan latar belakang Kuntoro yang dekat dengan Presiden SBY. Maklum, komunikasi Kuntoro dan SBY boleh dibilang tanpa sekat karena dia dipercaya menjadi Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Teman tinggal teman, sedangkan kepentingan selalu menjadi yang utama. Pesan-pesan Kuntoro tidak mempan karena Sudirman Said justru menyerang SBY terkait kebijakan membubarkan Petral. Telinga SBY panas mendengar pernyataan Sudirman bahwa usul pembubaran Petral sebenarnya sudah lama disampaikan, namun terhenti di meja Presiden SBY.

Dalam situs berita *ROL.com*, Sudirman mengatakan di masa



Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato kepemimpinan dalam acara “Supermentor-6: Leaders”, Jakarta, Minggu (17/5) malam.

## Sandiwara di Balik Pembubaran Petral

pemerintahan SBY, kerap kali upaya membenahan mafia migas hanya berhenti di meja kerja presiden. Padahal yang terpenting dalam memberantas mafia adalah keteguhan seorang presiden untuk melakukan membenahan secara menyeluruh.

“Itulah sebabnya ketika saya diundang oleh presiden sehari sebelum ditunjuk sebagai menteri. Beliau bertanya banyak hal termasuk soal mafia. Saya jawab, pak

sebetulnya dahulu banyak kegiatan inisiatif baik dari Pertamina namun selesai di sini. Di mana? Di kantor presiden, karena presiden tidak mendukung,” jelas Sudirman.

Terkait pembubaran Petral, Sudirman mengatakan bahwa Pertamina mengalihkan fungsi pengadaan dari Petral kepada Integrated Supply Chain (ISC) sejak awal 2015. Selama tiga bulan penataan fungsi ISC, Pertamina



sudah melakukan penghematan USD22 juta dolar atau sekitar Rp250 miliar.

“Jadi sepanjang pemimpin lurus itu soal-soal ini tinggal teknis saja. Jadi saat ini saya harus katakan. Upaya kita mendorong penataan *supply chain* ini tidak lepas dari keteguhan presiden karena memang ini adalah transaksi besar yang melibatkan uang sangat besar dan dikaitkan untuk politik,” tandasnya.

Pernyataan Sudirman ini langsung memicu reaksi SBY. Melalui akun facebook pribadinya, SBY mengaku di fitnah dan berusaha didiskreditkan, padahal komitmennya memberantas mafia sangat kuat dengan membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Ketua Umum DPP Partai Demokrat ini pun meminta Sudirman segera mengklarifikasi pernyataannya.

“Saya amat terkejut dengan pernyataan Menteri ESDM Sudirman Said yang menyerang dan mendiskreditkan saya ketika menjadi Presiden dulu. Sudirman Said, melalui berita *Republika Online*, mengatakan bahwa pemberantasan mafia migas selalu berhenti di meja SBY,” ucapnya.

SBY mengatakan, selama

menjabat sebagai Presiden sama sekali tidak pernah ada surat di meja kerjanya tentang pembubaran Petral. “Saya ulangi, tidak ada (surat usulan pembubaran Petral). Kalau ada, pasti sudah saya tanggapi secara serius. Tidak mungkin berhenti di meja saya,” tulis SBY.

Lebih jauh SBY mengaku sudah berkoordinasi dengan mantan Wakil Presiden Boediono dan lima mantan menteri untuk menanyakan perihal pembubaran Petral. “Semua menjawab tidak pernah ada, termasuk tidak pernah ada tiga surat yang katanya dilayangkan oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan waktu itu,” kata SBY.

Selama 10 tahun menjabat sebagai Presiden, lanjut SBY, sama sekali tidak pernah mengintervensi BUMN manapun. Termasuk urusan tender dan bisnisnya. Yang penting jangan korupsi dan berpesan agar semua BUMN berkembang baik, bayar pajak dan deviden, tidak ada korupsi dan jangan pula jadi sapi perah.

Diakhir celotehnya, SBY meminta agar Sudirman Said segera menyampaikan klarifikasi. Namun di sisi lain SBY mengaku sadar bahwa ucapan klarifikasi itu sulit didapat karena saat ini tidak lagi memiliki

Menteri BUMN Rini Soemarno (kedua kiri), Menteri ESDM Sudirman Said (kedua kanan), Dirut PT Pertamina Dwi Soetjipto (kiri) dan Komisaris Utama PT Pertamina Tanri Abeng (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan terkait proses penghentian kegiatan Petral Group di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (13/5).

kekuasaan seperti sebelumnya. “Mungkin tidak mudah menghadapi yang tengah berkuasa sekarang ini. Tetapi, kebenaran adalah ‘power’ yang masih saya miliki,” tandasnya.

Sikap mengelak SBY ini sendiri memicu respon yang beragam. Bahkan ada yang menyebut SBY berbohong karena usulan pembubaran Petral sudah didengungkan sejak dia menjabat Presiden. Salah satu sosok yang gencar mengatakan ini adalah Marzuki Alie yang ketika itu menjabat sebagai Ketua DPR.

Marzuki mengatakan, usul pembubaran Petral sudah sejak lama disampaikan kepada pemerintah SBY. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat ini juga mengingatkan bahwa SBY akan sulit mengelak soal Petral karena banyak pemberitaan di media massa saat itu yang mengangkat tentang praktik mafia migas di Petral. Termasuk



kedatangan Dahlan Iskan ke Istana Bogor menghadap SBY kemudian memberikan pernyataan mengenai rencana pembubaran Petral.

Pernyataan Marzuki ini memang benar karena pemberitaan tentang usulan pembubaran Petral sudah ramai pada 2012. Sejumlah media *on line* memang memberitakan pernyataan Marzuki tahun 2012 yang berkali-kali meminta pemerintah SBY untuk membubarkan Petral dan meminta KPK untuk memeriksa korupsi yang ada di anak perusahaan Pertamina tersebut.

Dalam sebuah media terbitan 20 Februari 2012, Marzuki menyampaikan bahwa dia berkali-kali meminta pemerintah mengevaluasi Petral yang diduga melakukan penyelewengan tender minyak. Petral diduga telah merugikan negara dengan membeli minyak tanpa tender dari Pertamina sebanyak 800 ribu perbarell setiap hari. Diduga total minyak yang dibeli Petral mencapai USD 18 billion per tahun.

“Saya kira perlu dievaluasi, perlu dibongkar itu. Tentunya jika terbukti ada terjadi praktik-praktik korupsi di dalamnya harus diberikan sanksi hukum yang tegas,” kata Marzuki tiga tahun silam.

Tidak lama sebelum Marzuki menyampaikan *statement* itu, para politikus nasional seperti Ali Mochtar Ngabalin, almarhum Ade Daud Nasution, Adhie Massardie, Marwan Batubara, Johnson Panjaitan, dan Hasto Kristianto yang saat itu menjabat Wasekjen PDI-Perjuangan, melaporkan dugaan penyelewengan tender minyak oleh perusahaan Pertamina ke KPK. Mereka menuding Pertamina telah memanipulasi tender minyak melalui Petral. Mereka juga menuding Petral adalah perusahaan akal-akalan Pertamina.

Masih pada tahun 2012, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menyebut dalam waktu dekat akan mengambil keputusan soal nasib Petral. Bahkan bos media Jawa Pos Group ini mengaku akan mempertimbangkan

pembubaran Petral, dan ucapan ini disampaikannya setelah menghadap SBY.

“Kami lihat satu-dua hari ini bagaimana apakah memang harus bubar atau memperbaiki. Apakah nanti itu bagaimana, kami lihat dulu,” ucap Dahlan pada 27 Februari 2012.

### Kentut Teriak Kentut

Ketika SBY semakin terpojok, politikus PDI-Perjuangan Effendi Simbolon tampil. Dia mengatakan bahwa Menteri ESDM Sudirman Said dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait pembubaran Petral sebenarnya hanya polemik antar sesama rival saja. Dia pun mengingatkan bahwa Sudirman Said sebenarnya orang yang juga ikut terlibat dalam politik migas nasional terkait kinerja Petral selama ini.

“Ini sebenarnya hanya pecah kongsi antara Petral dulu. Yang menuding itu juga yang menikmati *kok*. Sudirman Said ini kan anak buahnya Ari Sumarno,” kata Effendi akhir Mei 2015.

Menurut Effendi, polemik pembubaran Petral hanyalah proses transisi di antara sejumlah kartel yang bermain dalam bisnis minyak di Pertamina. Jika memang berani, semestinya semua pihak mendukung untuk dilakukan audit guna melihat pihak-pihak mana saja yang selama ini mengambil keuntungan dari Petral.

“Dia (Sudirman Said) menuding dirinya sendiri juga. Silakan ditindaklanjuti melalui audit forensik,” tantang Effendi.

Politikus yang terkenal vokal ini juga mengingatkan bahwa upaya membubarkan Petral masih lemah karena sampai sekarang pun Petral sebenarnya belum bubar. “Sekarang ini hanya buka *chasing*. Ini kan hanya pindah tangan dari kartel A ke kartel B. Sudirman Said kan bagian dari kartel B, yang sekarang ISC. Kita juga tidak bisa menutup mata begitu saja, bahwa selama ini ada pihak-pihak yang menikmati Petral,” tuntasnya.

Pada bagian lain, Ketua Komisi

VII DPR, Mulyadi meminta Sudirman Said jangan asal menuduh mantan Presiden SBY seolah melindungi Petral. Justru selama ini Sudirman Said adalah sosok yang melindungi Petral karena tidak pernah mau membubarkan Petral.

Mulyadi mengaku punya rekaman di mana Sudirman Said dalam rapat kerja dengan Komisi VII selalu membela keberadaan Petral. Sudirman justru menegaskan ingin menguatkan Petral dan mendukung kerjasama dengan Petronas sebagai *trader*.

“Ini sama kayak orang kentut, yang kentut sendiri juga nyari siapa yang kentut. Kalau orang kentut kan bilang, eh siapa sih yang kentut padahal dia. Yang paling keras itu biasanya yang kentut,” kata Mulyadi.

Mulyadi pun heran bahwa hanya SBY yang dituduh, padahal PT Petral menurutnya sudah ada sejak era zaman orde baru. Dia pun menuding bahwa pembubaran Petral hanya merupakan isu politik dan tidak menasar substansi sebenarnya. “Sekarang ini kan Petral dibubarkan, karena sudah ada ISC. Tapi kalau orang-orangnya sama saja, *yah* percuma membubarkan Petral. Petral tidak usah dibubarkan pun sudah tidak berfungsi karena fungsinya pindah ke ISC dengan pelaku yang sama,” tegasnya.

Dia pun mengingatkan Presiden Jokowi yang membawa Presiden Anggola untuk bekerja sama mendapatkan minyak yang murah karena bisa membeli langsung dari produsen, pada akhirnya yang menangani penjualannya juga adalah perusahaan *trading* dari Cina, Sonangol. “Kalau mau membasmi tikus, *yah* tikusnya yang dibakar, bukan lumbungnya. Sekarang tikusnya pindah, ya sama saja. Kalau perlu yang harus dibakar ya pemelihara tikusnya, tapi sayangnya kan kita tidak tahu siapa yang memelihara tikus tersebut,” tandasnya. ■ Moh Sahlan





**Dialog RUU Perbukuan** - Anggota Komisi X DPR Popong Otje Djunjungan (tengah) bersama Ketua Ikatan Penerbit Indonesia Afrizal Sinaro (kiri) dan Editor Senior PT Gramedia Group Irna Permanasari menjadi pembicara diskusi Forum Legislasi soal RUU Perbukuan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (26/5/2015).

# RUU Perbukuan Tengah Di Godok DPR

**B**agian Pemberitaan DPR RI kembali menggelar acara Forum Diskusi Legislasi, dengan pembahasan “Rancangan Undang-Undang (RUU) Perbukuan” di Ruang Press Room DPR RI, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (26/5).

Adapun narasumber pada acara tersebut adalah Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Golkar Popong Otje Djundjungan, Ketua Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) DKI Jakarta dan Sekjen Gerakan Ayo Membaca Indonesia (Amindo) Afrizal Sinaro, serta Editor Senior PT Gramedia Group Irna Permanasari.

Menurut Popong Otje Djundjungan saat ini Komisi X DPR tengah menggodok RUU Perbukuan dengan fokus utama dari pembahasannya antara lain adalah terbentuknya Badan Perbukuan Nasional (BPN) yang bertugas

untuk mengelola pembukuan nasional.

Dirinya optimis jika RUU ini akan dapat dirampungkan pada tahun 2016, karena pembahasan RUU ini sendiri tidak boleh lebih dari 2 tahun. “Pembahasan, RUU buku diharapkan dalam beberapa bulan sudah selesai,” ucap Popong.

Indonesia sambung dia seharusnya, sudah sejak lama memiliki UU Perbukuan, sehingga tidak menimbulkan persoalan pengadaan buku bagi anak sekolah dikemudian hari.

“Dalam RUU Perbukuan sendiri nantinya terdapat 19 bab dan 161 pasal,” ungkap Popong.

Popong menambahkan dalam RUU Perbukuan ini, sistemnya tidak terlalu ditonjolkan, tapi yang lebih ditonjolkan adalah tugas dan tanggung jawab BPN.

Sementara itu menurut Irna Permanasari dalam RUU Perbukuan, buku terbagi menjadi beberapa jenis,

misalnya buku teks, buku hiburan, buku proyek.

Selain itu sambung Irna dalam RUU juga mengatur soal distribusi buku. “Dalam prakteknya sekarang, toko buku kecil banyak yang mati. Toko buku yang ada adalah toko-toko buku besar dan grup toko buku. Dan ini perlu diatur dalam UU untuk melindungi toko-toko kecil,” jelas Irna.

Sedangkan Afrizal Sinaro, berpendapat jika UU Perbukuan sangat penting, dan persoalan buku muncul, karena belum ada UU-nya. Ketimpangan antara penulis, penerbit dan pemerintah terjadi karena belum ada UU-nya.

Hingga kini kata dia penerbit yang tergabung dalam wadah Ikapi, ada sekitar 700 penerbit. “Penerbit, terbitkan buku umum, untuk 3000 eksemplar saja, dalam waktu satu tahun belum tentu bisa terjual semua,” keluh dia.

Ironisnya sambung dia, pemerintah hingga saat ini belum memfasilitasi terselenggaranya pameran buku, hal ini berbeda dengan di luar negeri, di mana pemerintah urun rembug dalam terselenggaranya pameran buku tersebut.

## PSHK Desak DPR Segera Sahkan 37 RUU

Direktur Monitoring Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia Ronald Rofiandri mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera mengesahkan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU), termasuk Perppu KPK.

Produk hukum tersebut hingga kini belum bisa dibawa ke paripurna untuk ditetapkan menjadi RUU Usul Inisiatif DPR karena proses harmonisasinya belum selesai. Sementara itu RUU dimaksud antara lain RUU Perumahan Rakyat, RUU Penjaminan dan RUU Larangan Minuman Beralkohol.

“Perlu diketahui bahwa DPR, DPD, dan Pemerintah telah menyepakati 37 RUU menjadi Prolegnas Prioritas 2015, yang terdiri dari 26 RUU usulan DPR, 10 RUU usulan Pemerintah, dan 1 RUU usulan DPD,” cetus Ronald melalui siaran pers yang diterima redaksi, Minggu (17/5).

Lebih lanjut Ronald mengatakan konsekuensi dari adanya sejumlah RUU yang diprioritaskan adalah sudah tersedianya Naskah Akademik (NA) dan naskah RUU-nya, mengingat syarat dari suatu RUU bisa diprioritaskan adalah adanya NA dan naskah RUU.

“Dengan demikian, seharusnya ketiga pihak tersebut sudah dapat



menjalani proses yang lebih signifikan untuk segera memulai proses pembahasan terhadap 37 RUU tersebut,” kata Ronald.

Ronald mengatakan ketika DPR periode 2014-2019 lebih banyak mengalokasikan waktu reses, maka akselerasi proses legislasi jelas menjadi kebutuhan alat kelengkapan DPR, fraksi hingga Setjen DPR. “Karena otomatis masa sidang menjadi lebih sedikit,” ucap Ronald.

Menurut dia, keberadaan RUU Penyandang Disabilitas adalah contoh RUU yang sudah disampaikan usulannya kepada DPR oleh berbagai kelompok yang menjadi pemangku kepentingan sehingga fraksi-fraksi dan Setjen DPR sangat berpeluang tidak memulainya lagi dari nol.

Di sisi lain, sambung dia pemerintah dalam hal ini Presiden sudah bisa menentukan sejumlah RUU yang bisa disampaikan NA dan naskah RUU-nya kepada DPR pada masa sidang sekarang, salah satunya adalah RUU KUHP.

Begitu pula bagi DPD yang mengusulkan RUU Wawasan Nusantara dan masuk dalam prioritas 2015. “Maka NA dan naskah RUU-nya seharusnya sudah siap untuk disampaikan oleh DPD kepada DPR dan Pemerintah,” tegas dia.

Terkait dengan rencana penetapan hari legislasi, kata Ronald, sebenarnya yang perlu diingat pula bahwa ketika DPR periode lalu mencanangkan dua hari sebagai hari legislasi. “Target Prolegnas prioritas tahunan maupun *long list* tetap tidak tercapai juga. Solusi hari legislasi cenderung reaksioner dan ditujukan pada hilir persoalan. Padahal hulu permasalahan ada pada desain Prolegnas yang bermasalah,” kata Ronald.

Wajah anggota DPR berganti tiap periodenya, kata Ronald tetapi desain Prolegnasnya masih menggunakan desain yang bermasalah. “Maka DPR dan Pemerintah akan mengalami berulang kali kegagalan capaian Prolegnas, sekalipun ada hari legislasi,” sesal dia. / Deddy K



## Menteri Agama Upayakan Penetapan Puasa Ramadhan 1436 H Secara Bersamaan

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan pihaknya tengah mengupayakan penyatuan pandangan atas penetapan awal puasa Ramadhan 1436 H, meskipun Muhammadiyah sendiri telah menetapkan awal puasa pada Kamis, 18 Juni 2015 dan ketetapan itu sesuai dengan maklumat Pengurus Pusat Muhammadiyah kepada warganya yang sudah disebar ke pengurus-pengurus di daerah.

“Insya Allah, 1 Ramadhan bisa dilakukan. Kita upayakan,” jelas Lukman di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Senin, (11/5).

Lukman mengatakan Kementerian Agama sudah mendiskusikan hal ini dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam rangka memutuskan awal puasa. Begitu juga dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang sudah menjalin komunikasi terkait masalah penetapan 1 Ramadhan 1436 H.

“Kita upayakan dengan *muzakarah*. Semoga ada kesamaan cara pandang,” jelas dia.

Selain berdiskusi dengan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi kemasyarakatan dengan jumlah pengikut besar, Lukman berharap organisasi keagamaan lain, seperti Syattariyah dan Naqsyabandiyah, juga berpandangan sama dalam penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal 1436 H.

Terkait masalah ini kata Lukman, pihaknya akan terus berkomunikasi dengan organisasi-organisasi keagamaan itu. “Kita berikhtiar agar komunikasi semakin baik. Ada kesadaran yang tinggi,” ujarnya. / Deddy K





## Yuddy Isyaratkan Akan Ada Evaluasi Sejumlah Menteri

bahwa waktunya sudah habis untuk *leha-leha*, harus bekerja, sudah diingatkan sebelumnya tentang pentingnya serapan anggaran,” ucap Yuddy di Istana Negara, Jumat, (15/5).

Dengan *warning* yang dikeluarkan Jokowi, katanya, dapat ditarik kesimpulan jika presiden sudah mempunyai bahan evaluasi terhadap pembantunya.

Terkait nomenklatur kementerian baru dan lama, kata Yuddy sudah semua kementerian menuntaskannya dan menata ulang struktur organisasinya dan sudah diberikan peraturan presiden. Tetapi hanya satu kementerian yang belum menuntaskannya, yakni Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Pasalnya, nomenklatur dalam kementerian itu menginginkan adanya wakil menteri.

“Kementerian PAN tidak punya kewenangan untuk memberikan tanggapan rekomendasi, karena

posisi wakil menteri dalam Bappenas itu jabatan politis, strategis, dan yang menentukan Presiden,” ujar Yuddy.

Akibatnya, hingga saat ini peraturan presiden struktur organisasi kelembagaan Bappenas belum ditandatangani.

Yuddy menyangkal jika lambatnya tata ulang struktur organisasi kementerian berdampak kepada penyerapan anggaran.

Sejak Maret lalu kata Yuddy seluruh kementerian sudah memiliki struktur organisasi yang jelas untuk menggunakan anggaran.

Di sisi lain, kata Yuddy, pergantian pejabat dikementerian dilakukan setelah organisasi ada. Tetapi kata Yuddy semua ini tergantung bagaimana menterinya, bukan presiden. “Jadi tidak ada masalah krusial dan fundamental, masalahnya ada di menterinya masing-masing, untuk percepat implementasi program kerja dan serapan anggaran,” jelas dia. / [Deddy K](#)

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan Presiden Joko Widodo telah mengantongi nama sejumlah menteri yang akan dievaluasi.

Menurut Yuddy, hal tersebut terlihat pada saat rapat kabinet, ketika itu Jokowi memberikan peringatan soal penyerapan anggaran kepada beberapa kementerian.

“Presiden sudah memberikan *warning* pada menteri-menterinya

## PPP Versi Rommy Pede Bertarung di Pilkada Serentak

Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuziy, Rusli Effendi mengaku siap bertarung pada pemilihan kepala daerah serentak tahun ini berbekal surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM yang ada. Dan PPP sendiri optimistis jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal menerima kepengurusan mereka meski belum ada kekuatan hukum tetap.

“SK Kemenkumham tetap berlaku karena ada banding dari tergugat dan tergugat intervensi, yaitu kami,” jelas Rusli di Kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Minggu, (17/5).

Sebelumnya diberitakan, Senin (2/3) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah memenangkan gugatan yang diajukan PPP Kubu Suryadharma Ali terhadap

Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian, sebagai tergugat, dan kubu Romahurmuziy sebagai tergugat intervensi mengajukan banding atas putusan tersebut.

“Dengan demikian, SK Menkumham Nomor M.HH.07.AH.11.01 Tahun 2014 tentang perubahan kepengurusan DPP PPP tanggal 28 Oktober 2014 masih berlaku,” tegas Rusli.

KPU sendiri telah mengeluarkan peraturan KPU mengenai keikutsertaan partai politik yang diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai peserta pemilihan kepala daerah.

Pada Pasal 36 disebutkan KPU menerima pendaftaran pasangan calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri Hukum dan HAM tentang penetapan kepengurusan partai politik yang kepengurusannya



masih dalam proses sengketa. Jika belum ada keputusan hukum tetap, KPU menerima pendaftaran calon berdasarkan keputusan Menteri tentang kepengurusan hasil kesepakatan perdamaian. / [Deddy K](#)



TPPI

983-T-0

LPG

CAPACITY : 6



01

5580







**D**irektorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI (Bareskrim Polri) memastikan kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan pokok perkara korupsi penjualan Kondensat milik negara oleh BP Migas (kini SKK Migas) kepada PT Trans Pacific

Petrochemical Indotama (PT TPPI) tidak akan berhenti setelah penetapan pejabat SKK Migas dan petinggi TPPI sebagai tersangka, karena Bareskrim menemukan adanya kerugian negara dengan nilai yang cukup fantastis.

“Kerugian negara lebih kurang USD 156 juta atau lebih dari Rp 2 triliun,” ucap Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Victor Edi Simanjuntak, Selasa (5/5).

Pada kasus ini, Dittipideksus Bareskrim Polri juga sudah melakukan penggeledahan di Kantor PT TPPI di Gedung Mid Plaza, Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, dan Kantor SKK Migas di Wisma Mulia, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

Kasus ini berawal saat SKK Migas pada 2009 melakukan proses penunjukan langsung penjualan kondensat bagian negara kepada



Victor Edi Simanjuntak

PT TPPI. Namun ironisnya, proses yang dilalui tidak sesuai ketentuan yang berlaku sehingga menyalahi aturan keputusan BP Migas nomor: KPTS-20/BP00000/2003-50 tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjual Minyak Mentah/ Kondesat Bagian Negara.

Selain itu, penunjukan PT TPPI sebagai penjual kondensat jatah negara itu juga menyalahi

keputusan Kepala BP Migas nomor kpts-24/BP00000/2003-So tentang Pembentukan Tim Penunjukan Penjualan Minyak Mentah Bagian Negara.

Dan ditemukan pelanggaran atas pasal 2 dan atau pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah UU nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor. Dan atau pasal 3 dan pasal 6 UU nomor 15 2002 tentang TPPU sebagaimana diubah dengan UU nomor 25 tahun 2003.

Sedangkan berdasarkan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disebutkan kerugian negara hingga Rp 8,5 triliun dalam sejumlah kasus yang melibatkan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).

Selain itu, potensi kerugian negara juga tersebar di tiga lembaga, yaitu Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), PT Perusahaan Listrik Negara, serta PT Pertamina. "Ini audit investigasi, rekomendasinya akan agak keras," cetus anggota BPK, Achsanul Qosasi, Rabu (13/5).

Pihaknya kata dia telah mengaudit kasus itu sejak enam bulan lalu. Kini, audit yang telah rampung adalah audit terhadap PLN yang ditaksir menimbulkan kerugian negara Rp 68 miliar. Sedangkan audit terhadap dua lembaga lain diperkirakan akan rampung dalam satu bulan kedepan. BPK memprediksi kerugian negara di Pertamina mencapai Rp 6 triliun dan di SKK Migas sebesar Rp 2,4 triliun.

Potensi kerugian negara di PLN sambung Achsanul disebabkan kegagalan TPPI memenuhi pasokan bahan bakar minyak sebesar 300 ribu kiloliter high speed diesel (HSD). Sedangkan di Pertamina, karena TPPI tak bisa membayar pendanaan pembangunan kilang. "Ini, kan, perusahaan milik negara. Jadi kalau tidak dibayar ada kerugian," jelas dia.

Di SKK Migas sendiri, tambah Achsanul, uang negara

bisa amblas karena TPPI tidak dapat mengembalikan uang yang semestinya masuk kas negara.

Di tahun 2009, kata Achsanul, pemerintah ingin menghidupkan kembali TPPI yang tengah sekarat dengan mengucurkan talangan dan hak penjualan langsung kondensat. Tetapi kemudian TPPI tidak menyetorkan hasil penjualannya kepada negara.

Bareskrim Polri juga sudah menetapkan mantan Deputy Pengendalian Keuangan SKK Migas Djoko Harsono terkait kasus dugaan korupsi penjualan minyak mentah atau kondensat tersebut.

Peran Djoko Harsono dinilai sebagai pihak yang terlibat langsung dalam proses penunjukan langsung PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI) dalam pengolahan kondensat selama kurun waktu 2009 hingga 2011.

Sebelumnya Bareskrim juga telah menetapkan mantan Kepala BP Migas (sekarang SKK Migas) Raden Priyono (RP) dan Direktur Utama (Dirut) PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), Honggo Wendratno (HW) sebagai tersangka kasus mega korupsi penjualan minyak mentah atau kondensat.

Sedangkan menurut Victor, peran pendiri TPPI Honggo Wendratno adalah pihak yang menyalahgunakan wewenang dalam penunjukan TPPI untuk pembelian kondensat negara.

Kamis 20 Mei lalu Bareskrim memeriksa Raden untuk kali pertama. Disamping kuasa hukumnya dari kantor pengacara milik mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono ia diperiksa selama 11 jam.

"Banyak (pertanyaan dari penyidik). Soal TPPI, saya jelaskan saja wewenang tugas pokok fungsi wewenang kepala BP Migas seperti apa. Bagaimana saya mengikuti peraturan dan kebijakan-kebijakan pemerintah," kata Raden Priyono usai pemeriksaan di gedung Bareskrim Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jaksel, Kamis (20/5/2015). ■ [Deddy K](#)



# Hasil Penggeledahan Bareskrim Polri







**S**ebelumnya penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Polri juga telah menggeledah kantor SKK Migas, Selasa (5/5) dan dipimpin langsung oleh komandannya Brigadir Jenderal Victor Simanjuntak, tidak hanya gedung SKK Migas yang menjadi sasaran penggeledahan, kepolisian juga menyisir kantor PT Trans Pacific Petrochemical Indotama di Gedung Mid Plaza, di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat untuk menemukan barang bukti.

Victor beralasan jika penggeledahan ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan PT TPPI.

“Sebenarnya ini kasus TPPU (tindak pidana pencucian uang) dengan *predicate crime* korupsi. Terkait penjualan kondensat negara, ada barang yang dijual tapi uangnya tidak diberikan kepada negara. Bukannya dihentikan penjualannya malah tetap dilanjutkan SKK Migas,” jelas Victor.

Setidaknya lanjut dia, terdapat empat hal yang hendak dibuka oleh penyidik Bareskrim dalam penggeledahan ini. Victor menuturkan, para penyidik berusaha mencari surat perjanjian antara PT TPPI dan SKK Migas.

“Yang kedua aliran uangnya ke mana. Ketiga, kontrak penjualan. Dan yang keempat, setelah kondensat dijual, uangnya ke mana,” ujar Victor.

#### **Ekpose Bareskrim Ke PPAATK**

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Brigadir Jenderal Victor Simanjuntak mengatakan pihaknya telah menyerahkan hasil ekpose kasus dugaan korupsi dan pencucian uang penjualan kondensat bagian

Petugas penyidik dari Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di kantor SKK Migas di Wisma Mulia, Jakarta, Selasa (5/5).

negara yang melibatkan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama dan SKK Migas kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan (PPATK). Rabu, (13/5).

Victor menambahkan, hasil ekspose yang diberikan nantinya akan menjadi acuan bagi PPATK untuk menelusuri aliran dana di balik kasus ini. Dan hasil pemeriksaan tersebut dapat dipakai penyidik untuk mempertajam pertanyaan ke para saksi serta menentukan arah pengembangan kasus ini.

“Kasus ini harus dikembangkan sampai sekecil-kecilnya. Baru bisa berkembang setelah kami tahu aliran dana di mana diketahui dari PPATK,” jelas dia.

Sejauh ini tambah Victor, pihaknya hanya mempunyai keterangan empat rekening TPPI di Bank Standard Chartered. Data yang didapat kata Victor masih bersifat mentah dan berisi kode-kode perbankan. “Penjabaran data mentah itu, hanya PPATK yang piawai,” kilah Victor.

Bareskrim sendiri kata Victor tengah menelusuri aliran dana dan penyebab utama kenapa PT TPPI sampai bisa menerima kontrak penjualan kondensat dari SKK Migas pada tahun 2009. Padahal, pada saat itu, PT TPPI tengah mengalami masalah keuangan. Hal ini berakibat adanya kegagalan PT TPPI membayar tunggakan-tunggakan hasil penjualan kondensat kepada SKK Migas yang dihitung-dihitung merugikan negara ratusan juta dolar Amerika atau setara triliunan rupiah.

Sementara itu, menurut Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso, pihaknya telah menemukan dugaan tindak pidana pencucian uang dalam kasus penjualan kondensat yang melibatkan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). “Arah ke sana memang ada,” jelas Agus di Jakarta, Senin, (11/5).

Agus mengatakan secara umum pencucian uang memiliki tiga tipe. Pertama adalah penggunaan rekening pihak lain dalam aliran dananya. Kedua, mengubah dana dari rupiah menjadi bentuk valuta asing atau sebaliknya. Dan Ketiga, menggunakan hasil dana kejahatan tersebut untuk membeli aset sebagai bentuk penyamaran.

Tetapi Agus sendiri enggan menjelaskan secara detail motivasi mana yang digunakan dalam kasus ini. “Itu tanya penyidik saja,” tegas Agus.

Sedangkan indikator lain tambah Agus, adanya pencucian uang adalah dikirimkannya laporan hasil analisis PPATK kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lebih lanjut Agus menjelaskan, pencucian uang memang erat kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Dalam kasus ini, Agus mengaku jika pihaknya hanya diminta untuk memberikan dukungan kepada KPK berupa laporan hasil analisis. Karena saat ini kasus dilanjutkan oleh Badan Reserse Kriminal Kepolisian. Dirinya berharap KPK dapat bekerja sama menuntaskan kasus ini.

#### **Penegak Hukum Harus Tegus Hadapi Kasus Ini**

Pengamat energi dari Universitas Indonesia (UI), Iwa Garniwa, berpendapat penegak hukum dalam hal ini Mabes Polri, harus masuk lebih dalam untuk menelusuri pihak-pihak lain dalam kasus tersebut.

“Ini kan nilainya sangat besar dan tidak mudah menyembunyikannya, namun kenyataannya baru ketahuan sekarang. Sehingga hampir tidak mungkin hanya beberapa orang dari SKK Migas (yang menjadi tersangka),” kata Iwa ketika berbincang dengan Aktual, Selasa (12/5).

Dia pun meyakini, tidak hanya pejabat dari BP Migas dan pihak TPPI yang bermain dalam korupsi yang mencapai Rp 2 triliun itu. “Saya yakin disitu banyak oknum baik dari SKK



Migas maupun pemerintahan atau lembaga terkait terlibat,” kata dia lagi.

Berdasarkan data yang diperoleh dan telah diolah, TPPI dirintis pada tahun 1995, tetapi saat krisis moneter menerjang tahun 1997, Tirtamas (sebagai pemilik proyek Tuban) terbelit utang dan masuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), sehingga proyek TPPI terhenti. Di tahun 2002, Tirtamas dan BPPN sepakat merestrukturisasi utang dengan membentuk induk usaha PT Tuban Petro yang di antaranya mengelola TPPI.

Kesepakatan yang diambil adalah 70 persen saham Tuban Petro dimiliki BPPN yang selanjutnya menjadi PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) dan 30 persen dikuasai PT Silakencana Tirtalestari milik Honggo Wendratmo.

Tuban Petro akhirnya memiliki 59,5 persen saham TPPI. Selanjutnya, Honggo menerbitkan obligasi (multiyear bond/MYB) senilai Rp 3,2 triliun kepada BPPN. Pada saat dilakukan restrukturisasi TPPI tahun 2002, pejabat yang terkait adalah Prof Dorodjatun Kuntjoro Jakti, kala itu sebagai Menko Perekonomian, Ketua KKSK, dan Menteri Keuangan Boediono, Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi, dan jajaran Komisaris Pertamina.

Pada 2006, kilang selesai





dibangun dan beroperasi. Berdasarkan data, kapasitas terpasang kilang TPPI saat ini bisa memproduksi antara lain, 700 ribu ton per tahun untuk *ethylene*, 500 ribu ton per tahun *paraxylene*, 100 ribu ton per tahun *toluene*, 120 ribu ton per tahun *orthoxylene*, dan 300 ribu ton per tahun *benzene*.

Di samping itu, kilang TPPI juga memproduksi dan Pertamina mempertanyakan kemenangan Tender TPPI 335 ribu ton per tahun reformate, 1 juta ton per tahun *lightnaphtha*, 189 ribu ton per tahun solar, dan 1,1 juta ton per tahun minyak tanah. Total produksi petrokimianya mencapai 1,7 juta ton per tahun.

**Foto kiri:** Agus Santoso

**Foto kanan:** Petugas penyidik dari Bareskrim Polri melakukan pengeledahan di kantor SKK Migas di Wisma Mulia, Jakarta, Selasa (5/5).

Sedangkan untuk produksi BBM, kilang TPPI mampu memproduksi sebanyak 2,6 juta ton. Pertamina kembali memasok kondensat dengan maksimum empat kargo. Namun Honggo tidak memenuhi kewajibannya ke Pertamina, yakni dengan tidak membayar empat kargo kondensat yang sampai akhir 2009 senilai USD 200 juta. Selain itu juga tidak menyerahkan BBM yang sampai akhir 2009 tercatat USD 190 juta.

Karena TPPI tidak membayar kondensat ini, maka Pertamina menghentikan pasokan kondensat tersebut. Kemudian Menkeu mengeluarkan surat kepada Kepala BP Migas untuk memasok kondensat dari Senipah dari jatah pemerintah.

TPPI sendiri memiliki utang kepada Pertamina sebesar USD 548 juta (utang terdiri dari pembelian produk *low sulfur wax residu* (LSWR) senilai USD

257,5 juta dan pembelian minyak mentah jenis Senipah Condensate senilai USD 182,8 juta. TPPI juga belum membayar utang ke Pertamina selama tiga tahun, padahal Pertamina telah tiga kali mengirimkan nota default ke TPPI, BP Migas USD 180 juta, dan PT Perusahaan Pengelolaan Aset Rp 3,27 triliun.

Sejak 10 Maret 2010 silam Pertamina sudah memasukkan sengketa utang TPPI ke proses arbitrase. Langkah arbitrase dilakukan karena TPPI dinilai sudah tidak punya itikad baik menyelesaikan utang. Saat itu, status utang TPPI kepada Pertamina tercatat USD 440 juta belum termasuk bunga dan denda. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) telah mengabulkan gugatan Pertamina. TPPI diwajibkan membayar *Delayed Payment Note* (DPN) ditambah bunga terhitung sampai dengan putusan dibacakan. Besarnya USD 114.177.624,00 selambat-lambatnya, 1 September 2011. Selain itu, biaya administrasi arbitrase diputuskan ditanggung 50 persen-50 persen oleh Pertamina dan Termohon.

TPPI juga tengah digugat pailit oleh dua perusahaan Belanda, yaitu Argo Capital BV dan Argo Global Holding karena mempunyai utang jatuh tempo USD 150 juta. Dengan kondisi TPPI seperti yang diuraikan di atas, TPPI masih berani mengikuti tender untuk memasok BBM (solar) ke PLN, dan berdasarkan penetapan PLN, TPPI termasuk salah satu pemenang tender pengadaan solar sebesar 1,25 juta kiloliter per tahun yang diadakan.

Saat ini kepemilikan saham TPPI dimiliki oleh Pertamina sebesar 26,37 persen, Tuban Petrochemical sekitar 16,52 persen dan Polyrama Grup 9,16 persen, yang ketiganya merupakan perwakilan pemerintah. Sementara sisanya dimiliki perusahaan Inggris yakni Argo Grup sebesar 21,78 persen, Vitol Grup 8,72 persen dan perusaha-perusahaan lain hingga menjadi 100 persen. ■ Moh Sahlan





# Setumpuk **'Dosa'** B

Raden Priyono (kiri) saat menjabat kepala BP Migas bersama Istri Sari R. Priyono (kanan) disaksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik (tengah), memotong tumpeng pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) BP Migas ke 10 di Jakarta.



# BP Migas

**T**erungkapnya kasus dugaan korupsi antara PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dengan BP Migas era Raden Priyono menambah panjang rentetan dugaan korupsi di lembaga ini. Sebelumnya KPK juga sempat memenjarakan pengganti Raden yakni Rudi Rubiandini dalam kasus suap.

Namun sebelum kasus ini terungkap sudah banyak kejanggalan kebijakan di era Raden yang janggal. Misalnya tentang uang sewa gedung Wisma Mulia sebagai kantor BP Migas. Yang sempat disorot banyak media adalah sewa gedung kantor senilai Rp 307,3 miliar di gedung itu selama lima tahun. Ini belum termasuk dengan pekerjaan *fit out* senilai Rp 76 miliar.

Pada September 2013 lalu Aktual sempat mengunjungi kantor itu di Jakarta Selatan tersebut. Sebuah logo berwarna merah dan hijau serta tulisan SKK Migas yang terbuat dari alumunium berwarna keperakan terpampang di dinding berlapis motif kayu berwarna kecoklatan di salah satu lantai kantor SKK Migas.

Di depan logo dan tulisan itu terdapat meja resepsionis/penerima tamu yang dijaga oleh beberapa wanita cantik. Setiap orang yang akan bertamu ke kantor itu sebelumnya wajib menukar tanda pengenal gedung yang sebelumnya telah ditukarkan dengan kartu identitas seperti KTP/SIM di lantai 1.

SKK Migas—dulu bernama BP Migas—resmi berkantor di Gedung Wisma Mulia sejak awal 2011. Gedung Wisma Mulia jaraknya tidak jauh dengan kantor SKK Migas yang lama di Gedung Patra Jasa di Jl Gatot Subroto, Jakarta. Kedua gedung itu hanya dipisahkan jalan tol.

Saat berpindahan gedung, kepala BP Migas masih dijabat oleh Raden Priyono. Alasan perpindahan kantor itu, menurut Priyono saat itu, karena BP Migas merasa malu. Sebab, kantor BP Migas di Patra Jasa tidak representatif dan ada panti pijatnya.



“Dulu banyak rapat-rapat BP Migas dengan perusahaan minyak dilakukan di hotel-hotel karena kantor BP Migas yang lama tidak memiliki jumlah ruang rapat yang cukup dan representatif untuk dunia migas internasional. Apakah yang menuding tahu di gedung kantor yang lama ada panti pijat yang ...?” jelas Priyono tanpa meneruskan kalimatnya, kala itu.

Priyono menjelaskan, Gedung Patra Jasa yang digunakan BP Migas dahulu merupakan apartemen yang disulap menjadi kantor. Karena itu, BP Migas merasa gamang menerima investor-investor asing karena tak adanya ruang rapat yang memadai.

Beberapa saat kemudian, muncul masalah soal kantor itu. Penyebabnya, konon karena adanya *mark up* biaya sewa gedung. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, banyak ruang gelap yang memungkinkan terjadinya korupsi di tubuh SKK Migas. Salah satu contohnya, perihal besarnya anggaran sewa gedung lembaga negara itu, saat dipimpin Priyono. “Ini kalau dilihat, terlalu banyak ruang gelap. Belanja-belanja SKK Migas memang patut diduga boros dan tidak efisien,” ujar Peneliti ICW Firdaus Ilyas, Selasa (3/9/2013).

Berdasarkan data yang diperoleh Aktual, jika dibandingkan dengan rencana pembangunan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang hanya menganggarkan dana senilai Rp 168 miliar, sewa gedung SKK Migas selama lima tahun justru menelan dua kali lipat anggaran, yakni senilai Rp 307,3 miliar.

Firdaus menilai, pembengkakan anggaran sewa gedung itu, lantaran Priyono cs beranggapan, mereka tidak menggunakan anggaran dari keuangan negara. “Prinsip keuangan negara belum dilakukan seluruhnya oleh SKK Migas,” katanya.

Sayangnya, hal itu ditambah dengan sikap KPK, yang seakan menutup mata atas sejumlah indikasi korupsi yang terjadi jauh sebelum kasus Kepala SKK Migas Rudi

Rubiandini terungkap. Menurut Firdaus, KPK seperti kehilangan arah dalam mengusut sejumlah kasus korupsi pada era itu. “KPK seperti kesulitan untuk masuk lewat mana,” kata Firdaus. Disinyalir, sulitnya KPK masuk ke BP Migas kala itu karena adanya eks pegawai KPK yang bekerja di BP Migas.

Padahal menurut Firdaus, untuk mengungkap kasus ini, KPK harus mengabaikan prinsip anggaran SKK Migas tidak berasal dari keuangan negara. “KPK itu harusnya yakin saja, bahwa itu keuangan negara. Pengelolanya pun negara. Aparaturnya juga aparaturnya,” ujarnya.

Sebelumnya, Uchok Sky Khadafi yang masih sebagai Koordinator Investigasi dan Advokasi Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), juga meminta KPK untuk turun mengungkap kasus ini.

Uchok mengungkap, berdasarkan data audit khusus Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada SKK Migas yang diperoleh FITRA, ditemukan adanya dugaan penunjukan langsung pekerjaan *fit out* Gedung Wisma Mulia senilai Rp 76 miliar oleh PT Sanggarcipta Kreasitama (SK) yang tidak sesuai ketentuan.

Hal yang sama juga, Bonyamin Saiman, koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), mengatakan saat itu, uang sewa gedung kantor SKK Migas di Gedung Wisma Mulia sebesar Rp 307,3 miliar sangat fantastis.

“Jika dibanding dengan biaya pembangunan Gedung KPK yang cuma Rp100 miliar, tentu sangat fantastis. Jadi pasti ada korupsinya,” katanya. “KPK mesti selidiki kasus itu. Kalau KPK tidak menyelidiki, pasti ada apa-apanya,” ujarnya pada September 2013 lalu.

BP Migas mengakhiri sewa di Gedung Patra Jas pada akhir 2010. Dalam proses penentuan gedung baru yang akan disewa untuk ditempati pada 2011, BP Migas memilih jasa konsultan untuk menganalisa dan mengevaluasi kebutuhan gedung



yang sesuai dengan kepentingan lembaganya (*fit out*). Konsultan yang dipilih adalah PT Procon International. Procon ditugaskan menganalisa dan evaluasi kebutuhan gedung untuk BP Migas sesuai Surat Perjanjian Nomor PJJN-III/BPD1000/2010/S7 tertanggal 14 September 2010.

Berdasarkan kajian Procon yang dimuat dalam laporan Final Office Accomodation Study Report tertanggal 9 November 2010, Procon merekomendasikan Gedung Wisma Mulia di Jalan Jenderal Gatot Subroto, bersebrangan dengan kantor BP Migas yang lama.

Dalam proses sewa ruangan Gedung Wisma Mulia, PT SK sebagai pengelola Gedung Wisma Mulia mengajukan surat penawaran pada 26 November 2010 tentang pengadaan sewa ruangan untuk ruang kerja.

Penawaran PT SK meliputi lantai 22 hingga lantai 40 dengan luas 29.016,50 meter persegi. Sewa ruangan dan jasa pelayanan dan fasilitas parkir dengan masa sewa selama lima tahun senilai Rp 347,2 miliar. Perusahaan itu juga menawarkan untuk mengerjakan *fit out* senilai Rp 76 miliar.

Berdasarkan penawaran PT SK tersebut, BP Migas melakukan negosiasi



harga atas pekerjaan sewa ruang kantor. Semua tercatat dalam Berita Acara Negosiasi Harga tertanggal 1 Desember 2010. “Kemudian disepakati harga sebagaimana renegotiasi menjadi sebesar Rp 307,3 miliar atau turun Rp 38,5 miliar dari penawaran awal. Sementara untuk pekerjaan *fit out* tetap senilai Rp 76 miliar,” jelas sumber.

Anehnya, hasil pemeriksaan BPK menemukan bahwa dalam pengadaan pekerjaan *fit out*, BP Migas tidak melakukan negosiasi harga. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Pedoman Tata Kerja BP Migas Nomor 021/PTK/VII/2007 (Revisi-01) tentang Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan BP Migas Bab V Huruf E yang menyatakan bahwa tata cara penunjukan langsung harus memenuhi sejumlah tahapan, seperti klarifikasi teknis dan negosiasi harga. Hal itu mengakibatkan proses pengadaan *fit out* belum menjamin diperolehnya harga yang lebih kompetitif.

Dari data BPK, kondisi itu disebabkan perencanaan relolasi kantor BP Migas kurang menyeluruh dan terintegrasi di antara fungsi-fungsi pada BP Migas. Selain itu, juga disebabkan Panitia Pengadaan tidak menghitung dan menetapkan jenis pekerjaan dan harga satuannya yang dituangkan dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Audit BPK juga menemukan 13 kejanggalan dalam kontrak dan pelaksanaan penunjukan Gedung Wisma Mulia sebagai kantor BP Migas.

Pertama, BP Migas tidak mampu menunjukkan surat asli kontrak sewa menyewa Gedung Wisma Mulia. Kedua, kontrak yang dibuat antara BP Migas dengan Wisma Mulia tidak jelas/tidak mencantumkan nomor, tanggal, hari dibuat/ditandatangani kontrak. Ketiga, terdapat ketidaksinkronan antara judul kontrak dengan isi kontrak, yaitu pada judul kontrak ditulis ‘Sewa Menyewa’ namun



pada isi kontrak memuat ‘Sewa Gedung’ dan ‘Pengadaan *Fit Out*’.

Keempat, dalam kontrak tersebut *fit out* tidak dilengkapi dengan *spec-tec* dan volume serta rincian harga. Kelima, *fit out* yang dimasukkan dalam kontrak sewa menyewa tidak disebutkan jangka waktu pengerjaan dan aset *fit out* itu milik siapa. Keenam, pembayaran *fit out* tidak didasarkan atas *progress report* melainkan berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

Ketujuh, berita acara penyelesaian pekerjaan belum didukung dengan *progress report* pelaksanaan pekerjaan. Kedelapan, belum diatur tata cara pembayaran, seperti pengajuan *invoice* beserta kelengkapannya. Kesembilan, dalam surat Menteri Keuangan No S-578/MK/02/2010 tertanggal 23 November 2010 tentang Persetujuan Anggaran Belanja Tambahan BP Migas Tahun Anggaran 2010, hanya menyetujui biaya *fit out* namun pada realisasi anggaran juga digunakan untuk sewa menyewa gedung dengan Wisma Mulia. Sedangkan anggaran

sewa menyewa gedung kantor akan diperhitungkan dan dibahas tersendiri dalam pembahasan usulan anggaran BP Migas Tahun Anggaran 2011.

Sepuluh, jumlah tagihan tahap 1 sebesar 50% atau senilai Rp 38.021.915.529, jumlah ini lebih besar dari anggaran *fit out* yang disediakan sebesar Rp 36.981.627.650. Sebelas, biaya yang ditagihkan adalah *fit out*. Dua belas, berita acara penyelesaian pekerjaan tertanggal 23 Desember 2010, namun dalam berita acara ini tidak dilengkapi dengan *progress report* pelaksanaan harian. Tiga belas, berdasarkan hasil klarifikasi dengan Wisma Mulia (Ibu Nani) atas pembayaran tersebut tidak mau dikenakan PPh jasa konstruksi dengan alasan ini *re-imbusement* kepada BP Migas.

Sumber mengungkapkan, Raden Priyono sebagai kepala BP Migas kala itu menunjuk Deputi Pengendalian Keuangan BP Migas Wibowo Suseno Wirjawan sebagai ketua tim perpindahan gedung, namun ditolak karena biaya sangat tidak masuk akal. Dedy K

Foto kiri: Firdaus Ilyas

Foto kanan: Rudi Rubiandini

# Bau Tak Sedap di Kapal Joko Tole

**A**roma 'bau tak sedap' menghembus di tubuh SKK Migas. Belum selesai soal dugaan soal *mark up* puluhan miliar sewa gedung dan furnitur di Wisma Mulia, muncul temuan baru. Masih di era BP Migas yang dikepalai oleh Raden Priyono.

'Aroma tak sedap' itu diduga terkait proyek penyewaan kapal *Floating Production Unit* (FPU) BW Joko Tole yang dilakukan Kangean Energy Indonesia Ltd, anak usaha PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG), unit usaha Grup Bakrie. Peran BP Migas di sini adalah sebagai institusi negara yang 'menyetujui' adanya sewa kapal tersebut.

Perseroan menyewa kapal senilai USD 870 juta selama 14 tahun dari BW Offshore, perusahaan yang berbasis di Norwegia. Biaya sewa tersebut sudah termasuk biaya operasinya (*operating cost*).

Peresmian kapal dilakukan di Galangan Kapal Sembawang, Singapura, 17 Maret 2012. Informasi yang diperoleh Aktual, pembuatan kapal itu menghabiskan dana sebesar USD 100 juta.

Kapal Joko Tole akan mendukung proyek Terang Sirasun Batur, dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKS) Kangean Energy Indonesia Ltd. Lapangan Terang Sirasun Batur terletak di perairan timur Madura. Dari Kapal Joko Tole, gas dialirkan ke konsumen melalui East Java Gas Pipe Line.

Saat peresmian kapal, hadir Priyono, Presiden dan General Manager Kangean Energy Indonesia Ltd Junichi Matsumoto, Managing Director Sembawang PK Ong, juga CEO BW Offshore Carl Arnet.

Kala itu, Priyono menyebut, kapal FPU Joko Tole berkapasitas kompresi

gas sebesar 340 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd), dan fasilitas penampung minyak sebesar 200 ribu barel. Pekerjaan pembangunan peralatan produksi yang berada di kapal tersebut dikerjakan di Batam, sementara penempatannya di atas kapal baru dilakukan di Sembawang.

Sumber Aktual mengatakan, berdasar hasil studi yang ada, sewa kapal tidak mesti dilakukan karena bisa membangun pipa yang investasinya lebih murah, hanya sekitar Rp150 miliar.

Harga sewa juga diduga mengalami peningkatan beberapa kali. Semula, masa umur sewa lima tahun dinaikkan menjadi 14 tahun, harga kapal disewa senilai USD 400 juta, lalu meningkat menjadi USD 870 juta, dan terakhir menjadi USD 1,2 miliar.

"Ada *mark up* lebih dari USD 700 juta! Semua komponen itu masuk ke dalam *cost recovery*. Coba bandingkan dengan kasus Bank Century Century yang hanya Rp 6,7 triliun, ujungnya semua beban ditanggung negara," tegas sumber.

\*\*\*

Pada September 2013 lalu, kepada Aktual Raden Priyono, mantan kepala BP Migas, menyatakan proyek sewa kapal Joko Tole dilakukan akibat kebutuhan yang mendesak. Dia mengatakan, jika tidak segera teralisasi ketika itu, maka akan menghambat produksi migas dalam negeri.

"Itu kita ambil karena konsekuensi produksi minyak akan mundur delapan bulan. Jadi, jika hasil minyak terlambat maka konsekuensinya akan lebih besar yang ditanggung," ujar dia kepada Aktual, Jakarta, Kamis (26/9/2013)



Terkait besarnya nilai sewa kapal tersebut, Priyono mengaku tidak tahu menahu berapa angka pastinya. Karena saat itu yang penting produksi minyak harus diselamatkan. Dia menambahkan, sewa kapal Joko Tole tidak bisa dilakukan dalam jangka pendek. Alasannya, tidak ada perusahaan yang bersedia menyewakan kapalnya di bawah 14 tahun. "Harus 14 tahun. Karena jika hanya lima tahun maka tidak ada perusahaan yang mau ikut tender," jelas dia.

Selain itu, imbuh Priyono, ketika itu dirinya tidak mempunyai pilihan lain selain menyewa kapal Joko Tole. "Kalau harus buat kapal





Tampi perihal rekomendasi atas pembebanan biaya transpor minyak mentah menggunakan *barging* di Blok Merangin II PT SRMD mampir ke meja redaksi Aktual.

Dokumen itu diteken oleh Budi Agustyono sebagai kepala Divisi Pemeriksaan Biaya Operasi SKK Migas, tertanggal 31 Juli 2013 dan ditujukan kepada kepala Divisi Penunjang Operasi SKK Migas. Dokumen surat itu ditembusi ke Deputi Pengendalian Keuangan SKK Migas (sebagai laporan) dan Deputi Pengendalian Operasi SKK Migas (sebagai informasi).

Dalam dokumen itu disebutkan, SRMD menyewa tujuh kapal dari PT Salam Bahagia untuk mengangkut minyak mentah Lapangan Tampi dengan nilai kontrak USD 3,516 juta atau setara Rp 35,16 miliar (kurs Rp 10 ribu). Durasi kontrak mulai 1 Oktober 2011 hingga 30 September 2012 saat itu masih BP Migas.

Ketujuh kapal yang disewa itu adalah; satu kapal *oil barge storage* (Petro Badak) berdaya 40 ribu bbls jenis *single bottom*, dua kapal *oil barge* pengangkut, yakni SMS 1805 dan SMS 1806, masing berdaya 12 ribu bbls jenis *single bottom*, serta empat *tug boat* penarik, yaitu Mariana VII, Mariana IX, Sumber XXII, dan Sumber XXIV.

Ketujuh kapal itu dikontrak untuk melaksanakan 96 trip. Praktiknya, selama periode kontrak hanya terlaksana tiga trip (3%). Hal itu disebabkan kondisi pasang surut Sungai Musi Rawas dan Musi Banyuasin yang ekstrem.

“Saat permukaan air yang rendah, kapal kandas. Sedangkan saat permukaan air tinggi, kapal tidak bisa melewati Jembatan Sekayu. Hal ini menyebabkan operasional kapal sangat terbatas dalam mengangkut minyak mentah,” tulis Budi dalam dokumen tersebut.

Dia menambahkan, kondisi tersebut mengakibatkan kondisi kapal menjadi *idle*, sementara biaya sewa kapal sebesar USD 2,097 juta (Rp 20,1 miliar) selama periode

makan waktu tiga tahun,” kata dia. Priyono juga mengaku tidak mau terlalu memusingkan dugaan proses tender sewa kapal Joko Tole. Yang dipikirkannya ketika akan menyewa kapal Joko Tole adalah untuk menyelamatkan produksi minyak agar tidak turun. Ia pun menegaskan mekanisme pelaksanaan tendernya terbuka.

“Produksi minyak tidak boleh mundur. Masalahnya kan produksi kapal kita terbatas kemampuan kita, jadi kita harus bertender ke asing. Kita tidak tahu di sana ada kartel atau tidak. Tapi prosesnya kan tender, proses terbuka telah dilaksanakan,” jelas dia.

Dia juga menyebutkan saat itu kondisi sangat mendesak, dan harus segera mengambil keputusan, dan mana yang menguntungkan keputusan itu yang diambil. “Ya pada waktu itu banyak pertimbangan kriteria dan banyak masalah yang harus diputuskan. Dalam keadaan tidak enak mana yang paling menguntungkan,” tegas dia.

Masih terkait dengan sewa kapal, Aktual juga mencatat ada dugaan kejanggalan lain di era BP Migas. Hal itu terkuak ketika dokumen terkait sewa kapal yang dilakukan PT Sele Raya Merangin Dua (SRMD) dari PT Salam Bahagia untuk mengangkut minyak mentah dari Lapangan



kontrak telah dibayar penuh oleh SRMD.

Di samping membayar sewa kapal, SRMD juga membayar sewa penampungan minyak mentah di *floating storage and offloading* (FSO) Pelita Bangsa sebesar USD 2,34 juta (Rp 23,42 miliar) selama periode 1 Maret 2012 hingga 30 September 2012. Selama periode kontrak kapal, minyak mentah yang terangkut dan tertampung di FSO Pelita Bangsa hanya sebesar 19.122 bbls (1,7%) dari yang direncanakan sebesar 1,152 juta bbls.

“Akibatnya, *cost per barrel* adalah sebesar USD 232,2 yang terdiri atas USD 109,7 per barrel untuk pengangkutan minyak mentah SRMD dan USD 122,5 per barrel untuk sewa penampungan minyak mentah di FSO Pelita Bangsa. *Cost per barrel* SRMD sebesar USD 232,2 ini lebih tinggi dari harga jual rata-rata minyak mentah SRMD selama periode 1 Oktober 2011 sampai dengan 30 September 2012 yang sebesar USD 116 per barrel,” jelas Budi dalam dokumen.

Budi juga menulis, saat kontrak kapal berakhir pada 30 September 2012, kontrak diperpanjang (*bridging*) selama enam bulan hingga 31 Maret 2013. Adapun kondisi pengangkutan minyak mentah melalui *barging* hingga 31 Maret 2013 adalah, terdapat tambahan 10 trip dengan minyak mentah yang terangkut sebesar 102.265 bbls, sejumlah 50.094 bbls minyak mentah SRMD di FSO Pelita Bangsa telah terjual ke Pertamina dan diangkut ke Refinery Unit III Pertamina di Plaju.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, Bidang Pengendalian Keuangan SKK Migas mengeluarkan empat rekomendasi. Pertama, tidak memperpanjang kontrak *barging* yang berlaku (dari Jetty Pauh ke Bangka Marine Terminal) karena *cost per barrel* sangat mahal, bahkan sudah melebihi harga jual rata-rata minyak mentah SRMD selama kontrak.

Kedua, fungsi terkait SKK Migas

untuk segera mengkaji sistem transportasi pengangkutan minyak mentah yang optimum, agar target produksi 3.500 bopd dapat tercapai. Usulan alternatifnya adalah, meminta SRMD untuk segera membuat *barge* sesuai dengan kondisi sungai, seperti disarankan konsultan (PT Carsurin). Tujuannya, agar produksi minyak mentah yang diangkut melalui kapal bisa lebih banyak, sehingga *cost per barrel* menjadi turun. Kemudian, dibuat kontrak baru *barging* berupa penyediaan jasa pengangkutan minyak mentah, di mana *fee* berdasarkan *cost per barrel*.

Ketiga, meminta SRMD segera membangun fasilitas pipa dari Blok Station Tampi ke *unloading* Jene (153 km). SRMD bisa melakukan *sharing cost* dengan KKKS lain, seperti Odira dan Tropic Energi, di sekitar lokasi untuk penghematan biaya pembangunan pipa.

Keempat, meminta SRMD melakukan renegotiasi dengan Medco E&P Indonesia atas sewa penampungan minyak mentah di FSO Pelita Bangsa, agar disesuaikan dengan kemampuan SRMD mengangkut minyak mentah melalui sungai.

\*\*\*

Balasan dokumen surat juga diperoleh Aktual. Pj Kepala Divisi Penunjang Operasi SKK Migas Baris Sitorus menulis surat balasan ke Budi Agastyono pada 27 Agustus 2013. Isinya perihal yang sama seperti yang ditulis Budi sebelumnya.

Ada empat poin penting yang ditulis Baris dalam dokumen surat balasan itu. Pertama, bahwa *oil storage barge* Petro Badak sebagai salah satu bagian biaya *barging transportation* sebesar USD 2,097 juta juga berkontribusi atas penambahan perhitungan minyak yang diangkut dari Lapangan Tampi kurang lebih 38.533 barrel.

Kedua, selama periode kontrak 1 Oktober 2011 hingga 30 September secara efektif *barging transportation*



dapat dimanfaatkan mulai Februari 2012 saat Petro Badak beroperasi di Terminal Pauh. Sementara dua unit *tug* dan *barge* mulai bergerak menyalurkan minyak mentah dari Petro Badak menuju FSO Pelita Bangsa pada Mei 2013 terkendala permasalahan tanah dan perizinan pembangunan infrastruktur Terminal Pauh, serta ketinggian sungai di sepanjang Sungai Musi Rawas sampai Musi Banyuasin.

Ketiga, jumlah minyak mentah yang berhasil diangkut dan ditampung dari Lapangan Tampi melalui *barging transportation* adalah 38.533 bbls di Petro Badak dan 19.122 bbls di FSO Pelita Bangsa, dengan total 57.655 bbls atau di





bawah volume yang ditargetkan.

Keempat, akibatnya *cost per barrel barging transportation* termasuk di dalamnya Petro Badak, dua *tug* dan *barge*, serta *facility sharing* FSO Pelita Bangsa hingga 30 September 2012 mencapai USD 77,01 per barel.

“Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Tim Pemeriksaan Khusus terutama yang terkait dengan fungsi perkapalan, telah dilakukan sejumlah langkah,” tulis Baris dalam dokumen surat itu. Ada lima langkah yang telah dilakukan. Pertama, mempertimbangkan pada saat kontrak *barging* berakhir dalam kondisi kandas dengan membawa muatan, menjaga kontinuitas produksi Lapangan Tampi

karena *trucking* juga mengalami permasalahan kerusakan dan pemblokiran jalan, serta prospek jumlah pengapalan pada musim hujan, maka *barging transportation* dilanjutkan dengan menambahkan kontrak *klausal standby rate* mulai 10 Desember 2012.

Kedua, efektif sejak 1 Maret 2013 kontrak sewa kapal yang sebelumnya berdasarkan *daily based charter* diubah menjadi *volume based charter* dengan *rate* USD 17,50 per barel. Ketiga, spesifikasi teknis *barging transportation* sebagai hasil evaluasi pengoperasian *barging* yang disesuaikan dengan karakteristik alur pelayaran telah disampaikan oleh SRMD pada 25 Oktober 2012,

yaitu *tailor-made tug & barge* yang tidak bisa secara langsung tersedia di pasaran.

Keempat, fasilitas penyaluran minyak melalui pipa menggantikan *barging transportation* ditargetkan beroperasi pada 2015 sedang dikoordinasikan SRMD dengan fungsi terkait di SKK Migas. Kelima, perubahan mekanisme sewa kapal penampungan minyak mentah di FSO Pelita Bangsa telah difinalisasi fungsi Operasi Pengangkutan dan Penyimpanan pada 21 Mei 2013, dengan estimasi pengurangan atas biaya *Facility Sharing Agreement* (FSA) SRMD kurang lebih USD 991.254 per tahun, berlaku efektif mulai 1 Juli 2013. ■ Siemtro





Dus berisi dokumen TPPI di Bareskrim Polri.

# Jangan Lokalisir Kondensat

**P**T Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dan BP Migas sudah melakukan transaksi produk Migas bagian negara dengan melanggar hukum sejak tanggal 23 Mei 2009. Negara diduga dirugikan dalam praktik korupsi tersebut. Kerugian tidak hanya terbatas pada utang penjualan kondensat bagian negara

dari BP Migas ke TPPI.

Dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU dilakukan oleh BP Migas dengan tidak melaksanakan prosedur sesuai keputusan Kepala BP Migas nomor KPTS-20/PB00000/2003-So. Keputusan ini mengenai Pedoman Tata Cara Kerja Penunjukan.

Dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang didapatkan Aktual, disebutkan bahwa BP

Migas menunjuk langsung PT TPPI sebagai perusahaan penjual langsung kondensat bagian negara. Padahal, PT TPPI diketahui memiliki utang sebesar Rp 6,4 triliun kepada Pertamina.

Penunjukan langsung membuat utang PT TPPI berpotensi tidak tertagih. Analisa BPK, pada Desember 2012, PT TPPI dan sebagian debiturnya menyepakati untuk mengusulkan rencana perdamaian (*composition plan*). Dalam perdamaian itu ada komitmen untuk menyelesaikan utang kepada Pertamina dalam jangka waktu 15 sampai 18 tahun.

Sejak awal 2012, TPPI diketahui telah *default* atau gagal bayar terhadap utangnya kepada Pertamina yang pada medio tersebut Dirutnya dijabat Karen Agustiawan menggantikan Ari Soemarno. Perusahaan BUMN tersebut bahkan sampai mengeluarkan beberapa kali surat pemberitahuan *default* utang TPPI.

Dari dokumen yang sama, diketahui pula bahwa nilai piutang kepada PT TPPI timbul karena kegagalan pelunasan atas pasokan bahan baku kondensat bagian negara dari Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP MIGAS). Institusi yang kini berganti menjadi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Nilai piutang kepada PT TPPI berasal dari tagihan pokok yang belum diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2012. Yakni dari pengiriman kondensat periode September 2010 sampai dengan November 2010 dengan nilai USD 139,233,365,98 ekuivalen Rp 1.346.386.649.026,60 (kurs tengah BI tanggal 28 Desember 2012 Rp 9.670,00/USD).

Selain itu, terdapat tagihan penalti yang belum diselesaikan atas tagihan pengiriman periode Agustus 2012 sampai dengan November 2012, senilai USD 1,086,563.11 ekuivalen Rp 10.507.065.273,70 (kurs tengah BI tanggal 28 Desember 2012 Rp 9.670,00/USD).

SKK Migas saat itu 2009 dipimpin



Raden Priyono. Di bawah Raden Priyono itulah penunjukan PT TPPI dilakukan. Yakni untuk melakukan penjualan langsung kondensat bagian negara dan PT Pertamina saat itu Dirutnya masih dijabat Ari Soemarno (2006-2009).

Audit BPK menyatakan bahwa penunjukan langsung saat itu ditandatangani oleh Deputy Financials Ekonomi dan Pemasaran BP Migas saat itu, Djoko Harsono (DH). Orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri bersama Raden Priyono dan Honggo Wendratno.

Pengamat kebijakan energi, Yusri Usman, mencurigai pemberian persetujuan mengenai mekanisme pembayaran tidak langsung kepada TPPI turut memuluskan langkah tersebut. Persetujuan diberikan Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui Surat Nomor S-85/MK.02/2009 tanggal 12 Februari 2009.

Langkah yang kemudian menjadi kran bagi SKK Migas (TPPI) melakukan kerjasama dengan TPPI. Padahal Menkeu mengetahui secara jelas bahwa perusahaan milik Honggo Wendratno saat itu tengah mengalami kesulitan keuangan sehingga kesulitan mendapatkan pinjaman modal kerja.

“Bisa saja modus lain, TPPI dibidang punya utang, tapi sebenarnya nggak punya. Uangnya dibagikan? TPPI yang punya utang, tapi pemerintah yang mengemis,” ujar Yusri, kepada Aktual, Jumat (15/5) pekan lalu.

Laporan BPK yang menyebutkan bahwa 'Sell Apointment Aggrement' (SAA) Menteri Keuangan (Menkeu) baru ditandatangani pada 23 April 2010, yang berlaku surut dari 23 Mei 2009 hingga 23 Maret 2010.

Dengan kata lain, pengiriman kondensat ke TPPI dilakukan sebelum adanya perjanjian yakni kontrak penunjukan penjual, dengan rincian 21.600.062,66 barel senilai USD 1.546.843.450.

Menurut Yusri, kerjasama itu seharusnya didukung dengan jaminan atau Standby Letter of Credit (SBLC), yang memastikan pembayaran pengiriman bahan baku kondensat ke TPPI dilakukan tepat waktu.

“Raden Priyono sebagai kepala BP Migas melaksanakan 'katabelece' Menteri Keuangan, seharusnya tetap berjalan SOP kuasa jual, yaitu penerima kuasa harus menerbitkan LC atau Bank garansi senilai volume kondensat yang diambil (*lifting*),” sebutnya.

Pengamat Energi Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan

Batubara mengingatkan agar polisi berjalan lurus dalam mengungkap kasus tersebut. Marwan mengatakan demikian berkaca pada kasus dugaan korupsi pembangunan pabrik Vaksin yang mandeg.

“Ke depan pihak Kepolisian bisa *lempeng* (lurus), tanpa harus memendam (pihak-pihak lain) dalam kasus tersebut. Apalagi, kerugian negara sangat besar,” ucapnya kepada Aktual.

Penanganan perkara yang diduga merugikan negara hingga Rp 2 triliun ini jangan sampai terjadi sandiwara. Maksudnya, begitu ditemukan keterlibatan pihak penguasa lama atau merembet ke penguasa sekarang, kasus pun rawan dibarter.

Sebab, dia menilai kasus yang melibatkan SKK Migas dan PT TPPI ini tidak berjalan sendiri dan melibatkan berbagai pihak. Apalagi, kasus sempat urung ditindaklanjuti ketika berada di KPK dan baru ditangani ketika berganti kekuasaan.

Meski begitu, ia mengapresiasi langkah penyidik sekaligus meminta komitmen menuntaskan kasus tersebut.

“Saya berharap komitmen ini ada pula di benak penegak hukum agar mereka benar-benar mau menyelesaikan kasus ini,” demikian Marwan. ■ Moh Sahlan





## Raksasa Petrokimia dalam **Kubangan Utang**

**K**ondisi kesehatan mantan Presiden Soeharto masih cukup bugar saat memunculkan gagasan besar tentang pendirian perusahaan petrokimia dan *refinery* terbesar di Asia Tenggara tahun 1990-an. Gagasan penguasa Orde Baru ini kemudian direalisasikan pada 1995 dengan dibangunnya perusahaan bernama PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI) yang berkedudukan di Tuban, Jawa Timur.

Pendirian TPPI memang didasari ide strategis terkait ketahanan energi nasional. Dalam *core* bisnisnya, TPPI diproyeksikan untuk memproduksi Aromatics (BTX), termasuk bahan bakar minyak (BBM) seperti Kerosene, Diesel Oil, dan berbagai jenis bahan bakar strategis lainnya.

Pendirian TPPI yang melibatkan tiga orang pengusaha kawakan yang diketahui dekat dengan penguasa orde baru. Tiga lakon pendirian TPPI itu adalah Hashim Djojohadikusumo, Njoo Kok Kiong alias Al Njoo, dan Honggo Wendratno. Ketiganya bersepakat membangun perusahaan

patungan dengan komposisi saham: Hashim Djojohadikusumo memiliki 50%, dan 50% sisanya dimiliki oleh Al Njoo dan Honggo.

Ketika proses pembangunannya TPPI hampir rampung, pada 1997 terjadi krisis moneter dahsyat dan diikuti tuntutan reformasi 1998 yang akhirnya meruntuhkan kekuasaan orde baru. Hashim yang menjadi pelaku sejarah pendirian TPPI ini menuturkan, kondisi keuangan perusahaan saat krisis moneter 1997 ikut porak-poranda sehingga dia menyerahkan seluruh sahamnya di TPPI kepada BPPN.

"Saya menyerahkan seluruh saham TPPI kepada BPPN untuk menyelesaikan utang piutang grup Tirtamas (sebagai pemilik) kepada para pihak yang sebagian besar adalah BUMN dan institusi keuangan negara," ujar Hashim di Jakarta, Mei 2015.

Setelah krisis 1997 itu terjadi, semua saham Tirtamas di TPPI memang langsung diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan proyek TPPI

pun terhenti. Baru kemudian pada tahun 2002, Tirtamas dan BPPN sepakat merestrukturisasi utang dengan membentuk induk usaha PT Tuban Petro yang akan mengelola TPPI. Kesepakatan membentuk induk usaha bernama Tuban Petro ini dicapai dengan komposisi saham BPPN (selanjutnya menjadi PPA) sebesar 70% dan saham PT Silakencana Tirtalestari milik Honggo Wendratno sebesar 30%.

Seiring dinamika bisnis yang terus berjalan, terjadi perubahan kepemilikan saham TPPI, yakni saham Tuban Petro menjadi 59,5%, ini terkait dengan aksi korporasi yang dilakukan Honggo dengan menerbitkan obligasi *multiyear bond* senilai Rp3,2 triliun kepada BPPN.

Pada bagian lain, perusahaan Jepang Mitsui Co ikut menanamkan saham dengan memberikan utang USD 400 juta untuk melanjutkan pembangunan kilang TPPI. Aksi ini dilakukan Mitsui Co dengan syarat mendapat jaminan pasokan *low sulfur waxy residu* (LSWR) yang harus diserahkan oleh Indonesia kepada Mitsui. Dalam posisi ini, Pemerintah pun meminta Pertamina memasok LSWR sebanyak 18.000-20.000 barel per hari selama 6 tahun yang dinilai dengan harga pasar.





Dari aksi bisnis inilah, kemudian Pertamina mendapat kompensasi kepemilikan saham TPPI sebesar 15% saham. Dengan demikian, komposisi kepemilikan saham TPPI adalah Tuban Petro 59,5%, Pertamina 15%, dan sisanya 25,5% dimiliki Mitsui, Sojitz, dan Siam Cement.

Pada 2006, kilang selesai dibangun dan beroperasi. Pertamina kembali memasok kondensat dengan maksimum empat kargo. Masalah besar pun menerpa. Honggo tidak memenuhi kewajiban ke Pertamina berupa pembayaran empat kargo

Foto atas: Kilang PT Trans Pasific Petrochemical Indotama, di Tuban, Jawa Timur.

Foto bawah: Hashim Djojohadikusumo.

kondensat yang sampai akhir 2009 senilai USD 200 juta, juga tidak menyerahkan BBM yang hingga 2009 tercatat USD 190 juta. Ini baru utang ke Pertamina. Masih banyak utang lain yang digali TPPI.

Secara teknis, utang TPPI ke Pertamina itu muncul setelah TPPI gagal menjalankan skema restrukturisasi utangnya yang ditempuh melalui *product swap* antara Pertamina sebagai penjamin utang dan TPPI. *Product swap* dijalankan dengan cara pengiriman *low sulfur waxy residue* (LSWR) kepada Mitsui yang pengembaliannya berupa *middle distillate product* (MDP) dari TPPI kepada Pertamina senilai utang berikut bunga yang sempat menembus USD 600 juta. TPPI sebelumnya sempat lancar membayar utang MDP hingga senilai USD 175 juta. Namun, hingga November 2009, TPPI gagal bayar hingga USD 100 juta, belum termasuk bunga.

#### Ada Ranjau Dalam Klausul Restrukturisasi

Dalam perkembangannya, pada 2012 pemerintah melalui Kementerian BUMN berencana melakukan restrukturisasi piutang PT Pertamina di TPPI ini. Caranya dengan mengeluarkan Surat Kementerian BUMN Nomor S-399/MBU.2/2011 tertanggal 20 Desember 2011. Kala itu, pemerintah menyiapkan dana Rp 5,06 triliun atau USD 548 juta.

Namun setelah mendalami klausul yang diajukan pihak TPPI, akhirnya usulan restrukturisasi itu mental. Ditemukan banyak kejanggalan dalam *terms* restrukturisasi TPPI sehingga berpotensi merugikan negara. Masalah yang mengemuka saat itu terkait harga beli mogas RON 88 dari TPPI ke Pertamina yang lebih mahal dari harga pasar (MOPS di Singapura).

Selain itu, banyak juga yang mempersoalkan kecilnya *fee* atas pendistribusian dan penyimpanan





mogas yang didapat Pertamina, yakni hanya Rp163 per liter. Padahal biaya yang dibutuhkan Pertamina untuk kegiatan tersebut mencapai Rp415 per liter, sehingga ada potensi kerugian sebesar Rp252 per liter. Tak cukup sampai di situ, pada tahun 2012 juga ulah TPPI yang dalam sebuah klausul meminta kepada kementerian ESDM merilis ijin ekspor elpiji.

Catatan tentang hal ini juga terungkap dalam sebuah artikel di Kompasiana, bahwa potensi kerugian negara itu dapat dikalkulasi dengan melihat harga beli mogas RON 88 yang lebih mahal Rp500 per liter dari harga pasar, sehingga jumlah kerugian negara mencapai Rp 119,25 miliar per bulan (asumsi total volume mogas yang dibeli sebanyak 238,5 juta liter per bulan). Dalam setahun angka ini menjadi Rp1,43 triliun. Kemudian jika kerugian ini dikumulasikan selama 10 tahun kontrak menjadi sebesar Rp14,31 triliun.

Adapun potensi kerugian kedua yaitu *fee* Pertamina atas penyimpanan dan distribusi mogas milik PT TPPI. Dalam sebulan kerugian yang harus ditanggung negara sebesar Rp 60,1 miliar. Maka dalam setahun menjadi Rp 721 miliar, sehingga secara kumulatif sampai akhir masa kontrak potensi kerugian menjadi Rp 7,2 triliun. Jadi potensi kerugian kumulatif atas dua klausul MRA itu akan merugikan negara hingga Rp 2,15 triliun dalam setahun, atau sekitar Rp 21,52 triliun hingga akhir masa kontrak 10 tahun.

Selain kepada Pertamina, TPPI juga masih memiliki beban utang kepada kreditur lainnya yaitu PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Rp 3,26 triliun, dan utang ke BP Migas sekitar Rp 1,66 triliun. Total utang domestik PT TPPI lebih dari Rp9 triliun. Untuk mampu terus beroperasi dan membayar utang-utangnya, TPPI mencari dana pinjaman kepada Deutch Bank. Pada saat itu, ada janji bahwa dana sebesar USD 1 miliar akan



Kantor TPPI di gedung Mid Plaza, Jakarta.

digelontorkan dengan syarat Master of Restructuritation Agreement (MRA) harus disepakati pihak-pihak yang terlibat, termasuk Pertamina.

Pada 5 November 2012, Pengadilan Niaga melalui putusan nomor 47/PKPU/2012/PN.Niaga. JKT.PST, menyatakan TPPI berada dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Disebutkan bahwa per 27 November 2012, TPPI memiliki utang pokok, bunga, dan denda kepada 362 kreditur sebesar Rp 17,88 triliun yang terdiri atas utang separatis sebesar Rp 9,746 triliun dan utang konkuren Rp 8,135 triliun.

Utang separatis tercatat kepada 12 kreditur dengan porsi terbesar adalah Pertamina sebesar Rp 4,135 triliun, lalu JGC Corporation Rp 2 triliun,

SKK Migas Rp 1,348 triliun, United Overseas Bank Ltd Rp 932 miliar, Polytama International Finance BV Rp 372 miliar, dan sisanya milik tujuh kreditur lainnya.

Adapun utang konkuren tercatat kepada 350 kreditur dengan porsi terbesar Pertamina Rp 2,444 triliun, disusul Argo Capital BV Rp 1,61 triliun, Polytama International BV Rp 773 miliar, dan Argo Fund Ltd Rp 688 miliar. Adapun aset nonkas TPPI per 30 September 2012 senilai USD 899 juta alias tidak dapat menutupi kewajibannya.

#### Dugaan Bisnis Culas Honggo

Dalam sebuah situs disebutkan, berjibunnya utang TPPI ini antara lain disebabkan karena penyalahgunaan dalam pengelolaan



kilang TPPI, terutama dalam pembelian bahan baku dan penjualan hasil produk kilang TPPI ini ke luar negeri. TPPI ditengarai menjual hasil produksinya ke sebuah perusahaan yang dikuasai Honggo yang bernama Java Energy.

Semenjak awal 2012, TPPI telah *default* atau gagal bayar terhadap utangnya kepada Pertamina, sehingga BUMN tersebut mengeluarkan beberapa kali surat pemberitahuan *default* utang TPPI. Kemudian di tahun yang sama pihak pemilik TPPI telah berusaha melakukan kembali restrukturisasi TPPI dengan melibatkan Pertamina.

Ada pun hingga 2015 ini, TPPI yang saat ini dikelola Tuban Petro menunggak utang ke PT Pertamina (Persero) mencapai USD 371 juta

(sekitar Rp 4,4 triliun). Sedangkan saham Pertamina di TPPI mencapai 26,61% setelah restrukturisasi.

Kisah utang piutang antara TPPI dengan Pertamina ini memiliki cerita tersendiri. Dulu, Pertamina menjadi pelanggan setia TPPI dengan membeli produk mulai dari bensin atau mogas hingga elpiji. Utang sebesar USD 371 juta tersebut muncul akibat tidak dikirimnya mogas dan produk olahan lainnya yang merupakan pesanan Pertamina sesuai kesepakatan yang tertuang dalam kontrak.

Pertamina dan TPPI pun mengalami kebuntuan hingga akhirnya keduanya sepakat menyelesaikan masalah ini ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Hasilnya, TPPI diwajibkan melunasi utang ke Pertamina. Nah, untuk membayar utang-utangnya inilah TPPI mengajukan skema pembayaran. Skema itu adalah, selama 10 tahun Pertamina wajib membeli produk mogas TPPI sebesar 900 juta barel atau minimal 50.000 barel/hari, dengan harga MoPS + 1,22%. Selama 10 tahun, Pertamina juga wajib membeli 7,1 juta ton elpiji TPPI dengan harga CP Aramco + USD 140/ton (Skema yang diajukan ini sangat merugikan karena harga pasar elpiji Pertamina saat itu berkisar CP Aramco-USD 40). Dari penjualan produk TPPI ke Pertamina itu, 2% hasilnya per tahun akan digunakan mencicil utang ke Pertamina.

Skema yang diajukan TPPI ini tentu tidak mau disepakati Pertamina. Sebab jika skenario itu diikuti, maka dari pembelian elpiji Pertamina akan rugi Rp 11,82 triliun. Skenario ini tidak sesuai dengan prinsip *good corporate governance*. Selain itu, TPPI juga tidak mau memberikan jaminan utang-utang dalam bentuk *standby L/C*.

Lantaran tak kunjung ada kesepakatan, maka pada 28 September 2012 para kreditur TPPI mengajukan tuntutan gagal bayar alias *default* terhadap TPPI. Dari sini kemudian Pertamina ikut masuk

ke manajemen TPPI per 11 Oktober 2012.

Berselang sebulan, tepatnya pada 26 Desember 2012, TPPI mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga Jakarta. Permohonan ini kemudian menghasilkan proposal perdamaian yang kemudian pada 8 Mei 2013 ditindaklanjuti dengan penandatanganan kerja sama antara TPPI dan Pertamina yang akan berlangsung efektif selama 6 bulan. Pengoperasian kilang TPPI yang menjadi poin kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi TPPI agar mendapatkan penghasilan kembali melalui *tolling fee*.

Berdasarkan klausul kerjasama yang didapatkan Aktual, kerja sama *tolling fee* ini menyantumkan kesepakatan bahwa kilang TPPI akan dioperasikan pada tingkat sekitar 55-80kbd (kilobarrel per day) dan akan menghasilkan sekitar 530.000 ton yang terdiri atas *Paraxylene*, *Benzene*, *Orthoxylene*, dan *Heavy Aromatic*. Selain itu, juga tambahan produk BBM berupa *Gas Oil/Diesel Oil* dan *Fuel Oil* sejumlah 1,5 juta barel, tambahan LPG sebesar 36.000 ton, dan *Light Naptha* sebesar 300.000 ton atau 2,8 juta barel.

Ketika pihak TPPI dan Pertamina bermimpi tentang jalan mulus kesepakatan, terdengar sempritan dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang ditujukan kepada Pertamina. KPK menilai langkah Pertamina mengoperasikan TPPI berpotensi menguntungkan pihak lain yang berujung pada tindakan korupsi. Kerjasama pengoperasian kembali TPPI pun dihentikan.

Bermula dari peringatan KPK inilah, mencul fakta baru bahwa pemilik lama TPPI yaitu Honggo Wendratno menggunakan dana pinjaman dari Bank Century (kini Bank Mutiara) untuk memiliki TPPI. Padahal Bank Century mengalami kredit macet dan saat ini menjadi salah satu kasus yang ditangani KPK. ■ *Scenitro*



# Kilang Minyak dalam Perspektif Ketahanan Nasional

**K**etika membaca berbagai berkas terkait kasus TPPI yang menyeret mantan Ketua BP Migas Raden Priyono yang selama ini sepertinya “kebal hukum,” terungkap sebuah pernyataan menarik bahwa bangkrutnya TPPI karena *letter of intent* IMF (International Monetary Fund) yang tidak memperbolehkan Indonesia memiliki kilang pengolahan skala besar. Isu ini jauh lebih penting untuk jadi fokus bahasan karena mengingatkan kita kembali betapa memang ada *grand design* dari pihak asing agar kita melestarikan impor minyak, yang berarti harus ada gerakan sistematis untuk menggagalkan setiap prakarsa untuk membangun kilang minyak.

Dengan keadaan seperti ini, maka langkanya jumlah kilang minyak kita itulah yang kemudian jadi musabab daulat migas kita dalam bahaya.

Sepanjang rentang sejarah sejak resmi berdiri pada 10 Desember 1957 hingga sekarang, Pertamina tercatat hanya memiliki 6 Kilang Unit Minyak dengan kapasitas produksi 1,05 juta barel per hari (bph). Yaitu Kilang Dumai, Kilang Plaju, Kilang Balikpapan, Kilang Cilacap, Kilang Balongan dan Kilang Sorong. Menyedihkannya lagi, dari total kapasitas kilang tersebut, hanya mampu memproduksi minyak sebanyak 700-800 ribu bph. Sementara konsumsi bahan bakar minyak Indonesia saat ini mencapai 1,4 sampai 1,5 juta bph dan terus meningkat dari tahun ke tahun.

## Membedah Skema Washington Consensus

Ketergantungan migas kita terhadap 16 negara, tidak saja

menguntungkan mafia migas di level pengadaan, namun ada satu hal yang jauh lebih krusial, yaitu begitu besarnya pengaruh paham neoliberalisme ekonomi dalam mempengaruhi arah kebijakan strategis ekonomi di Kementerian Keuangan sejak era pemerintahan Suharto. Sedemikian rupa besarnya pengaruh tim ekonomi didikan Amerika Serikat sejak era Ali Wardhana, Radius Prawiro, Mar’ie Muhammad, Sri Mulyani Indrawati, hingga Chatib Basri, sehingga mereka ini kemudian dikenal dengan sebutan Mafia Berkeley.

Para teknokrat ekonomi inilah, khususnya yang bercokol di Kementerian Keuangan seperti Sri Mulyani dan Chatib Basri, yang menjalankan skema Washington Consensus dalam mewarnai arah kebijakan strategis perekonomian nasional.

Salah satu mekanisme neoliberal yang dilakukan IMF dan Bank Dunia untuk melumpuhkan sistem ekonomi nasional adalah Structural Adjustment Program (SAP). Melalui SAP inilah pemilik modal besar di dunia internasional mampu mengubah ekonomi sesuai dengan keinginan mereka dalam mengembangkan investasi dan keuntungan.

SAP ini dilakukan dengan melalui beberapa langkah;

1. Pembukaan kran impor sebeb-bebasnya dan adanya aliran uang yang bebas.
2. Devaluasi.
3. Kebijakan moneter dan fiskal dalam bentuk: Pembebasan Tarif Kredit, peningkatan suku bunga kredit, penghapusan subsidi, peningkatan pajak, kenaikan



Komplek kilang minyak milik Pertamina (Persero) Refinery Unit (RU) III Plaju – Sungai Gerong, Palembang, Sumsel, Sabtu (2/5).

harga kebutuhan publik.

Melalui mekanisme SAP ini jelaslah sudah, betapa pembukaan kran impor sebeb-bebasnya, termasuk di sektor migas, secara sadar memang dimaksudkan agar





Indonesia tetap melestarikan ketergantungan ekonominya kepada negara asing. Meskipun hal itu berarti akan melumpuhkan daulat migas dan perekonomian kita dalam jangka panjang.

### **Berakhirnya Masa Keemasan Migas Indonesia**

Kita, bukannya tidak pernah mencapai masa puncak keemasan

dalam industri migas. Pada 1977 kita mencapai 1,65 juta bph. Lalu pada 1995, pada masa puncak produksi kedua, produksi berhasil menembus angka 1,6 bph.

Setelah itu, dan hingga 4 tahun terakhir, *lifting* minyak Indonesia selalu mengalami penurunan. Pada 2011, *lifting* minyak Indonesia hanya mampu menembus angka 899.000 bph, 2012 sebesar 861.000

bph, dan 2013 sebesar 826.000 bph. Sementara pada 2014, sempat dipatok pesimis, sekitar 813.000 bph. Hasil *lifting* minyak hingga akhir 2014 di kisaran 799.000 bph. Alhasil, sejak produksi minyak pun disebut mencapai titik nadir.

Maka tak heran jika gagasan untuk pembangunan kilang minyak dipandang sebagai solusi untuk menyelamatkan daulat migas kita.



Kapasitas kilang minyak sekarang hanya mampu mengolah minyak sekitar 1,05 juta bph dengan maksimum produksi sekitar 800 bph. Padahal kebutuhan konsumsi kita mencapai 1,4 hingga 1,5 juta bph. Sehingga ada defisit produksi untuk konsumsi sekitar 600.000-700.000 bph.

Bandingkan dengan Singapura negara yang tidak memiliki sumur minyak, saat ini memiliki tiga perusahaan kilang minyak. Yakni Exxon Mobil Jurong Island Refinery dengan kapasitas 605.000 bph, Singapore Jurong Island Refinery Company dengan kapasitas 285.000 bph, dan Pulau Bukom Refinery, dengan kapasitas 458.000 bph. Maka tak heran bila Singapura kini berusaha menempatkan negaranya sebagai pusat energi dan petrokimia di Asia Tenggara.

Yang perlu kita waspadai, saat ini Sinopec China, perusahaan minyak Cina ternama di Asia, berencana membangun tempat penyimpanan minyak atau kilang terbesar di Asia Tenggara yang berlokasi di perdagangan bebas Batam, dekat Singapura. Kilang yang rencananya dibangun oleh PT West Point Terminal dan sahamnya dimiliki oleh Sinopec Kantons Holdings, unit bisnis dari Sinopec Group ini, akan menelan investasi sebesar USD 850 juta. Rencananya, kilang yang dapat menampung sekitar 16 juta barel minyak itu akan digunakan untuk memperkuat perdagangan minyak Sinopec di kawasan Asia Tenggara.

### Bagaimana Prospek Pembangunan Kilang Minyak di Indonesia?

Sebenarnya wacana pembangunan kilang minyak sudah dimulai sejak 15 tahun yang lalu namun hingga kini belum juga terealisasi. Beberapa investor yang memiliki kekuatan yang memiliki kekuatan dalam dana dan jumlah pasokan, seperti Iran, Arab Saudi, dan Kuwait pun telah berminat menjadi investor. Tetapi pemerintah agaknya tetap bergeming dengan



Karen Agustiawan

tawaran para investor. Alasan klasiknya, soal insentif dan *tax holiday* (keringan pajak).

Salah satu prakarsa pembangunan kilang minyak sempat diajukan oleh Pertamina semasa kepemimpinan Karen Agustiawan sebagai Direktur Utama. Melalui terobosan baru dengan menggagas rencana pembangunan Dua Kilang Baru yaitu Balongan (Kilang Balongan II) dan Tuban.

Proyek Kilang baru Balongan akan dilakukan dengan bekerjasama dengan Kuwait Petroleum International (KPI). Segala rencana maupun kesiapan sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh melalui *Detailed Feasibility Study* yang dilakukan oleh Foster Wheeler. Sedangkan Studi Lokasi telah oleh Institut Teknologi Bandung (ITB), yang hasilnya mengindikasikan bahwa lokasi dari Balongan dilihat dari aspek sosial dan finansial dinilai lebih tinggi resikonya, sehingga alternatif lain adalah Tanara di Banten.

Singkat cerita, semua dokumen terkait skema Proyek Pembangunan Kilang minyak Pertamina-KPI telah dipresentasikan secara lengkap kepada pemerintah cq Kementerian Keuangan. Misalnya saja yang terkait insentif, juga telah dilakukan studi

dukungan fiskal dan analisis dampak fiskal (*Cost and Benefit Analysis*) oleh konsultan independen Siddharta Advisory (KPMG), terkait Proyek Kilang Balongan II.

Adapun terkait dengan *Initial Incentive Package* (IIP) dimana pihak KPI menyampaikan permintaan empat insentif juga sudah dipaparkan melalui surat tertanggal 7 Desember 2011 tentang *Update on the New Balongan Complex Project-IIP and PFS*. Studi fiskal untuk Pembangunan kilang baru Balongan juga telah disampaikan kepada Menteri Keuangan cq Kepala BKF tertanggal 14 Agustus 2013.

Melalui *Initial Incentive Package-1*, KPI meminta *import duty* untuk produk *fuel* sebesar 10-15 persen atau Pertamina melakukan *offtake* produk dengan harga *import parity+import duty* minimal 15 persen. Sedangkan *import duty* untuk Produk Petrokimia KPI meminta sebesar 15-20 persen. Mulai dari masa beroperasi secara komersial hingga tenor utang.

Terkait *Corporate Income Tax* (CIT), KPI mengajukan pembebasan CIT selama masa tenor utang proyek +5 tahun. Kemudian CIT setelahnya 5 persen per tahun selama sisa masa operasi. Mulai dari beroperasi secara komersial sampai tenor utang.

Nah, disinilah pihak KPI sebagai mitra andalan Pertamina dan Pemerintah cq Kementerian Keuangan tidak tercapai titik temu. Dengan kata lain, pemerintah cq Kementerian Keuangan dalam bahasa tegasnya, menolak skema kerjasama Pertamina-KPI terkait Rencana Pembangunan Kilang Baru Balongan II. Melalui surat No S-709/2013 tanggal 26 September 2013, Kementerian Keuangan menandatangani bahwa dukungan pemerintah terhadap proyek Kilang Balongan II hanya sebatas *tax holiday* sesuai PMK 130 tahun 2011 yang diberlakukan secara luas, tanpa pengecualiaan, termasuk buat Proyek Kilang Baru Balongan. PMK 130/2011 menyebutkan pemerintah dapat

memberikan pembebasan pajak selama 5-10 tahun setelah beroperasi secara komersial dan 50 persen pada tahun ke-11 dan 12 dan setelah itu pajak normal sebesar 25 persen per tahun.

Alhasil, rencana pembangunan Kilang Baru Balongan berdasarkan skema *joint venture* Pertamina-KPI boleh dibilang gagal total.

Nasib serupa juga dialami Pertamina ketika mengajak serta perusahaan minyak Arab Saudi, ARAMCO, dalam rencana Kerjasama Pembangunan Kilang. Kerjasama Pembangunan Kilang dengan ARAMCO, Memorandum of Understanding (MOU) ditandatangani pada 18 Februari 2012. Lokasi kilang direncanakan di Tuban, Jawa Timur. Kapasitas 300 ribu barel per hari akan disuplai oleh ARAMCO. Pada perkembangannya, Pertamina akan melakukan *offtake* dari seluruh produk BBM yang akan diproduksi oleh kilang baru tersebut.

Dari keterangan tersebut, Pertamina di era kepemimpinan Karen Agustiawan, sepertinya punya sebuah konsep dan rencana strategis yang jelas dalam program peningkatan produksi BBM Nasional. Melalui apa yang dinamakan *Refinery Development Master Plan* (RDMP), Pertamina berusaha untuk meningkatkan produksi BBM dalam negeri.

Dengan RDMP, kapasitas kilang dalam negeri akan meningkat dari saat ini 819 ribu barrel per hari menjadi 1,598 ribu barrel per hari atau meningkat 2 kali lipat. Dengan demikian, produksi BBM akan menjadi 2,3 kali lipat dari saat ini. Berdasarkan studi keekonomian, biaya yang diperlukan adalah USD 10 miliar.

Dengan peningkatan *in-take* sebesar 779 ribu barrel per hari dan biaya hanya USD 10 miliar, maka proyek ini di mata Pertamina patut dilaksanakan karena lebih murah dari membangun kilang baru yang memerlukan biaya yang sama dan hanya menaikkan produksi hanya

300 ribu barrel per hari. Selain itu, proyek RDMP juga tidak memberikan dampak sosial yang negatif karena dilaksanakan di kilang yang sudah ada.

Dengan kata lain, Pertamina sebenarnya sudah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kapasitas pengolahannya melalui kerjasama dengan perusahaan yang memiliki kapasitas produksi minyak mentah yang besar seperti KPI dan Saudi Aramco. Masalahnya kemudian, kerjasama dengan perusahaan tersebut sangat tergantung pada keekonomian dan persyaratan yang diminta oleh pihak eksternal. Sehingga Pertamina tidak dapat memutuskan dengan cepat untuk membangun kilang tersebut.

Namun harapan yang dialamatkan kepada Kementerian Keuangan untuk memberikan fasilitas-fasilitas yang dipersyaratkan pihak asing tersebut, tak kunjung ada jawaban, bahkan ketika masa pemerintahan Presiden SBY berakhir.

Menjadi pertanyaan besar, apa yang sesungguhnya mendasari keputusan Menteri Keuangan menolak skema kerjasama Pertamina-KPI dalam Pembangunan Kilang Baru Balongan II, maupun tidak adanya respon yang pasti menanggapi usulan *joint venture* Pertamina-Saudi Aramco?

Apalagi ketika kenyataan saat ini Indonesia tidak hanya dihadapkan oleh konsumsi yang berlebih, tetapi juga strategis penyediaan cadangan strategis untuk menjamin ketahanan energi nasional.

Sehingga bicara soal kilang, seharusnya Indonesia sudah mulai berubah paradigmanya dari persoalan untung rugi, pemberian insentif, pada hal yang lebih substansial, yakni menjaga ketahanan energi. Daulat Energi.

Karena itu, bagus kiranya kalau Indonesia belajar dari skema kerjasama antara Saudi Aramco dan BUMN Cina. Skema patungan

yang dikembangkan kedua perusahaan BUMN ini adalah mampu mengembangkan proyek patungan yang saling membiayai antara Saudi Aramco (63 persen) dan BUMN Migas China Sinopec (37 persen). Sehingga pemerintah dalam hal ini, masih memiliki kedaulatan untuk turut memberikan pengamanan pada bisnis yang menguasai hajat hidup orang banyak tersebut.

Ketertarikan Cina untuk berbisnis pembangunan kilang ini, lantaran Saudi Aramco berani menjamin Internal Rate of Return (IRR) 15 persen dan Margin Pengilangan (MP) netto sebesar USD 5 per barrel. Jaminan itu adalah dalam bentuk rabat harga minyak mentah antara USD 4 sampai 8 per barrel. Hal ini bisa terwujud karena adanya pertemuan antara keekonomian dan kepentingan jaminan pasokan BBM. Termasuk andil negara (pemerintah) dalam kerangka mendukung kepentingan nasionalnya.

Maka, pelajaran penting dari gagasan pembangunan kilang bukan lagi semata pada hitung-hitungan ekonomi, melainkan apakah pemerintah dalam format *National Oil Company*, memiliki urgensi dan kepentingan yang sama dalam menyikapi perlunya membangun kilang. Melihat kondisi Indonesia saat ini yang berada dalam keadaan krisis ketersediaan migas, maka Indonesia berada dalam tahap Darurat Pembangunan Kilang. Sehingga prakarsa pembangunan kilang minyak, harus jadi prioritas.

Bayangkan. Ketika beberapa negara pengimpor minyak di Asia Pasifik seperti Jepang, Cina, Korea Selatan, dan Taiwan, yang sangat menggantungkan suplai minyaknya pada Timur Tengah, berlomba untuk menaikkan cadangan strategisnya dari semula sekitar 100 hari kini meningkat sampai lebih dari 200 hari konsumsi. Sementara Indonesia, hanya mampu mempertahankan cadangan BBM penyangga dalam kisaran 20 hari. 



**K**ejaksanaan Tinggi DKI Jakarta kembali menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan awal Juni 2015 mendatang, setelah sebelumnya Dahlan mangkir untukenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan 21 Gardu Induk (GI) senilai Rp 1,063 miliar yang tersebar di Jawa, Bali, dan NTB.

Meskipun Dahlan telah dipanggil sebanyak tiga kali untuk dilakukan pemeriksaan, pemanggilan pertama dilakukan pada 23 April lalu dan pemanggilan kedua pada 30 April lalu. Sedangkan pemanggilan terakhir sendiri dilayangkan Kejati DKI Jakarta kepada Dahlan, Kamis (7/5), Dahlan tidak menampakkan batang hidungnya dengan berbagai alasan. Alasan ketidakhadiran Dahlan pada pemanggilan ketiga, karena dirinya tengah berada di Indiana, AS. Tentu saja ketidakhadiran Dahlan pada pemanggilan oleh kejaksaan dinilai dapat menghambat proses penyidikan kasus tersebut.

“Dia berjanji akan datang pada pekan awal Juni, karena acaranya itu tanggal 30 dia harus hadir, dan awal Juni akan datang memenuhi panggilan kami,” jelas Kepala Kejati DKI Jakarta, Adi Toegarisman, di Kejati DKI Jakarta, JL HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (7/5).

Namun demikian dia menegaskan, pihak kejaksaan tidak akan melakukan pemanggilan paksa terhadap Dahlan karena pihaknya masih menolerir alasan yang dikemukakan bos Jawa Pos Group Dahlan dan tetap memberi kesempatan kepada Dahlan untuk hadir pada awal Juni 2015. “Karena alasannya bisa diterima, jadi kami akan menunggu kedatangan Pak Dahlan Iskan,” kilah Adi.

Rencana kehadiran Dahlan untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada awal Juni, kemudian diperkuat dengan pernyataan dari kuasa hukum Dahlan, Pieter Talaway.



## Gardu Listrik Menyengat Dahlan

“Beliau dijadwalkan kembali ke Indonesia sekitar bulan Juni. Beliau siap hadir nanti kalau sudah pulang,” tegas Pieter.

Pieter menambahkan keberadaan Dahlan di Amerika untuk menghadiri pertemuan forum lintas agama.

Menurut Pieter, pihaknya sendiri sudah mengirimkan surat berupa email serta alasan Dahlan yang belum dapat memenuhi panggilan kejaksaan.

Lebih lanjut kata Pieter, Dahlan sendiri sudah berada di Amerika sejak 5 Maret 2015, dan pertemuan itu akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. “Jadwal sudah terencana, bagaimana mau di-cancel? Beliau sudah janji dengan orang, apalagi beliau mengajar di sana,”

cetus dia.

Tidak sebatas itu saja, Pieter berkeyakinan jika kliennya sudah menjalankan tugasnya selaku Dirut PLN sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya sebagai Dirut maupun sebagai kuasa pengguna Anggaran.

“Intinya jelas, melakukan sesuai dengan tugas, fungsi sebagai Dirut maupun sebagai kuasa pengguna anggaran. Secara prosedural sudah benar,” cetus Pieter.

Seperti diketahui, pembangunan megaprojek Kementerian ESDM terhadap 21 unit gardu induk Jawa-Bali-Nusa Tenggara sudah dimulai pada Desember 2011 dengan target selesai Juli 2013. Nilai proyek ini mencapai Rp1,063 triliun.



Proyek Gardu Induk (GI) listrik berkapasitas 150 kilovolt itu sudah rampung lima unit, yakni GI New Wlingi, Fajar Surya Extention, Surabaya Selatan, Mantang, dan Tanjung.

Sementara itu, 13 proyek lainnya terbengkalai, yaitu GI Malimping, Asahimas Baru, Cilegon Baru, Pelabuhan Ratu Baru, Porong Baru, Kedinding, Labuhan, Taliwang, Jatiluhur Baru, Jatirangon II, Cimanggis II, Kadipaten, dan New Sanur.

Sebanyak tiga proyek yang tidak dilakukan kontrak adalah GI Selong, Soe/Nonohanis, dan Kafamenanu.

Sementara untuk tersangka Ferdinand selaku Direktur PT. HYM, jaksa sudah melakukan tahap 2, pada 19 Maret 2015 lalu. Kini, tersangka Ferdinand sudah lebih dijebloskan

ke rumah tahan (Rutan) Cipinang Jakarta Timur.

Pada kasus ini, kejaksaan juga telah memeriksa Mantan Sekjen ESDM Waryono Karno sebanyak dua kali, mengingat proyek tersebut *multiyears*.

Tak hanya itu saja, Kejati DKI Jakarta sendiri sudah menetapkan 15 tersangka, dan telah melimpahkan berkas perkara untuk penuntutan.

Sebanyak 9 tersangka sudah dilakukan penahanan, mereka adalah FY selaku Manajer Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Jawa Bali-UPK JJB IV Regional Jawa Barat; SA selaku Manajer Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Jawa Bali-UPK JJB IV Regional DKI Jakarta dan Banten.

Kemudian, INS selaku Manajer Konstruksi dan Operasional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara; ITS sebagai pegawai PLN proyek induk pembangkit dan jaringan Jawa-Bali; Y selaku Asisten Engineer Teknik Elektrikal di UPK JJB

2 PT PLN; AYS sebagai Deputi Manajer Akuntansi di Pikitring Jawa Bali Nusa Tenggara PLN; YRS sebagai pegawai PLN proyek induk pembangkit dan jaringan Jawa-Bali; EP selaku pegawai PLN proyek induk pembangkit dan jaringan Jawa-Bali; dan ASH selaku pegawai PLN Proring Jawa Tengah dan Yogyakarta. Sedangkan enam tersangka lain masih dalam proses pemberkasan di Kejati DKI.

Para tersangka itu disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP serta dijerat Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. ■ [Deddy K](#)

**Foto kiri:** Dahlan Iskan

**Foto kanan:** Pekerja perbaikan Gardu PLN Cawang melintas di area gardu yang terbakar.



## Denny Indrayana Kembali Diperiksa Bareskrim

Kasus Payment Gateway yang melibatkan mantan Wakil MenkumHam Denny Indrayana kembali digarap Bareskrim Polri dengan ditandai pemeriksaan terhadap Denny, Selasa (26/5).

"Nanti ya, diperiksa dulu ya," kata Denny singkat di Gedung Bareskrim, Jakarta.

Denny sendiri datang di Gedung Bareskrim pada pukul 13.15 WIB, dengan ditemani kuasa hukum.



Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigjen Ahmad Wiyagus mengatakan, pemeriksaan Denny tersebut untuk menyempurnakan beberapa keterangan pihak Denny yang dinilai masih kurang untuk melengkapi berkas penyidikan.

"Untuk menyempurnakan keterangan," katanya.

Pemeriksaan tersebut adalah kali keempat terhadap Denny yang sudah menyandang statusnya sebagai tersangka kasus tersebut.

Penyelidikan Polri bermula dari laporan BPK pada Desember 2014. Kemudian pada 10 Februari 2015, Bareskrim Polri menerima laporan Andi Syamsul Bahri atas dugaan keterlibatan Denny Indrayana dalam kasus korupsi ketika masih menjabat sebagai WamenkumHAM.

Polri juga sudah memeriksa puluhan saksi dalam penyidikan, termasuk di antaranya mantan Menkumham Amir Syamsuddin dan Dirut PT Bank Central Asia, Tbk, Jahja Setiaatmadja, namun baru Denny yang telah ditetapkan sebagai tersangka. /Deddy K



## Anas Maamun Di Tuntut 6 Tahun

Gubernur Riau nonaktif Annas Maamun dituntut enam tahun penjara terkait kasus suap alih fungsi lahan kebun kelapa sawit, di Kabupaten Kuantan Singingi Riau di Pengadilan Tipikor, Bandung, Senin (25/5).

Sidang tuntutan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Barita Lumban ini, hanya berlangsung sekitar 10 menit karena sebelumnya pada Rabu (20/5) tim JPU dari KPK telah membacakan sebagian surat tuntutannya.

Pembacaan tuntutan pada pekan lalu sempat terhenti karena terdakwa Annas terpaksa dilarikan ke rumah sakit, karena muntah di ruang sidang.

Jaksa Irene menuturkan terdakwa Annas terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 12 huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi.

"Sehingga meminta majelis hakim yang menangani perkara ini supaya menjatuhkan hukuman selama enam tahun penjara dan denda Rp250 juta subsidair lima bulan kurungan," kata Jaksa Irene.

Lebih lanjut dia mengatakan, ada sejumlah hal yang memberatkan seperti terdakwa dinilai tak mendukung program pemerintah yang giat memberantas korupsi. "Sementara hal yang meringankan, terdakwa sudah lanjut usia dan belum pernah dihukum," katanya.

Sidang akan dilanjutkan pada Senin (1/6) pekan depan dengan agenda penyampaian nota pembelaan terdakwa Annas. /Deddy K

## Kontras Tolak Wacana Rekonsiliasi Pemerintah

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menilai rencana rekonsiliasi yang difasilitasi pemerintah terhadap kasus HAM berat masa lalu karena bukan merupakan solusi yang efektif.

"Kami mengecam sikap dan pernyataan Jaksa Agung yang menolak melakukan penegakan hukum atas kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu," kata Koordinator Kontras Haris Azhar di Jakarta, Senin (25/5).

Haris mengatakan rekonsiliasi itu juga sama saja tidak menghargai kinerja Komisioner Komnas HAM sebelumnya yang telah memiliki bukti adanya pelanggaran HAM berat.

Lebih lanjut dia menambahkan langkah rekonsiliasi itu sama saja dengan memudahkan masalah, padahal kasus tersebut harus diusut

tuntas.

Seharusnya, lanjut dia para pelaku dibawa ke Pengadilan HAM maupun Pengadilan HAM "ad hoc".

Karena itu, Kontras menuntut Presiden Jokowi berani mengeluarkan keputusan presiden untuk membentuk Pengadilan HAM "ad hoc", dan mengeluarkan instruksi presiden kepada Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, untuk menyelesaikan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. /Deddy K



## Eksepsi Waryono Karno Ditolak Hakim Tipikor

Majelis hakim menolak nota keberatan yang diajukan bekas Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Waryono Karno dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi.

"Menolak keberatan penasihat hukum terdakwa Waryono Karno untuk seluruhnya, dan memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan atas nama terdakwa Waryono Karno," kata ketua majelis hakim Artha Theresia dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan sela di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (25/5).

Putusan sela tersebut diambil oleh Majelis Hakim Artha Theresia, Saiful Arif, Casmaya, Ugo dan Anwar. Artha juga menyoroti, soal gratifikasi yang disebut diberikan menyebabkan dakwaan tidak cermat dan tidak jelas karena pasal 12 B UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Padahal, nilainya lebih dari Rp10 juta atau lebih pembuktian gratifikasi itu bukanlah suap harus dibuktikan oleh terdakwa sehingga terdakwalah yang membuktikan bukan suap, terlepas dari siapapun yang memberikan gratifikasi itu," kata Hakim Artha.

Sehingga hakim, penuntut umum KPK secara yuridis telah menguraikan dengan jelas dan cermat sehingga keberatan penasihat hukum harus dinyatakan ditolak dan tidak beralasan secara hukum.

Sidang dilanjutkan pada 1 Juni 2015 dengan agenda pemeriksaan saksi yaitu Sri Utami, Rida Mulyana, Arif Indarto, Ego Syahril dan Agus Salim. /Deddy K



## Hadi Poenomo Kalahkan KPK

Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan praperadilan mantan Dirjen Pajak, Hadi Poernomo terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap sudah benar.

Pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Dr Chairul Huda mengatakan, menurut Undang-Undang, KPK memang tidak berhak mengangkat penyidik dan penuntut sendiri. Tetapi hanya penyidik Polri menjadi penyidik pada KPK.

Hal serupa, ujar dia, juga berlaku untuk penuntut. "Penuntut kejaksaan hanya penuntut pada KPK. Ada kata 'pada' itu dalam undang-Undang," ujar Chairul kepada Aktual.co, Selasa (26/5).

Dia menilai, selama ini lembaga antirasuah selalu 'keras kepala' menganggap dirinya benar dalam proses penanganan tindak pidana korupsi dengan mengangkat penyidik sendiri.

"Sekarang terbukti oleh pengadilan bahwa KPK itu tidak berwenang mengangkat penyidik dan penuntut sendiri," kata dia.

Sambung dia, "Penyidik itu dari Polri dan penuntut itu berasal dari Kejaksaan, jadi sudah benar itu putusan."

Dalam putusannya, Majelis



Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan penyidik KPK tidak sah. Karena diangkat bukan dari orang-orang yang pernah menjadi atau mempunyai kompetensi sebagai penyidik.

Selain itu, anggota Polri yang sudah pensiun tidak sah melakukan penyelidikan dan penyidikan jika pengangkatannya tidak menempuh prosedur yang diatur untuk mengangkat penyidik dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Sesuai Pasal 45 UU KPK, penyidik yang dimaksud Pasal 6 KUHAP, yaitu Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dalam perkara Tipikor, diberikan juga kewenangan kepada Kejaksaan sebagai penyidik sesuai Pasal 30 UU Kejaksaan. Dengan begitu, penyidik KPK yang sah menurut UU adalah penyidik yang berasal dari Kepolisian, PPNS atau Kejaksaan yang diangkat oleh KPK./23

Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan mantan Dirjen Pajak, Hadi Poernomo terkait sah tidaknya penetapan tersangka terkait kasus dugaan korupsi permohonan keberatan wajib pajak Bank Central Asia (BCA).

Dalam putusannya, hakim menilai penyidik KPK tidak sah melakukan penyidikan karena penyidik KPK yang menyidik kasus tersebut bukan berasal dari institusi Polri dan penyidik itu sudah lepas masa tugasnya. /Deddy K

## Ini Kata Kapolri Soal Ijazah Palsu

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengaku dirinya belum mengetahui secara pasti modus dan bentuk pemalsuan ijazah palsu yang kini kasusnya tengah menjadi sorotan Menteri Ristek dan Dikti Mohamad Nasir beberapa hari belakangan ini.

"Belum (tahu). Nanti, hari ini, kita konfirmasi dengan Pak Menteri

karena kemarin masih sibuk sehingga belum sempat koordinasi," kata Badrodin di Mabes Polri Selasa (26/5).

Badrodin mengatakan pihaknya akan menyelusuri bagaimana bentuk pemalsuannya. "Itu kan beda-beda. Maka itu kita pelajari dulu apa substansi materinya," ujarnya. /Deddy K



# Early Warning Buat Jokowi

**R**ealisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I tahun 2015 ini begitu jauh dari harapan. Dari level 5,7 persen yang ditargetkan, nyatanya pertumbuhan ekonomi RI hanya terealisasi di level 4,7 persen.

Angka tersebut bahkan tercatat sebagai pertumbuhan terlambat dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Nasib yang sama juga dialami oleh realisasi inflasi. Target inflasi di level lima persen nyatanya justru mencapai 6,8 persen.

Badan Pusat Statistik melaporkan perekonomian Indonesia kuartal I tahun 2015 tumbuh 4,71 persen (y-on-y), melambat dibanding periode yang sama pada tahun 2014 sebesar 5,14 persen. Secara kuartalan, perekonomian menyusut 0,18 persen setelah mengalami kontraksi 2,06 persen pada periode Oktober-Desember.

Kondisi perekonomian global yang masih didera “kegalauan” hingga kisruh dalam negeri yang terjadi di tubuh KPK-Polri dinilai berpengaruh besar terhadap perlambatan ekonomi RI. Kepala BPS Suryamin mengatakan, perlambatan ekonomi ini disebabkan oleh dua sisi, yakni sisi produksi dan konsumsi.

Dari sisi produksi, Suryamin menjelaskan, ada empat penyebab utama. Pertama, penurunan produksi pangan lantaran mundurnya periode tanam. Kedua, pertumbuhan industri kilang minyak yang berada di zona merah lantaran kontraksi yang terjadi pada produksi minyak mentah pun batu bara.

Distribusi perdagangan yang



Pekerja PT Mekar Armada Jaya Magelang mengenakan kostum poong saat berunjuk rasa meminta perusahaan agar memberikan hak-hak normatif buruh yang selama ini tidak pernah diberikan, di Semarang, Jateng, Senin (27/4).

melambat lantaran menurunnya pasokan barang impor juga disebut-sebut sebagai penyebab perlambatan ekonomi dari sisi produksi. Dalam hal ini, Suryamin mengatakan terjadi penurunan impor baik untuk barang modal, bahan baku/penolong, serta barang konsumsi. BPS mencatat impor pada kuartal I-2015 turun 2,2 persen (YoY), dan turun 9,98 persen (QtQ).

Dan keempat, penyebab perlambatan ekonomi dari sisi produksi adalah kinerja sektor konstruksi terkait dengan terlambatnya realisasi belanja infrastruktur. Direktur Centre For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mengatakan, minimnya pencairan dana dari kementerian keuangan, atau belanja pemerintah dalam APBN yang belum maksimal menjadi titik penting penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi RI.

Menurut Uchok, lambatnya penyerapan anggaran pemerintah ini disebabkan oleh perombakan struktural kementerian pada masa pemerintahan saat ini belum juga selesai.

Sementara itu dari sisi konsumsi, terdapat enam penyebab perlambatan

ekonomi RI di kuartal I 2015. Beberapa diantaranya yakni terkait melambatnya seluruh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (RT), hingga melambatnya pengeluaran konsumsi pemerintah. Pun ekspor barang yang berkontraksi oleh turunnya harga komoditas.

Adapun sumber sentimen negatif yang paling berpengaruh, kata Suryamin, adalah perlambatan ekonomi Tiongkok, Singapura, hingga perekonomian Eropa yang tengah “sakit” yang selama ini menjadi mitra dagang utama Indonesia baik ekspor maupun impor. Ekonomi Tiongkok tercatat turun dari 7,4 persen pada kuartal III 2014 menjadi 7,0 persen, sedangkan Singapura turun dari 4,9 persen menjadi 2,1 persen.

Bak cermin, perlambatan ekonomi RI ini dinilai sebagai gambaran kinerja Pemerintahan Jokowi-JK yang jauh dari kata maksimal, termasuk didalamnya kinerja tim ekonomi Jokowi-JK yang dinilai beberapa kalangan sangat buruk dan perlu adanya perombakan atau *reshuffle*. Langkah *reshuffle* ini dinilai pengamat sebagai sesuatu yang tidak dapat ditolerir lagi, alias wajib dilakukan oleh Jokowi-JK sebagai pemimpin negeri ini.

Kendati dikatakan Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, bahwa proyeksi pertumbuhan

ekonomi Indonesia tahun 2016 akan mencapai 5,8-6,2 persen, namun dampak lesunya perekonomian saat ini begitu menyakitkan hati rakyat.

Tengok saja di luar sana, sejumlah perusahaan beserta ribuan karyawannya telah menjadi korban dari beringasnya dampak perlambatan ekonomi. Setidaknya tercatat ada enam perusahaan yang “guling tikar” dan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja alias PHK ke karyawannya.

Data Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) menyebutkan, sejak Januari 2015, industri sepatu Indonesia telah melakukan PHK secara bertahap terhadap 11.000 pekerja. Pun lebih parah lagi yang terjadi di sektor pertambangan yang mengalami bisnis minus 2,32 persen di kuartal I 2015, telah melakukan PHK terhadap ratusan ribu pekerja. Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mengatakan jumlah pekerja di sektor tambang ini telah berkurang setengah atau sekitar 400.000-500.000 orang dari total pekerja sekitar 1 juta orang.

Merosotnya harga batubara di pasaran dunia menjadi sumber penyebab PHK di industri batubara, lantaran perusahaan mengurangi volume produksi demi meminimalisir kerugian.

Menurut Ketua Umum APBI Pandu P. Sjahrir, langkah efisiensi sulit dilakukan, itu sebabnya banyak karyawan yang dirumahkan.

Tragis pula yang terjadi di sektor mineral, PHK besar-besaran terjadi sejak tahun lalu saat pemerintah

melarang ekspor mineral. Ladjiman Damanik, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia mengemukakan ancaman PHK bahkan masih terjadi di perusahaan penghasil logam dan konsentrat hingga detik ini.

Data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di tanah air terus bertambah. Bahkan, di bulan Februari 2015, menjadi puncak angka pengangguran tertinggi di Indonesia sejak Agustus 2012. Jika bulan Agustus 2012, pengangguran tercatat 7,24 juta orang, maka di bulan Februari 2015, jumlahnya bertambah menjadi 7,45 juta orang. Catatan BPS, tingkat pengangguran terbuka pada bulan Februari 2015 lalu mencapai 5,8 persen dari total angkatan kerja sebanyak 128,3 juta.

Sejumlah upaya masih terus dilakukan Pemerintah untuk menggairahkan perekonomian Indonesia yang lesu, kendati memang belum dirasa cukup untuk meredam dampak dari perlambatan ekonomi tersebut. Pasalnya, proyek infrastruktur yang dicanangkan Pemerintah dengan menggandeng Tiongkok hingga Jepang masih dalam tahap permulaan, butuh beberapa tahun lagi untuk menyelesaikan dan merasakan hasilnya.

Dari segi keuangan, Pemerintah masih terus mengupayakan menjaga Sistem Stabilisasi Keuangan atau SSK. Untuk mewujudkan stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia (BI) menerapkan kebijakan makropudensial untuk mencegah terjadinya risiko sistemik.

Tak hanya untuk mengurangi risiko sistemik, kebijakan makropudensial juga bertujuan untuk mengurangi potensi

instabilitas serta gangguan atau kegagalan di suatu institusi keuangan yang menjalar ke institusi keuangan lainnya. Demikian seperti disampaikan oleh Direktur Departemen Kebijakan Makropudensial Bank Indonesia (BI) Yati Kurniati, di Bandung, baru-baru ini.

“Karena institusi keuangan itu usaha besar, sehingga ada keterkaitan antara institusi yang gagal. Ketika yang besar jatuh maka akan merembet seceara luas, itu yang kami coba cegah,” ujarnya saat seminar yang mengulas tentang Kajian Stabilitas Sistem Keuangan, di Bandung beberapa waktu lalu.

Dalam mengawasi industri perbankan, kata Yati, BI menggunakan peraturan secara makro, dengan memperkuat ketahanan permodalan, mencegah leverage yang berlebihan, serta mengelola fungsi intermediasi dan mengendalikan risiko kredit, likuiditas, risiko nilai tukar, dan risiko suku bunga, serta risiko lainnya yang berpotensi menjadi risiko sistemik.

Seperti diketahui, Jokowi Effect bahkan tidak mampu membuat Rupiah bersinar, Rupiah justru makin meredup ditengah perkasanya dolar Amerika Serikat. Ancaman wabah “Super Dolar” pun membayangi kedaulatan Rupiah.

Dan lagi-lagi, kinerja Tim Ekonomi Jokowi-JK yang dinilai tidak berkapabilitas dianggap sebagai penyebab gagalnya pemerintah memperbaiki posisi Rupiah terhadap dolar AS. Berdasarkan data Bloomberg Dollar Index, laju nilai Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sejak awal tahun 2015 terus mengalami keterpurukan hingga menembus level di atas Rp13.200 per dolar AS.

Mata uang Garuda ini bahkan tercatat menyentuh level terendahnya sejak Agustus 1998 lalu. Tak tertutup kemungkinan Rupiah akan menyentuh level Rp13.500 hingga Rp15.000 beberapa waktu ke depan jika Pemerintah tak segera sigap memperbaiki kondisi ini. ■ Ti Harringsih





## Peredaran Rokok Elektrik Akhirnya Dilarang

Kementerian Perdagangan akan melarang penjualan rokok elektrik karena membahayakan konsumen. Rokok elektrik atau lebih dikenal dengan *vaping* (*e-cigarette*) ini sempat mencuat penjualannya karena dianggap bersih dari nikotin.

"Rokok elektrik sudah kita larang karena membahayakan konsumen," kata Menteri Perdagangan Rachmat Gobel di Jakarta, 16 Mei 2015.

Kementerian Perdagangan, lanjut Gobel, sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan yang sebelumnya mengeluarkan rekomendasi bahwa rokok elektrik membahayakan konsumen. Bahkan rokok elektronik ini lebih berbahaya daripada rokok tembakau.

Rokok elektrik sendiri kebanyakan diimpor. Karena itu, Dirjen Standardisasi Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Widodo memaparkan impor rokok elektrik akan segera distop. Apalagi rekomendasi pelarangan impor rokok elektrik sudah disampaikan



Kementerian Kesehatan (Kemkes) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Pemerintah pun tengah menyiapkan regulasi untuk larangan itu berupa Peraturan Presiden (Perpres) tentang peredaran barang yang dilarang, diawasi perdagangannya, atau diatur tata niaganya. "Saat ini Perpres soal larangan impor rokok elektrik itu sedang digodok," ucap Widodo.

Sambil menunggu penyelesaian Perpres, Kementerian Perdagangan akan mengeluarkan Permen tentang larangan impor rokok elektrik. Kemendag juga berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri yang selanjutnya diikuti surat pelarangan impor. /Moh Sahlan

## Impor Berpotensi Meningkat

Laju impor barang-barang ke Indonesia berpotensi meningkat. Pemicunya adalah kebijakan banyak negara yang berlomba-lomba menurunkan harga produknya untuk mengatasi kelesuan pasar yang terus terjadi.

Dirjen Standarisasi Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan, Widodo, mengatakan bahwa saat ini banyak negara khawatir bahwa perekonomian global akan semakin menurun dan dampaknya adalah perang harga.

"Banyak produk impor yang sekarang harganya mulai diturunkan karena penyerapan pasarnya



cukup rendah. Ini berpotensi membuat impor semakin meningkat," ujar Widodo di Jakarta, akhir Mei 2015.

Antisipasi terhadap kemungkinan itu tentu harus diupayakan pemerintah. Harus ada langkah antisipasi terhadap kemungkinan politik *dumping*, dimana produk impor yang dijual lebih murah dibanding di negaranya.

Impor yang diprediksi akan meningkat, lanjut Widodo, meliputi barang-barang elektronik dari Cina, Korea Selatan, dan Vietnam. Adapun produk makanan dan minuman dari Singapura dan Malaysia juga berpotensi menyerbu pasar domestik karena ada kecenderungan penurunan harga.

"Sekarang persaingan harga mulai terlihat dan terasa," tuntasnya. /Moh Sahlan

## Garuda Rombak Pesawat Haji untuk Pemudik

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk merombak sejumlah pesawat haji menjadi pesawat kelas ekonomi untuk mengantisipasi lonjakan pemudik Lebaran 2015. Setidaknya enam pesawat yang diubah kompartemennya dan seluruhnya tipe Airbus A330-300.

"Sebetulnya, pesawat itu diprioritaskan untuk haji. Tapi sebelum masuk haji juga bisa dipakai sebagai cadangan mengantisipasi lonjakan pada arus mudik Lebaran," ujar Direktur Utama Garuda Indonesia M Arif Wibowo di Jakarta, Senin (18/5).

Perombakan tersebut, lanjut Arif, sedang dalam tahap rekonfigurasi dan diperkirakan sebelum musim haji sudah rampung sehingga bisa dipergunakan untuk mengangkut pemudik.

Arif memperkirakan akan terjadi lonjakan penumpang lebih banyak pada musim lebaran tahun ini, karena bertepatan dengan musim liburan sekolah dengan prediksi penambahan penumpang sekitar 10 hingga 15 persen. Karena itu, pihaknya akan menambah penerbangan (*extra flight*) baik untuk rute mudik, maupun untuk rute liburan.

Rute yang ditambah penerbangannya untuk mudik, meliputi Yogyakarta, Solo, Semarang, Surabaya, Medan dan Makassar, sementara untuk liburan, yakni Denpasar dan Singapura. "Beberapa rute yang non-mudik tapi untuk liburan menjadi bagian penting diantisipasi," terangnya.

Terkait harga tiket, Arif mengatakan ada kenaikan namun tidak akan melampaui tarif batas atas. "Kalau angkutan darat ada tushlah, kita kan enggak ada tushlah, kita main di *subclasses* saja sampai batas atas lah maksimal," tuntas Arif. /Tri Hamingsih



## Kadin: Imbas Perekonomian Lesu, Pengusaha Bisa Lakukan PHK

Pertumbuhan ekonomi RI yang tengah lesu secara tidak langsung memberi dampak buruk di beberapa aspek termasuk soal banyaknya perusahaan yang gulung tikar dan sejumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan perusahaan terhadap karyawannya.

Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto membenarkan hal tersebut, di mana pengusaha dapat melakukan PHK akibat penjualan yang menurun. Oleh sebab itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah melakukan strategi dalam mendorong ekonomi dalam negeri.

"Pengusaha bisa melakukan PHK. Memang betul (pelambatan pertumbuhan ekonomi) ada pengaruh dari eksternal, tapi perekonomian dalam negeri perlu diselamatkan,

dunia usaha sulit menghadapi ini, daya beli masyarakat sekarang turun dan kebijakan moneter yang ketat," kata Suryo, ditulis Selasa (26/5).

Lebih lanjut dijelaskan dia, jika daya beli masyarakat menurun, maka secara otomatis penjualan produk dari berbagai perusahaan akan ikut menurun. Kondisi tersebut akan membuat pengusaha membatasi kegiatan produksinya dan bahkan dapat menghentikan produksi untuk sementara waktu.



"Properti, otomotif, retail dan konsumen produk itu semuanya lagi menurun," tandasnya.

Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal I tahun 2015 hanya mencapai 4,7 persen, jauh dari target yang diharapkan yakni 5,7 persen. Untuk mendorong perekonomian, menurut Suryo, perlu penurunan suku bunga acuan perbankan (BI Rate) agar pengusaha tidak terbebani dengan bunga yang tinggi ketika meminjam uang diperbankan untuk ekspansi.

Dan kebijakan mendongkrak pajak pada sekarang ini, menurut dia, tidak tepat karena pengusaha sedang dihadapkan dengan perlambatan ekonomi. "Itu (kenaikan target penerimaan pajak) waktunya enggak pas. Sekarang pengusaha pada megap-megap," ucapnya. /Tri Haringsih

## Kawasan Timur Indonesia Belum Tersentuh Pembangunan

Dalam Rakernas Kadin Indonesia bagian Timur di Jakarta, Senin (25/5) kemarin, Presiden Joko Widodo mengemukakan rencana besarnya membangun kawasan Indonesia Timur. Menurutnya, potensi yang ada belum termanfaatkan dengan baik akibat permasalahan infrastruktur yang belum dibangun. Di mana infrastruktur yang ada seperti pelabuhan dan jalan tidak mampu menampung distribusi produksi.

Jokowi sempat mengatakan bahwa hal tersebut lantaran pemerintah atau para menteri sebelumnya tidak melakukan *blusukan*. "Kenapa enggak dikerjakan? Karena mungkin pemerintahnya (sebelumnya) enggak pergi ke sana dan setelah melihat, saya putuskan di lapangan, sudah dimulai. Bagian pelabuhan, jalan,

irigasi. Investasi silakan masuk, tapi jangan semua. Sebesar 70% dipegang BUMN dan 30% dipegang swasta," kata Jokowi, dalam Rakernas Kadin Indonesia bagian Timur di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (25/5).

Lebih lanjut Jokowi mencontohkan, salah satu kabupaten di Merauke, Kabupaten Wapeko memiliki bentang tanah datar seluas 4,6 juta hektare (ha), namun setelah diidentifikasi, yang siap dikerjakan dan digunakan untuk tanam padi, jagung dan tebu baru 1,2 juta ha.

Padahal, kata Jokowi, jika tanah seluas 4,6 juta ha tersebut dikerjakan seluruhnya akan menghasilkan produk pertanian yang melimpah ruah. Pasalnya, 1 ha tanah bisa menghasilkan 8 ton padi untuk sekali masa panen. Dengan demikian, total luas tanah tersebut akan dapat menghasilkan 37 juta ton sekali panen.

"Dua kali panen berarti 74 juta ton. Kalau tiga kali panen 110 juta ton. Hanya dari satu kabupaten.

Padahal produksi nasional kita 60-70 juta ton," imbuh dia.

Oleh sebab itu, lanjut Jokowi, perlu adanya keseriusan dalam memanfaatkan dan mengerjakan potensi tersebut, agar mendatangkan panen bisa berlimpah dan swasembada pangan pun tercapai. /Tri Haringsih







## Tender LPG ISC-Pertamina, Bangkitnya Mafia Baru?

**P**erang kepentingan di Sektor Minyak dan Gas semakin lama semakin ketara.

Di satu sisi pemerintah dibantu Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) gencar membubarkan Petral-PES yang diduga menjadi sarang pemburu rente migas, namun di lain sisi tender minyak mentah dan LPG yang dilakukan Integrated Supply Chain Pertamina (ISC-Pertamina) dibawah pimpinan Daniel Purba tidak menunjukkan perbaikan transparansi yang berarti, tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan Petral-PES.

Dengan suasana sunyi-senyap, ISC-Pertamina pada 23 Februari 2015 lalu mengadakan tender LPG yang terdiri dari 22.000 MT butane dan 22.000 MT propane. Dalam *Key and Term Condition* (TOR) yang dikirimkan

ISC-Pertamina ke peserta tender disebutkan jelas bahwa kebutuhan LPG ditenderkan untuk periode April 2015.

*"We are pleased to invited your esteemed company to submit your best offer to our spot buying requirement for April 2015 with the following key terms and conditions,"* ujar Pertamina dalam penawaran tender kepada peserta tender.

Sedangkan syarat atau waktu pengiriman berbunyi *"FOB Mid East with Loading laycan 6-10 April 2015 or FOB Asia Pacific region with Loading laycan 12-16 April 2015. Two (2) days ALS to be narrowed down by buyer at the latest two weeks after awarding"*.

Terkait dengan harga, ISC-Pertamina menyebutkan harga didasarkan pada Butane dan Propane Saudi Aramco plus minus Alpha dalam dolar Amerika.

*"Pricing shall be based the Contract Price Saudi Aramco for Propane and Butane on the month of loading, plus or minus Alpha in United States Dollars (USD) per metric ton. Please propose your best price (alpha),"* tulis data tersebut.

Data yang dimiliki *Aktual* menunjukkan bahwa pada tanggal 29-30 Maret 2015, Pertamina memenangkan Total dengan *loading FOB (Free on Board) Ruwais, UAE* dengan harga CP Aramco Maret minus USD 7,5.

Dengan begitu, ISC-Pertamina telah melanggar prosedur karena dalam tender jelas disebutkan untuk *loading* bulan April 2015, namun justru memenangkan Total yang jelas menawarkan *loading* bulan Maret 2015. Padahal peserta lain, selain Total, menawarkan *pricing & loading* bulan April 2015. Bila ISC-Pertamina memilih *pricing & loading* bulan Maret 2015 seharusnya ISC-Pertamina melakukan *re-tender*.

Atas kebijakan yang dilakukan ISC-Pertamina tersebut diduga

potensi kerugian perusahaan Pertamina dan negara mencapai USD 400.000 atau sekitar Rp 5,2 miliar. Perhitungan kerugian berdasarkan atas perbedaan harga CP Aramco pada bulan Maret 2015 di harga USD 480/MT dan bulan April 2015 di harga USD 465/MT.

Artinya, jumlah harga dari Total yang terdiri dari CP Aramco Maret dikurangi diskon USD 7,5 adalah USD 472,5. Sedangkan harga dari Petredec yang terdiri dari CP Aramco dikurangi diskon USD 2,5 adalah USD 462,5. Di sini jelas terlihat perbedaan Total dan Petredec senilai USD 10 per MT. Sehingga total kerugian yang dialami Pertamina dan negara mencapai USD 440.000.

Atas dasar data tersebut, Analisis Asosiasi Ekonomi-Politik Indonesia (AEPI) Kusfiardi menganggap ISC-Pertamina dengan Vice President (VP) Daniel Purba telah memenuhi dugaan delik korupsi berdasarkan Undang-undang karena perbuatan melawan hukum, memilih pemenang tender LPG tidak berdasarkan TOR yang diumumkan sebelumnya.

“Perbuatan yang menimbulkan kerugian perusahaan negara harus diselesaikan secara hukum. Apalagi jika alat bukti awal sudah cukup,” kata Kusfiardi.

Menurutnya, akar permasalahan ini adalah karena ISC diduga tidak transparan menjalankan proses pengadaan baik minyak mentah maupun LPG. Dia mendesak agar ISC-Pertamina dirombak total.

Sementara itu, Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) juga mengungkap beberapa faktor yang menyebabkan Pertamina merugi dalam hal pengadaan dan tender. Pertama, ada *trader* perantara yang selalu dimenangkan dan diduga mafia migas.

“Kedua, Pertamina kerap merugi akibat adanya kesalahan dalam

*inventory* manajemen. Pertamina tidak bisa memperkirakan harga. Selalu beralasan beli di harga tinggi lalu menjual dengan harga rendah. Nah kerugian tadi itu akibat manajemen Pertamina sendiri,” ujar anggota tim RTKM Fahmi Radhi.

Dalam hal tender LPG ini, Fahmi menilai kemenangan Total merupakan kesalahan dari manajemen Pertamina. “Masak harga lebih mahal malah dipilih. Itu yang tidak pernah berubah, itu yang menjadi masalah,” jelasnya.

Untuk membuktikan siapa yang terlibat atau dengan sengaja melakukan kerugian, dia meminta penegak hukum untuk segera mengusut dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan negara itu. “Nah saya kira BPK atau KPK harus masuk melakukan audit investigasi pada Pertamina. Apakah ini kesalahan manajemen atau kongkalikong pejabatnya. KPK, BPK atau Bareskrim POLRI harus masuk untuk melakukan penyidikan,” katanya.

Hal ini harus dilakukan agar terang benderang: apakah ini kesalahan manajerial atau memang ada unsur korupsi. “Kalau manajerial dicopot. Kalau ada tipikornya ya dijalar hukum. Ini kan kerugian Pertamina, nanti akan jadi kerugian Negara. Nanti kalau begitu menutupinya dengan mengorbankan konsumen, menaikkan harga. Rakyat korbannya,” jelasnya.

Respon datang dari Anggota Komisi VII DPR RI Hari Purnomo. Dia meminta Pertamina melakukan renegotiasi dengan Total untuk meminimalisir selisih harga dan kerugian. Mengingat perbedaan harga antara Maret dan Februari cukup signifikan.

“Paling tidak ada penyesuaian harga. Ada *special effort* dari Pertamina, untuk meminimalisir kerugian. Memang itu resiko, dalam bisnis seperti itu. Tinggal kepiawaian Pertamina saja untuk meminimalisir,” ungkap Hari.

Sedangkan menurut Anggota Komisi VII Satya Yudha, ISC-

Pertamina seharusnya lebih baik dari Petral-PES, tidak mengulangi kesalahan yang sama. ISC-Pertamina harus lebih transparan agar publik bisa ikut mengawasi.

“ISC harus menjadi wadah terintegrasi dalam pengadaan dan sekaligus berperan sebagai *trader arm* dari korporasi Pertamina. Agar tidak mengulang kesalahan Petral di masa lalu, maka ISC-Pertamina harus lebih transparan dan publik bisa ikut mengawasi,” ujar Satya Yudha.

Riuh rendah, tender LPG yang memenangkan Total dengan potensi kerugian mencapai Rp5,2 miliar akhirnya memaksa ISC-Pertamina menggelar konferensi pers, melakukan klarifikasi dan pembelaan. Vice President Integrated Supply Chain (ISC) PT Pertamina Daniel Syahputra Purba mengklaim bahwa tidak ada kerugian negara yang disebabkan dari proses tender LPG yang dinilai curang karena telah memenangkan pihak Total meskipun penawarannya tidak sesuai TOR undangan tender.

“*Best practicenya, price* itu *based on loading month*, jadi itu yang kita pakai sebagai acuan. Tapi yang pertama kita mau fokus dapat barangnya dulu. Memang kita tidak akan nabrak harga. Bisa saja barangnya ada, cocok, tapi lebih mahal. Nanti rakyat beli LPG mahal, marah-marah lagi,” kata Daniel di kantor Pertamina Pusat, Jakarta, Kamis (7/5).

Pihaknya mengaku tidak bisa memrediksi berapakah harga CP Aramco di bulan tertentu dalam hal ini bulan April 2015. Sehingga ketika ada penawaran yang lebih murah meski dengan *pricing* Maret maka itu yang paling dipertimbangkan. Diakuinya, secara *best practice*, apa yang telah dilakukannya memang tidak sesuai.

“Kita memang butuh kargo untuk bulan April. Memang kalau kebutuhan kargo April yang di-*load* pada bulan April akan mengacu pada harga CP Aramco April. Saat itu kita tidak tahu berapa harganya, masih Februari kan tendernya. Kalau saya tahu berapa



**Foto kiri:** Vice President Integrated Supply Chain (ISC) PT Pertamina Daniel Syahputra Purba berbicara saat konferensi pers terkait tender LPG oleh ISC-Pertamina.

**Foto kanan:** Fahmi Radhi



besok atau berapa bulan depan harganya, saya tidak kerja di sini. Saya pasti sudah kaya raya, sudah beli satu pulau mungkin. Ya memang begitu kondisinya, kita tidak akan tahu harga CP Aramco ke depannya. Cuma Tuhan yang tahu," ungkapinya.

Akan tetapi, lanjutnya, dalam tender LPG tersebut pada akhirnya pihaknya melihat adanya penawaran Total yang lebih murah namun *loading*-nya pada akhir Maret. Dan setelah dilihat secara operasional, penawaran tersebut pun dapat diterima.

Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI Bowo Sidik Pangarso menilai tidak seharusnya ISC-Pertamina menabrak aturan yang mereka buat sendiri. Jika dalam TOR disebutkan aturan secara jelas, sudah seharusnya diikuti aturan tersebut.

"Dalam tender seharusnya semuanya sudah ada aturannya. Itu tidak mungkin tanpa melibatkan orang dalam, makanya setahu saya, sudah ada tersangkanya," ujar Bowo.

Oleh karena itu, Komisi VII DPR RI akan meminta klarifikasi ke pemerintah berkaitan dengan mafia migas. Serta, akan membentuk panitia kerja.

"Komisi VII akan buat panja, kita akan melihat bahwa ini berkaitan dengan pasal-pasal yang merugikan," kata Bowo

Pertanyaannya, apakah tender ISC tersebut berkaitan langsung dengan dugaan peran Ari Soemarno dibelakangnya? Bowo mengatakan dari awal Komisi VII telah mencurigai maka dari itu DPR akan membentuk Panja.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon, mengaku tidak heran jika praktek kecurangan yang dalam tender LPG oleh ISC-Pertamina ini diduga dimainkan oleh Ari Soemarno melalui Sudirman Said dan Daniel Purba.

"Saya tidak heran lagi kalau permainan tender LPG ini dilakukan oleh Ari Soemarno Cs," papar mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI..

Selain itu, Effendy juga



Anak-anak berdiri di depan sebuah kanal di seberang tangki penyimpanan bahan bakar di fasilitas PT Pertamina di Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta.

mengatakan, kelompok ini memiliki latar belakang berpikir sebagai seorang pedagang bukan karakter berideologi untuk menyelamatkan sumber daya energi.

Sedangkan ketua Komisi VI DPR RI menyatakan tidak menutup kemungkinan bila dalam verifikasi rapat dengar pendapat dengan PT Pertamina akan merekomendasikan pembatalan terkait pengadaan tender LPG yang terdiri dari 22.000 MT butane dan 22.000 MT propane yang dimenangkan oleh Total.

"Bisa saja (dibatalkan), kalau ditemukan adanya pelanggaran," tegas Ketua Komisi VI DPR RI, Hafisz Tohir.

Ia menyayangkan sikap pemerintah sebagai mitra yang sering kali melakukan kebijakan di tengah sedang tidak bersidanginya dewan. Terlebih, sambung dia, setiap keputusan yang diambil malah sering kali menimbulkan *feed back* yang justru merugikan pemerintah itu sendiri. Dia akan meminta klarifikasi atas tender yang diduga banyak terjadi penyimpangan, baik dari sisi regulasi, hingga pada administrasinya tersebut.

"Untuk itu pada masa sidang pertama tanggal 18 Mei nanti, kami akan segera memanggil Pertamina untuk meminta klarifikasi resmi atas kejadian tersebut," pungkasnya. ■ Dhanu Akbar, Ismed Eka Kusuma

# ANTISIPASI DKPP HADAPI PELANGGARAN KODE ETIK DALAM PILKADA SERENTAK

Pelaksanaan Pilkada serentak di 9 provinsi dan 260 kabupaten/kota se Indonesia Desember mendatang berpotensi terjadinya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menyiapkan diri menghadapi pesta demokrasi tersebut. Berikut petikan wawancara dengan Anggota DKPP, Nur Hidayat Sardini akhir Mei di kantornya, Jl. MH. Thamrin 14, Lantai 5, Jakarta Pusat.

## Terkait Pilkada 2015, apa saja yang perlu diperhatikan?

Pertama harus diketahui pilkada ini aspek proksimitasnya jauh lebih kuat. Aspek proksimitas itu adalah kedekatan antaraktor di tingkat lokal. Kami misalnya mendengar sudah ada upaya *setting* terhadap penyelenggara Pemilu terutama dalam rekrutmen Panwas (Panitia Pengawas). Ada penitipan orang oleh mereka yang punya hasrat mencalonkan diri. Sudah ada indikasi-indikasi yang tidak benar. Kedua, penyelenggaraan Pilkada 2015 ada pengaruhnya dengan *legal standing* dalam Pemilu. Kami akan mengubah beberapa bagian terkait pedoman beracara DKPP. Kemarin kan Pemilu Legislatif, Pilpres, dan Pemilukada sebelumnya. Kami akan ubah menyangkut *legal standing*. Pelayanan yang lebih cepat, lebih tepat sedang kita diskusikan. Kami punya tenaga ahli untuk mengkaji itu.

## Soal Pilkada 2015 seperti apa prediksi DKPP?

Kalau melihat Perpu, pertama pada tahap uji publik akan punya potensi besar juga. Kalau uji publik tidak dapat dilaksanakan dengan baik konflik akan mungkin mengemuka. Sumbernya dari penetapan calon apakah akhirnya MS (memenuhi syarat) atau TMS (tidak memenuhi syarat). Di soal itu bagaimana hentakan di antara aktor-aktor di tingkat lokal. Apalagi merujuk pada soal aspek proksimitas. Karena dekat hentakannya akan jauh lebih keras. Kedua, kepentingannya langsung, karena menyangkut alokasi sumber-sumber politik. Alokasi itu terbatas. Calonnya banyak, kursi sedikit. Ketiga, terkait karakter masyarakat kita. Bicara representasi dapat dipilah menjadi dua, yakni berdasarkan orang dan berdasarkan gagasan. Misalnya, kalau ada yang jadi bupati tidak seagama, tidak sesuku, tidak sekeyakinan maka akan diresisten itu. Itu namanya representasi berdasarkan orang. Secara sosiologis masyarakat kita seperti itu. Akhirnya potensi konflik fisik akan besar. Kalau misalnya mengekspresikan ketidakberhasilan tadi lewat saluran hukum, itu akan lebih baik. Tapi kalau tidak, maka yang terjadi adalah amuk. Itulah amuk massa dalam Pilkada.

## Apakah itu bisa timbul karena penyelenggara Pemilu?

Tepat! Selubung besarnya adalah penyelenggaraan. Tapi Saudara lihat, yang namanya penyelenggara Pemilu tidak berada di ruang hampa. Saya kasih contoh di Papua, ada orang yang bahkan berterima kasih kepada DKPP atas pemecatannya, karena secara budaya orang yang akan

terpisah dari lingkungan adat akan diasingkan oleh adat. Dia jauh lebih memilih dipecat DKPP daripada dipecat adat, karena konsekuensinya jauh lebih berat. Padahal dia ketua KPU. Dia mengakui semua pengaduan karena tidak dapat menghindari dari lingkungan adat. Mau ke mana lagi, mau ke kolong. Dengan begitu dia lebih senang, apalagi dia memang sudah mau mundur dari penyelenggara Pemilu. Ilustrasi itu menggambarkan, yang namanya aspek proksimitas ini akan jauh lebih bermasalah. Oleh karena itu, penyelenggara Pemilu harus netral, mandiri, imparial. Kalau pilihannya seperti itu ya mau apa. Itulah potensi-potensi yang mungkin akan terulang dalam Pilkada 2015 atau 2016.

## Antisipasinya bagaimana?

Itu kan sebagian besar lingkupnya ada di penyelenggara Pemilu. Penyelenggara Pemilu adalah KPU dan Bawaslu. Kalau ada kejadian seperti ini yang lebih *day to day* adalah Bawaslu. DKPP ini satu kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilu. Kami ini bahkan tidak bisa menindak kalau tidak ada pengaduan. Itu pun nyatanya pengaduan juga banyak. Saya tambahkan, bagaimana penyelenggara dalam konteks ini. Hati-hati, penyelenggara Pemilu bisa masuk dalam turbulensi itu. Masuk dalam pergulatan antaraktor berdasarkan proksimitas tadi. Padahal ini tidak boleh. Penyelenggara tidak boleh masuk dalam turbulensi itu.

## Terkait penanganan sengketa Pilkada, menurut Bapak seperti apa?

Pembentuk undang-undang harus punya sikap. Sebelum mengambil sikap dikaji lebih jauh, apakah misalnya lebih baik di lingkup penyelenggara Pemilu saja. Karena berdasarkan UU 15 Tahun 2011, KPU, Bawaslu, dan DKPP satu kesatuan. Nah, urusan Pemilu di lingkup sini saja, itu akan lebih efektif. Tak perlu penyelesaiannya melibatkan pihak di luar itu. Apalagi kan kami menangani hal-hal itu, tidak asing lagi, tidak perlu bikin lembaga baru. Manfaatkan lembaga yang sudah ada. Tambahkan maksud kewenangan oleh pembentuk undang-undang. Daripada bikin lembaga baru yang efektivitasnya masih dipertanyakan. Khusus DKPP, kami tidak bisa komentar, rasanya tidak elok.





**P**at-gulipat bagi-bagi kue bisnis migas sampai saat ini masih menjadi incaran berbagai kelompok kepentingan, termasuk pihak yang berkuasa.

Kurang lebih tujuh bulan lalu, *Aktual* mendapatkan informasi soal *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Bumi Sarana Migas (BSM) dengan PT Pertamina (Persero) terkait penyediaan pasokan LNG ke PLN.

Nota kesepahaman (MoU) bernomor 004/R00000/2014-S0 tentang *joint venture* proyek pembangunan *Land Base* LNG Receiving Terminal Banten tersebut dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada Senin, 12 Mei 2014 lalu.

Kedua belah pihak setuju membentuk *working group* yang mempunyai tugas antara lain menyusun skema bisnis, skema pendanaan proyek, studi pasar serta pengembangannya. Selain itu, *working group* juga melakukan analisa teknis dan operasi LNG Receiving terminal. Sedangkan pembiayaan proyek ditanggung bersama pihak Pertamina dan Bumi Sarana Migas.

Saat itu, ketika *Aktual* mengkonfirmasi kepada pihak bersangkutan, Pertamina tutup mulut dan mengabaikan asas transparansi. Baik Afdhal, Argo dan Ali Mundakir (eks VP comm Pertamina) mengaku tidak tahu terkait MoU yang melibatkan Anak Wapres RI Jusuf Kalla, Solihin Kalla.

Namun, dalam kurun waktu enam bulan kemudian, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto mengatakan pihaknya menargetkan pembangunan infrastruktur LNG Receiving Terminal Bojonegara rampung pada 2019 mendatang.

Menurutnya, *prefeasibility study* atas pembangunan *land base* LNG Receiving Terminal Bojonegara telah selesai. Pertamina memastikan terminal berkapasitas 500 MMSCFD atau sama dengan empat juta ton LNG ini akan dimanfaatkan secara

maksimal selama 20 tahun untuk regasifikasi LNG.

Saat ini, kerja sama ini sudah sampai pada tahap penandatanganan *Head of Agreement* (HoA) yang dilakukan pada 1 April 2015 lalu oleh Direktur Energi Baru dan Terbarukan Pertamina Yenni Andayani dan Direktur PT Bumi Sarana Migas Solihin Kalla serta disaksikan langsung oleh Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto.

“Ya, kita kemarin baru menyelesaikan *prefeasibility study*, nah sekarang kan baru HoA. biasanya aspek-aspek komersial baru dinegosiasikan atau didiskusikan setelah HoA tahapannya,” kata Vice Presiden Corporate Communication Pertamina Wianda Puspongoro.

Wianda menerangkan setelah proses HOA, bakal ada beberapa tahapan yang lebih alot di posisi berikutnya. Saat ini tahapan tersebut

masih diproses. Namun, terpilihnya PT Bumi Sarana Migas (BSM) itu bukanlah hasil dari penunjukan atau tender, melainkan berdasar pada pengajuan *feasibility study* yang diajukan oleh pihak BSM kepada Pertamina.

“Bukan tender atau penunjukan, jadi itu lebih ke arah pengajuan *feasibility study* dari PT Bumi Sarana Migas tersebut. Selanjutnya, mereka memang sudah ada lahan di area tersebut, karena proyek itu 70 persen hambatannya pembebasan lahan, nah jadi itu yang di-*propose* kepada Pertamina, dan Pertamina juga masih dalam tahapan melakukan *review* kelanjutan dari HOA ini,” ucap Wianda.

Pasalnya, kerjasama BSM tersebut

**Foto atas:** Pabrik gas alam cair (LNG) milik PT. Donggi Senoro di Desa Uso, Kabupaten Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah, Jumat (1/5).

**Foto kiri:** Yenni Andayani

**Foto kanan:** Solihin Kalla



## Pat-Gulipat Bisnis Kalla di LNG Receiving Terminal Bojonegara





menyimpan resiko penyerapan gas oleh PLN menjadi 100 persen resiko Pertamina. Terdapat resiko *single party off taker* untuk pembeli LNG, yaitu PLN.

Berdasarkan data yang diperoleh Aktual, jika dibandingkan dengan proyek Pertagas FSRU Cilamaya LNG Company, penjualan *regasified* LNG dilakukan dari Pertagas Cilamaya langsung ke *end customer* (IPP Jawa, IPP Sunyarangi dan Pertamina Balongan). Sehingga Pertamina tidak menanggung resiko penyerapan pasar. Dari segi LNG *supply* dan *market demand* pun proyek Pertagas ini menunjukan posisi yang sangat aman karena volume *demand* sesuai dengan volume *supply* LNG.

Tidak seperti LNG Bojonegara antara Pertamina dengan BSM, yang terdapat porsi *unmarketable* LNG cukup besar. Di mana *available market* yang dimiliki hanya untuk IPP Jawa I sebesar 320 MMSCFD dan PLN Jawa Barat sebesar 334 MMSCFD, total keduanya adalah 654 MMSCFD. Sementara target LNG *supply* nya sendiri justru mencapai 1.000-1.500 MMSCFD. Sedangkan FSRU Cilamaya berdasarkan analisa LNG *supply and market demand*

menunjukkan posisi yang sangat aman dan tidak terkena penalti karena volume *demand* lebih besar dari volume *supply* LNG.

Belum lagi perbandingan kesiapan pasokan gas untuk proyek IPP Jawa-1, LNG Bojonegara rawan keterlambatan dikarenakan faktor lahan dan kontruksi LNG Tanks. Sedangkan FSRU Cilamaya menjadi solusi paling tepat untuk penyediaan Gas sebelum Mei 2018.

Berdasarkan perbandingan jarak dan lokasi rencana pembangkit IPP Jawa-1 di Muara Tawar dan Cilamaya dari sumber gas menunjukkan bahwa LNG Receiving Terminal Bojonegara membutuhkan pembangunan pipa sepanjang 150 km ke IPP Muara Tawar, sedangkan FSRU Cilamaya hanya membutuhkan pipa gas pendek ke IPP Cilamaya.

Beberapa kalangan menilai Pertamina jangan sampai terjebak pada pemenuhan keinginan pejabat dengan mengorbankan kepentingan negara. Pertamina seharusnya menolak untuk dijadikan *bumper* proyek BSM milik Solihin Kalla. Kerja sama tersebut dinilai kental akan unsur KKN.

“Ini harus batal, kental sekali unsur KKN-nya, apalagi BSM kan Kalla Group, kerja samanya kan kelihatan tidak *win-win solution*, dan justru merugikan Pertamina,” kata Pengamat Energi Migas Watch, Widodo Edi Setyanto di Jakarta.

Widodo menilai Wapres Jusuf Kalla saat ini tengah memperbesar kerajaan bisnis keluarganya ketimbang menyejahterahkan rakyat dan memberantas mafia migas. Apalagi jika proyek ini memiliki potensi besar akan merugikan BUMN baik Pertamina ataupun PLN.

Pengamat Kebijakan Migas Yusri Yusman meminta PT Pertamina (Persero) mengkaji kembali kerja sama proyek LNG Terminal Receiver Bojonegara Banten yang dilakukan bersama PT Bumi Sarana Migas (BSM).

“Engga *fair*, harus ikut ambil

resiko. Jadi perjanjian itu harus dikaji lagi. Jangan proyek ini menjadi korban karena kekuasaan,” kata Yusri.

Pertamina sangat berpotensi untuk menjadi perusahaan besar dikancah internasional tapi sayang kerap diintervensi. Tiap ada potensi merugikan negara, sekalipun atas kekuasaan JK pun tidak boleh.

Seharusnya, dengan jabatan JK saat ini, kontrak dengan Pertamina harus saling menguntungkan dan berbagi resiko sesuai porsi sahamnya. “Menjadi contoh yang baik model investasi antara swasta dengan BUMN jangan dibalik-balik tidak *fair*,” ujarnya.

Pemerintah, seharusnya berpegang teguh pada pasal 33 (UUD 1945) yang mengungkapkan sektor yang strategis harus dikuasai oleh negara. Direktur IRESS, Marwan Batubara menilai dalam proyek LNG ini pihak swasta tidak dibutuhkan, lantaran Pertamina sudah jauh lebih berpengalaman.

“Terlebih ini akan sangat merugikan, kalau swasta yang diajak kerja sama tidak bisa mengembangkan pasar dan memenuhi dengan tepat pasokan. Ini harus oleh BUMN, karena punya pengalaman sehingga bisa menyesuaikan *demand*. Petinggi Pemerintahan itu jangan sewenang-wenang. Kalau berbisnis yah yang wajar-wajar saja, jangan merugikan BUMN,” jelasnya.

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI merespon potensi kerugian yang bakal dialami Pertamina. DPR pun setelah masa reses akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Proyek LNG *receiving terminal*.

“Sinyalemen itu mungkin ada benarnya, RDP komisi VII yang lalu saya juga pertanyakan kepada Pertamina. (Pertamina) berjanji akan mempresentasikan kepada komisi VII dalam RDP yang akan datang,” kata Anggota Komisi VII, Hari Purnomo. ■ Dhanu Akbar, Ismed Eka Kusuma





## Tudingan Faisal Basri Soal Smelter Ditunggagi Kepentingan Kelompok



Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) Faisal Basri menuding mantan menteri perekonomian, Hatta Rajasa sebagai biang keladi kekacauan industri bauksit nasional. Menurutnya, kekacauan tersebut bermula pada masa pencalonan Hatta Rajasa menjadi calon wakil presiden 2014 lalu.

Menurut Faisal, kekacauan tersebut bermula pada masa pencalonan Hatta Rajasa menjadi calon wakil presiden 2014 lalu. Saat itu, bekas Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) itu melarang ekspor mineral mentah (*raw material*) termasuk bauksit hingga akhirnya tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 terbit pada tanggal 12 Januari 2014.

"Hatta Rajasa biang keladinya. Ini tunjuk nama saja deh biar semua jelas," ujar Faisal.

Faisal juga menuding pelarangan tersebut terkait permintaan perusahaan aluminium terbesar di Rusia, UC Rusal. Perusahaan tersebut ingin membangun pabrik di Kalimantan, namun mereka ingin mengurangi jumlah bauksit yang beredar di dunia hingga 40 juta ton. Dampaknya harga alumina Rusal melonjak.

"Sudah nampak nyata, Rusal yang paling diuntungkan. Ini mau pemilu, pilpres, dan Hatta Rajasa menjadi calon wakil presiden," ucapnya.

Terkait hal ini, Energy Watch Indonesia menilai bahwa substansi

Permen ESDM Nomor 1/2014 tersebut memang sudah benar, sesuai dengan amanat Undang-undang tentang minerba tahun 2009.

"Selama ini memang banyak sekali kerugian negara atau hilangnya potensi pendapatan negara sebagai akibat dari ekspor mineral mentah tanpa melalui pengolahan," ujar

direktur Energy Watch Indonesia, Ferdinand Hutahaean di Jakarta, Senin (25/5).

Hanya saja Ferdinan menilai tudingan Faisal Basri terlalu bersayap dan seperti menyimpan agenda terselubung. Sebab Permen ESDM 1/2014 tersebut dikeluarkan oleh Jero Wacik bukan oleh Hatta Rajasa meskipun dia adalah Menko Perekonomian.

"Tidak serta-merta Faisal Basri mengaitkan kebijakan permen itu atas desakan Rusal yang rencananya dulu memang akan berinvestasi di Indonesia. Faisal Basri perlu menunjukkan bukti-bukti tuduhannya supaya jernih," jelasnya.

Lebih lanjut dikatakannya, saat ini Faisal Basri justru sedang ditunggagi kepentingan pihak tertentu untuk mencabut dan membatalkan Permen ESDM 1/2014 dan merevisi UU Nomor 4/2009 tentang Minerba.

"Supaya pihak-pihak perusahaan besar seperti Freeport dan Newmont yang akan habis izin ekspornya bisa terus melakukan ekspor tanpa kewajiban bangun *smelter*. Faisal Basri jangan asal ngomong tanpa bukti yang kuat, ada bukti, laporkan. Namun dibalik itu semua, semangatnya untuk membatalkan permen ESDM no 1 tahun 2014, Faisal Basri dan pihak-pihak yang mensponsorinya harus berhadapan dengan rakyat," tuntas Ferdinand. (Ismed Eka Kusuma)

## Indonesia Beli Minyak Mentah Langsung dari Iran

Pemerintah berencana membeli minyak mentah langsung dari Republik Islam Iran. Rencana ini sudah dibahas panjang lebar oleh kedua negara saat Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung akhir April 2015.

"Ini (beli minyak mentah Iran) sudah didiskusikan dalam pertemuan bilateral Presiden RI dengan Presiden Iran pada saat KAA," ujar Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, Minggu, 24 Mei 2015.

Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, bersama Menteri Koordinator Perekonomian, Sofyan A. Djalil juga sudah melakukan kunjungan kerja ke Iran.

Dalam kunjungan itu, lanjut Dadan, Sudirman Said bertemu dengan Menteri Perminyakan Iran, Bijan Namdar Zangeneh kemudian menyepakati dua hal penting, yaitu pembelian *crude oil* dari Iran untuk Indonesia, Kemudian membuka kesempatan kepada pihak Indonesia untuk terlibat dalam bisnis hulu migas di Iran.

Kunjungan kerja Delegasi Indonesia ke Iran melakukan empat jenis pertemuan yang dilakukan secara simultan, pertemuan tersebut yaitu, Joint Commission, Bilateral MESDM dan Menteri Perminyakan Iran, Pertemuan Komite Infrastruktur dan Energi serta pertemuan teknis dengan melibatkan National Oil Company (NOC). (Moh Sahlan)



# Pertamax Batal Naik, Bukti Pemerintah Berpihak Pada Golongan Menengah Atas



Pengamat kebijakan energi Yusri Yusran menyebutkan bahwa batal naiknya harga Pertamax dan sejumlah BBM nonsubsidi atau BBM umum akibat dari desakan pemerintah merupakan tindakan pelanggaran terhadap aturan yang ada.

Pasalnya, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014, untuk penetapan harga jual BBM Umum sepenuhnya menjadi wewenang PT Pertamina (Persero).

"Kenaikan harga Pertamax di intervensi, artinya Pemerintah mengintervensi Perpres 191 dan Permen nomor 39 yang diperbaiki dengan permen 04 2015. BBM umum itu diputuskan oleh Pertamina. Ini untuk golongan kelas menengah. Tidak boleh itu, artinya pemerintah yang melanggar," kata Yusri saat berbincang dengan Aktual di Jakarta, Senin (25/5).

Sekalipun Pemerintah telah

membantah jika disebut telah mengintervensi, namun hanya sekadar menyesuaikan daya beli masyarakat, menurut Yusri hal itu tetap saja merupakan tindakan intervensi dan bukti bahwa Pemerintah berpihak pada golongan kelas menengah ke atas.

"Itu kan yang mengkonsumsi golongan kelas menengah ke atas. Tidak masalah jika dinaikan," ujar Yusri.

Ia menjelaskan, akibatnya, Pertamina berpotensi mengalami kerugian lantaran batal naiknya harga BBM umum tersebut. Apabila hal itu terjadi, maka berpotensi juga adanya dugaan tindak pidana korupsi.

"Adanya intervensi dengan melanggar aturan, jika ada kerugian negara, ini jelas delik korupsi," tutupnya.

Sementara itu, aktivis politik Ratna Sarumpaet juga mengaku tersinggung dan geram dengan

kejadian tersebut. Dikatakannya, hal itu menunjukkan bahwa Pemerintah dan Pertamina takut dengan golongan menengah atas.

"Kita lihat kemarin, kenapa Pertamina tidak jadi naikan Pertamax? Itu kan secara kasat mata itu kalau aku tersinggung. Itu tuh seolah Pertamina takut banget sama menengah atas. Kalau menengah bawah, premium dan solar kan digoyang-goyang terus, tapi Pertamax, sudah mau naik malah ga jadi. Marah ga? Kan itu isyarat buat kita, menegaskan kepada kita, bahwa dia (Pertamina dan Pemerintah) akan korbankan rakyat asalkan dia jangan sakiti orang-orang kaya," tandasnya. /Ismed Eka Kusuma

## Efisiensi Gaya ISC Tanpa Bukti Kongkrit

Penguatan fungsi dan kewenangan Integrated Supply Chain (ISC) sebagai unit usaha PT Pertamina (Persero) ternyata belum terbukti mampu melakukan efisiensi, ataupun membawa dampak pada penurunan harga bahan bakar minyak (BBM). *Gembar-gembar* yang dilontarkan tentang fungsi efisiensi ISC pun hanya isapan jempol.

Pengamat kebijakan energi Yusri Yusman mengatakan, sebenarnya rakyat sudah tidak sabar menunggu dampak efisiensi berupa penurunan harga BBM yang dijanjikan ISC setelah mengambil alih peran dan fungsi Petral.

"Penghitungannya kan jelas. Komponen harga jual BBM itu ada harga beli (pengadaan), plus harga penyimpanan, plus pajak (PPN dan PBBKB), plus *margin* kepada

Pertamina. Nah, komponen paling besar kan pengadaan. Kalau ada penghematan dalam segi pengadaan, maka seharusnya ada penurunan harga jual BBM ke masyarakat," ujar Yusri di Jakarta, akhir Mei 2015.

Sejak pengambilalihan fungsi Petral ke ISC, belum ada bukti nyata yang dirasakan masyarakat. Harga BBM tetap tinggi dan ini membuat harga kebutuhan bahan pokok maupun ongkos transportasi menjadi tetap mahal dan mencekik.

Rakyat menunggu untuk merasakan dampak dari efisiensi yang pernah dikatakan Pertamina, bahwa selama Petral dibubarkan, ISC telah melakukan efisiensi sebesar USD22 juta.

"Mana BBM murah yang dijanjikan itu? Kalau tidak terbukti, berarti ini hanya angka di atas kertas. Buktikan *dong* dengan memberi dampak kepada

masyarakat," keluh Yusri.

Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika juga menyampaikan bahwa efektif tidaknya pembubaran Petral bisa diukur dari harga BBM yang dijual di masyarakat. Jika memang harga BBM turun, maka rakyat akan percaya bahwa pembubaran Petral dan penguatan fungsi ISC memberikan dampak bagus. Sebaliknya, jika harga BBM di masyarakat tetap tinggi, maka unit usaha Pertamina pimpinan Daniel Purba itu memang gagal.

"Cerita soal mafia migas mungkin rakyat tidak mengerti. Tapi bagi rakyat itu yang penting harga BBM turun berkat ISC dan pembubaran Petral. Tetapi kalau Petral sudah dibubarkan kemudian tak ada dampaknya terhadap harga BBM, terhadap biaya pengadaan BBM, maka sama saja tidak ada sasaran yang dicapai," tutup Kardaya. /Moh Sahlan





# **‘MEM-PINGPONG’ NASIB PENGUNGGI MUSLIM ROHINGYA**

Thailand, Malaysia, dan Indonesia menghadapi problem masuknya manusia perahu asal Myanmar. Ketiga negara dituding saling lempar, untuk menolak masuknya pengungsi Muslim Rohingya ke wilayah kedaulatan mereka.



Sejumlah imigran Rohingya berada di Kantor Camat Pangkalan Susu setelah terdampar di kawasan Pangkalan Susu, Langkat, Sumatera Utara, Jumat (15/5).



**T**hailand, Malaysia dan Indonesia akhir-akhir ini ketiban masalah serius. Ketiganya berpotensi dituding melanggar hak asasi manusia, karena secara “tidak manusiawi” mengusir manusia perahu Rohingya yang masuk ke wilayah kedaulatannya. Padahal etnis Muslim Rohingya ini sedang mengungsi dari Myanmar karena masifnya penindasan terhadap etnis Rohingya di negeri itu.

Migran Rohingya ini ditolak masuk ke perairan Thailand ketika mereka bermaksud pergi ke Malaysia. Tetapi migran Rohingya ini juga ditolak masuk ke Malaysia. Kapal patroli Malaysia menangkap dua kapal migran Rohingya di dekat Pulau Penang dan Langkawi, 13 Mei 2015. Otoritas Malaysia lalu mengembalikan dua kapal yang mengangkut ratusan migran Rohingya itu ke Myanmar.

Sementara itu, pada pekan pertama Mei 2015, ratusan migran Rohingya lainnya asal Myanmar dan Bangladesh mendarat di Lhoksukon, Aceh. Otoritas Indonesia hanya membekali mereka dengan makanan, air bersih, obat-obatan, bahan bakar, dan kebutuhan lain, dan menyuruh mereka pergi lagi. Menurut pihak Indonesia, para pengungsi itu sejak awal memang bertujuan ke Malaysia, bukan ke Indonesia.

Tak kurang dari Pill Robertson, Wakil Direktur Human Rights Watch untuk Asia, mengatakan, Angkatan Laut Thailand, Malaysia, dan Indonesia harus menghentikan “permainan mem-pingpong” para migran tersebut. Ketiga negara itu seharusnya bekerjasama untuk menyelamatkan mereka yang terkatung-katung di atas perahu tersebut.

### **Menolak Kedatangan Pengungsi**

Juru bicara pemerintah militer Thailand di Bangkok, Mayor Jenderal Werachon Sukhondhapatipak, mengatakan, Thailand, Malaysia dan Indonesia akan melanjutkan tindakan menyeret kembali perahu para pengungsi Rohingya ke laut lepas,

untuk mencegah pengungsi mendarat di kawasan kedaulatan mereka.

“Ketiga negara memutuskan untuk menolak kedatangan manusia perahu,” tegasnya. Thailand memang telah menyerukan pertemuan regional di Bangkok pada 29 Mei 2015. Konferensi itu dijadwalkan dihadiri 15 negara, untuk membahas isu migran Rohingya tersebut.

Malaysia dan Indonesia belum mengumumkan kebijakan resmi terkait pencegahan kedatangan manusia perahu ke wilayah kedaulatan kedua negara. Tapi kapal angkatan laut kedua negara dilaporkan telah menyeret sejumlah perahu pengungsi yang mendekati kawasan pantainya kembali ke laut lepas. Para pengungsi mendapat bantuan makanan, air bersih, pengobatan, serta bahan bakar, tapi dilarang mendarat.

Asal muasal persoalan ini adalah kebijakan pemerintah Myanmar, yang menganaktirikan etnis Rohingya. Pada 1982, Myanmar mengesahkan undang-undang kewarganegaraan yang mengakui delapan ras dan 130 kelompok minoritas, tetapi mengabaikan sekitar 800.000 warga Rohingya. Mereka tidak dianggap sebagai warga negara. Myanmar berpenduduk sekitar 60 juta jiwa dan mayoritas beragama Buddha.

Rohingnya adalah warga Muslim yang berasal dari Myanmar dan Bangladesh. Warga ini biasanya tak mempunyai kewarganegaraan dan dipandang sebagai pengungsi ilegal. Tahun 2012, terjadi dua peristiwa kekerasan antara golongan Rohingya dan mayoritas umat Buddha di Negara Bagian Rakhine, sebelah barat Myanmar. Kekerasan ini mengakibatkan minimal 192 orang tewas dan 140.000 warga Rohingya kehilangan tempat tinggal.

Awal 2015, Myanmar mengesahkan UU yang membatasi Rohingya di dua wilayah perbatasan dengan Bangladesh untuk tidak mempunyai lebih dari dua anak. Namun, UU ini tidak berlaku bagi warga Buddha. Penerima Nobel

Perdamaian, Aung San Suu Kyi dan juga kaum Buddha di Myanmar secara luas mengkritik UU tersebut. Tapi Suu Kyi yang diduga akan terpilih sebagai Presiden Myanmar mendatang, tidak banyak berbicara mengenai hak-hak Rohingya.

### **Kekerasan Sektarian dan Korbannya**

Banyak penganut Buddha melihat warga Rohingya sebagai penyusup bawaan kolonialis Inggris, ketika negara itu dikenal dengan nama Burma. Kekerasan sektarian terhadap Muslim Rohingya di Myanmar telah menelan ratusan korban jiwa, dan sekitar 140.000 warga Rohingya mengungsi akibat konflik itu. Sebagian besar melarikan diri ke Malaysia. Represi terhadap etnis Rohingya ini dinilai telah merusak kredibilitas upaya reformasi politik Myanmar.

Setelah terjadinya kekerasan ini, warga Muslim Rohingya beramai-ramai meninggalkan Myanmar melalui jalur laut. Pengungsi Rohingya laki-laki, perempuan dan anak-anak pergi menyeberangi Teluk Benggala, menumpang kapal penangkap ikan atau kapal barang. Negara tujuan mereka adalah Malaysia, di mana sekitar 31.000 warga Rohingya telah hidup di sana.

Gelombang pengungsian etnis Muslim Rohingya menggunakan perahu ke Indonesia dan Malaysia meningkat pada Mei 2015, akibat razia besar-besaran terhadap imigran gelap di Thailand. Imigran gelap etnis Rohingya dari Myanmar dan Bangladesh biasanya dikirim para penyelundup manusia ke Thailand sebagai tempat transit utama sebelum melanjutkan perjalanan.

Pemerintah Thailand melancarkan razia besar-besaran setelah menemukan kuburan massal berisi 33 jasad etnis Rohingya dan Bangladesh dari Myanmar di kawasan perbatasan negara itu ke Malaysia. Etnis Muslim Rohingya mengalami represi berat di Myanmar dan tidak diakui sebagai warga negara tersebut.

Komisi Tinggi Perserikatan



Sebuah perahu yang ditumpangi para migran ditarik menjauh dari daratan Thailand oleh sebuah kapal angkatan laut Thailand di perairan dekat Pulau Koh Lipe, Sabtu (16/5).

Bangsa-Bangsa untuk Urusan Pengungsi (UNHCR) memperkirakan, sekitar 25.000 etnis Muslim Rohingya dan Bangladesh pada Januari-Maret 2015 ini menjadi korban para penyelundup manusia, yang mengirim mereka menggunakan perahu bobrok dari kamp-kamp gelap di Thailand menuju Malaysia atau Indonesia. “Jumlah manusia perahu Rohingya itu berlipat dua dibanding triwulan yang sama tahun 2014,” lapor UNHCR.

Pemerintah Thailand juga telah mendeportasi sekitar 1300 manusia kapal Rohingya kembali ke Myanmar akhir 2014. Langkah tersebut mengabaikan seruan kelompok hak asasi manusia agar tidak memulangkan kelompok minoritas etnis yang terancam diskriminasi di tanah air sendiri. Thailand dikritik tidak bersikap transparan selama

proses deportasi.

### Menolak Bertanggungjawab

Thailand telah berbicara dengan Myanmar terkait tata cara deportasi. Sayangnya, pembicaraan itu menemui jalan buntu. Pemerintah Myanmar menolak mengambil alih tanggungjawab terhadap para pengungsi Rohingya di Thailand, karena menganggap pengungsi itu sebagai imigran ilegal Bangladesh.

Perwira kepolisian Thailand, Letjen Pharnu Kerdlarpphon, mengklaim, rombongan Rohingya pencari suaka itu sempat ditahan di berbagai *camp* pengungsi di Thailand. “Deportasi itu dilakukan sukarela. Kami mengirimkan sekitar 100 sampai 200 orang pada setiap gelombang. Mereka mengatakan, tidak bisa memiliki masa depan yang lebih baik selama ditahan di Thailand, maka mereka memilih kembali ke Myanmar,” ucap Pharnu.

Investigasi Reuters melaporkan, pemerintah Thailand telah memindahkan para pengungsi tersebut dari pusat-pusat penahanan

imigrasi dan menyerahkan mereka pada jaringan pedagang manusia. Pengungsi Rohingya kemudian dibawa ke kamp-kamp yang terletak di bagian selatan Thailand, berdekatan dengan perbatasan Malaysia.

Pengungsi Rohingya harus tinggal di sana sampai sanak saudara mereka mau membayar tebusan antara USD 115 sampai 1.550 (Rp 1,5 – 20,6 juta). Harganya bervariasi tergantung pada kemampuan masing-masing. “Pengungsi Rohingya yang tak mampu membayar tebusan akan berakhir di sana sebagai penjaga atau tukang masak di *camp-camp* itu,” kata Chris Lewa, Direktur Arakan Project, grup pembela pengungsi Rohingya di Thailand.

Permasalahan pengungsi Rohingya yang semakin rumit membuat pemerintah Thailand pada Oktober 2014 memberlakukan kebijakan rahasia, yakni pendeportasian para pengungsi kembali ke Myanmar. Kebijakan ini akhirnya berujung pada penjualan para pengungsi Rohingya kepada jaringan pedagang manusia. ■ Satrio Arumunandar



Pengakuan Vatikan pada Negara Palestina adalah kemenangan politis dan simbolis Palestina. Langkah susulan yang diperlukan adalah rekonsiliasi Hamas dan Fatah dalam menghadapi musuh sebenarnya: Israel.

**T**anggal 13 Mei 2015 menjadi hari bersejarah dalam hubungan Vatikan-Palestina. Sehari sebelum umat Katolik dunia merayakan Kenaikan Isa Almasih, Takhta Suci Vatikan mengumumkan pengakuan resmi terhadap Negara Palestina. Ini adalah kemenangan politis dan simbolis besar bagi Palestina, karena Vatikan merepresentasikan ratusan juta umat Katolik dunia.

Juru Bicara Vatikan Federico Lombardi mengatakan, dalam waktu dekat Paus Fransiscus I akan mengirimkan duta besarnya kepada otoritas Palestina di kota Ramallah, Tepi Barat. Paus Fransiscus I sendiri memiliki perhatian terhadap konflik di Palestina, mengingat wilayah Palestina merupakan tempat suci bagi umat Katolik sedunia, khususnya kota Yerusalem dan Betlehem.

Pemerintah konservatif Israel langsung mengecam sikap Vatikan yang mengakui kemerdekaan Palestina. Israel menilai sikap Vatikan tersebut tidak akan menyelesaikan masalah di Timur Tengah. "Kami sangat kecewa dengan sikap Vatikan. Pengakuan ini akan mempersulit Palestina untuk kembali ke meja perundingan," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Emmanuel Nahshon.

Israel akan mengkaji kembali hubungan diplomatiknya dengan Vatikan, dikarenakan Vatikan memiliki peran sebagai sebagai pusat umat Katolik sedunia. "Israel akan mengkaji ulang semua perjanjian dengan Vatikan," tambahnya. Israel yang saat ini secara ilegal masih menduduki tanah milik rakyat Palestina memang merasa tidak nyaman dengan sebutan "Negara Palestina."



## Palestina Sesudah Pengakuan Vatikan

### Gereja-gereja Katolik di Palestina

Pengakuan Vatikan ini sebetulnya bukan hal baru, karena sejak lama Vatikan sudah mengakui Palestina, khususnya sejak Majelis Umum PBB memberi status negara peninjau non-anggota pada Palestina, 29 November 2012. Status yang sama juga dimiliki Vatikan di PBB.


Yang baru adalah pengakuan itu dicantumkan dalam traktat yang ditandatangani Komisi Bilateral Vatikan-Palestina. Traktat itu juga berisi aspek-aspek penting menyangkut kehidupan dan aktivitas gereja-gereja Katolik di Palestina. Juga menyangkut hal seperti properti, pajak, dan protokol di tempat-tempat suci.

Dengan pengakuan Vatikan terakhir, berarti sudah ada 10 negara Eropa yang resmi mengakui Negara Palestina. Mereka adalah: Polandia, Ceko, Hungaria, Rumania, Bulgaria,

Siprus, Malta, Bosnia, dan Swedia. Sedangkan pengakuan dari parlemen, sudah ada pengakuan dari: Parlemen Inggris, Spanyol, Prancis, Irlandia, dan Parlemen Eropa.

Meskipun secara simbolis dan politis saat ini Palestina diuntungkan oleh perkembangan di Vatikan, masih banyak hal yang harus dilakukan pihak Palestina untuk betul-betul mewujudkan kemerdekaan Palestina. Salah satu masalah yang dihadapi adalah persoalan internal Palestina sendiri, yakni perselisihan dan persaingan antara faksi Islam Palestina, Gerakan Perlawanan Islam (Hamas), dan faksi Fatah yang nasionalis.

Sejak awal Mei 2015, Hamas telah melakukan pendekatan dengan Arab Saudi dan meminta intervensi Saudi, untuk menghidupkan lagi perundingan rekonsiliasi yang macet dengan



Presiden Palestina Mahmoud Abbas (kiri) memberikan rosario kepada Paus Fransiskus saat audiensi pribadi di Vatikan, Sabtu (16/5).

faksi Fatah. Jika Saudi ikut mendukung, Hamas berharap hal itu bisa meningkatkan posisi tawarnya dalam perundingan. Langkah Hamas mungkin akan membuat Mesir –yang sekian lama telah menjadi penggalang perundingan itu—dan pemimpin Fatah Mahmoud Abbas tidak begitu senang.

### **Pembangunan Kembali Gaza**

Khaled Meshaal, Kepala Biro Politik Hamas, telah mengontak Raja Salman bin Abdul-Aziz Al Saud pada penghujung Februari 2015. Meshaal mendiskusikan dukungan kerajaan Arab Saudi terhadap rekonsiliasi Palestina, pembangunan kembali Gaza pasca agresi militer Israel, dan pencabutan blokade terhadap Gaza. Wakil Ketua Biro Politik Hamas, Ismail Haniyeh, mengatakan pada 1 Mei 2015 bahwa Riyadh sedang mengusahakan tercapainya kesepakatan rekonsiliasi baru antara Hamas dan Fatah.

Dengan mendorong peran Saudi dalam urusan-urusan Palestina, Hamas berharap, ia bukan hanya akan meraih dukungan Saudi untuk mengakhiri pengepungan Gaza dan mengatasi perpecahannya dengan Fatah, namun juga akan memulihkan hubungan dengan Mesir. Hamas memang terus-menerus menderita krisis keuangan yang parah. Ketika Hamas menolak mendukung rezim Bashar al-Assad di Suriah dalam menghadapi gerakan oposisi bersenjata, Iran pun menghentikan dukungan keuangan pada Hamas pada penghujung 2011.

Usaha Hamas untuk memulihkan hubungan dengan Iran terbukti sulit, karena Iran menerapkan persyaratan yang ketat bagi pemulihan itu. Iran meminta Meshaal agar tidak mencoba bertemu dengan pemimpin tertinggi

Ayatollah Ali Khamenei selama kunjungan ke Iran. Kunjungan yang sudah direncanakan itu akhirnya tertunda. Teheran juga ingin Hamas meminta maaf karena telah mendukung pihak oposisi Suriah, dan sebaliknya Hamas harus menyuarakan dukungan terhadap pemerintah Bashar al-Assad.

Karena hubungan dengan Iran yang sedang bermasalah, Hamas tampaknya mencoba meraih dukungan Saudi untuk mengurangi penderitaan ekonomi parah, yang dialami warga Palestina di Gaza, wilayah Palestina yang berada di bawah kontrol Hamas. Dalam mendekati Saudi, Hamas mengikuti langkah para politisi Arab lain yang saat ini juga sedang berbaik-baik dengan Riyadh.

### **Persetujuan Makkah Baru**

Hamas beranggapan, penguasa baru Saudi sesudah wafatnya Raja Abdullah, terbukti dalam periode waktu yang pendek bersedia mengambil langkah-langkah inisiatif di Timur Tengah. Kampanye militer yang dilancarkan Saudi dan sekutunya terhadap kelompok Syiah Houthi di Yaman, sikap tegas menentang pengaruh Iran di kawasan itu, dan pemberian dukungan konsisten terhadap kaum oposisi yang ingin menggulingkan rezim Bashar al-Assad di Suriah, semuanya menunjukkan “langkah-langkah inisiatif” tersebut.

Ketua Komite Keamanan di Dewan Legislatif Palestina, Ismail al-Ashqar, mengatakan, “Hamas menginginkan adanya persetujuan Makkah baru yang melibatkan seluruh pihak Palestina, terpisah dari persetujuan bilateral antara Hamas dan Fatah.”

Persetujuan Makkah ditandatangani di Arab Saudi pada 8 Februari 2007 untuk menghentikan pertempuran antara Fatah dan Hamas, menyusul kemenangan Hamas dalam pemilu legislatif 2006, dan untuk membentuk sebuah pemerintahan persatuan nasional. Persetujuan itu gagal

karena kekacauan dalam aparat keamanan Otoritas Palestina di Gaza dan hambatan terhadap kerja pemerintahan Hamas. Sejumlah anggota Hamas terbunuh dan terluka dalam insiden itu.

Di tengah pendekatan Hamas-Saudi, mantan pemimpin senior Fatah, Mohammed Dahlan, tiba di Cairo pada 3 Mei 2015 untuk mendiskusikan kemungkinan dampak negatif dari hubungan yang lebih erat antara Hamas dan Riyadh. Hasrat Hamas terhadap peran Saudi memang terkait dengan hubungan Hamas yang tegang dengan Mesir, walaupun kampanye media Mesir terhadap Hamas sudah mereda. Para pemimpin Hamas juga sudah membuat berbagai pernyataan bernada positif terhadap Cairo di penghujung April 2015.

Pemotongan monopoli Mesir terhadap proses rekonsiliasi Palestina, dengan cara melibatkan campur tangan Saudi, akan memberi posisi lebih baik pada Hamas dalam tuntutan-tuntutan negosiasi. Hal itu karena Mesir secara terbuka telah mendukung Otoritas Palestina yang didominasi Fatah.

Pemimpin senior Hamas, Salah Bardawil mengatakan, bagaimanapun dukungan Hamas bagi peran Saudi bertujuan memberikan jaring pengaman politik dan finansial untuk mencapai rekonsiliasi. “Hal ini tidak bertentangan dengan peran Mesir, tetapi justru memperkuatnya,” ujarnya.

Pendekatan Hamas ke Saudi telah menimbulkan kemarahan di kalangan Otoritas Palestina, di mana beberapa faksi menyatakan penolakan mereka terhadap peran Saudi. Tampaknya faksi-faksi ini lebih suka melihat Hamas terisolasi secara politik di “penjara” Gaza. Namun, Riyadh tampaknya akan bersedia didekati Hamas, karena Saudi sedang bersemangat menghadang pengaruh Iran di Timur Tengah. Lebih baik Hamas terkontrol di bawah pengaruh Saudi, ketimbang dibiarkan dipengaruhi Iran.  [Satrio Ansumandar](#)





Raja Yogyakarta, Sri Sultan HBX (kiri) memberikan penjelasan kepada sejumlah tokoh masyarakat dan wartawan di Yogyakarta, Jumat (8/5).

## Sabda Untuk Mataram Baru

**A**lkisah, Ki Ageng Pemanahan ingin mengunjungi rumah sahabatnya, Ki Ageng Giring III. Setelah melalui perjalanan yang melelahkan dari Panggang, Gunung Kidul, dia akhirnya sampai ke gubuk sederhana Ki Ageng Giring di Paliyan Gunung Kidul.

Beberapa kali dia memanggil nama penghuni rumah namun tidak ada jawaban. Maklum Ki Ageng Giring dan istrinya sedang keluar rumah.

Singkat cerita, dia akhirnya masuk tanpa izin. Rasa haus membimbingnya ke dapur. Matanya tertuju pada sebuah kelapa muda di atas meja. Tanpa seizin pemilik kelapa itu, dia langsung mengambil badi kemudian menebas ujung atas kelapa muda itu. Ditenggaklah air kelapa muda itu untuk menghilangkan rasa hausnya.

Tak lama kemudian, Ki Ageng Giring, sang pemilik rumah, datang dari hutan. Mereka berpelukan melepas rindu.

Kegembiraan itu kemudian menjadi sebuah ratapan ketika Ki Ageng Pemanahan meminta maaf karena tanpa izin telah meminum air

kelapa muda yang ada di dapur.

Dengan tertunduk layu, Ki Ageng Giring menjelaskan bahwa air kelapa muda itu adalah hasil dari tahunan lelaku, tirakat dan *riyadhoh* yang diperintahkan Sunan Kalijaga (guru spiritual keduanya) untuk mengembalikan kejayaan Mataram.

Ya, Sunan Kalijaga sebenarnya memerintahkan keduanya untuk tirakat dan *riyadhoh* untuk kebangkitan Mataram (Islam). Secara khusus, Sunan Kalijaga memerintahkan Ki Ageng Pemanahan tirakat di sebuah lokasi dimana terdapat sebuah pohon mati yang berbunga. Lokasi itu sekarang terkenal dengan dengan petilasan Kembang Lampir di wilayah Panggang, Gunungkidul.

Sunan Kalijaga juga memerintahkan Ki Ageng Giring untuk menanam sabut kelapa di tempat tinggalnya saat itu, di Paliyan Gunungkidul. Sunan Kalijaga mengatakan bahwa wahyu Gagak Emprit akan datang ke Ki Ageng Giring dalam bentuk sebuah air kelapa muda. Dengan meminum air kelapa muda dengan sekali tenggak, kelak keturunan Ki Ageng

Giring akan menjadi dapat raja-raja Mataram (Islam) yang bijaksana.

Sungguh aneh, akhirnya sabut kelapa yang ditanamnya akhirnya tumbuh menjadi sebuah pohon kepala yang tidak pernah berbuah. Dengan kesabaran melaksanakan titah gurunya, Ki Ageng Giring memelihara dan merawat kelapa itu hingga pada suatu saat, pohon kelapa itu berbuah meski cuma satu buah kelapa.

Sebuah mimpi akhirnya menyadarkan Ki Ageng Giring bahwa wahyu itu sudah turun di pohon kelapa yang sudah berbuah satu biji saja itu dan dia harus meminum air buah kelapa itu dengan sekali tenggak. Kemudian dipetiknya kelapa itu dan ditaruhnya di dapur. Dan kemudian Ki Ageng Pemanahan kemudian meminum air kelapa muda itu, air wahyu Gagak Emprit.

Ki Ageng Giring akhirnya menyadari, kejadian ini adalah kehendak Tuhan. Bukan salah Ki Ageng Pemanahan. Dia kemudian menjelaskan hakikat air kelapa muda itu ke Ki Ageng Pemanahan.

Dia memohon ke Ki Ageng Pemanahan agar salah satu keturunannya juga bisa jadi raja Mataram. Awalnya dia meminta secara bergantian keturunan keduanya akan memimpin Mataram. Namun Ki Ageng Pemanahan tidak memberi jawaban. Baru ketika dia meminta bahwa pada keturunan ke-tujuh baru akan menjadi raja, Ki Ageng Pemanahan menjawabnya: "Kakak. Wallohu 'alam, bagaimana baiknya (apa yang terjadi. **red**) kelak, saya tidak tahu".

Banyak kalangan menganggap percakapan antara Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan setelah Ki Ageng Pemanahan meminum air wahyu Gagak Emprit itu adalah sebuah perjanjian sakral yang sangat dihormati oleh raja-raja Mataram berikutnya.

Ratusan tahun kemudian. Tepatnya pada 30 April 2015, Sri Sultan Hamengkubuwana X mengeluarkan sebuah *Sabdo Rojo* yang dianggap mengguncang pondasi Mataram Islam.

Tak lebih dari lima menit dia bersabda: "Gusti Alloh, Gusti Agung

*Kuaso Cipto. Kawuningono siro kabeh abdiningsun putri dalem sederek dalem sentono dalem lan abdi dalem. Nampo weninging dhawuh Gusti Alloh, Gusti Agung Kuaso Cipto lan romoningsun, eyang-eyang ingsun poro leluhur Mataram wiiwit wektu iki ingsun nampo dhawuh kanugrahan dawuh Gusti Alloh, Gusti Agung Kuaso Cipta asmo kalenggahan ingsun Ngarso Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Sri Sultan Hamengku Bawono Ingkang Jumeneng Kasepuluh, Suryaning Mataram Senopati Ing Ngologo Langgenging Bawono Langgenging Toto Panatogomo. Sabdo rojo iki perlu dimangerteni diugemi lan ditindakake, yo mengkono sabdoningsun”.*

Sepekan kemudian, tepatnya 5 Mei 2015 sebuah *Dhawuh Raja* kembali dikeluarkan.

Bunyi *dhawuh* itu seperti ini: *“Siro abdi ingsun seksenono Ingsun Ngarso Dalem Sampeyan Dalem Sri Sultan Hamengku Bawono Ingkang Jumeneng Kasepuluh, Suryaning Mataram Senopati Ing Ngologo Langgenging Bawono Langgenging Toto Panatogomo kadawuhan netepake putri ningsung Gusti Kanjeng Ratu Pembayun katetepake Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng Ing Mataram. Mangertenono, yo mengkono dhawuh ingsun”.*

Inti dari sabda raja itu adalah menurut perintah dari leluhur, nama dan gelarnya harus diubah. Saat Sri Sultan naik tahta pada 7 Maret 1989 lalu dia digelar *“Ngarso Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati ing Ngologo Ngabdurrakhman Sayidin Panotogomo Kalifatullah Ingkang Jumeneng Kaping Sadoso ing Ngayogyakarta Hadiningrat”*. Dalam sabda raja ini, gelar *Kaping Sadoso* diubah menjadi *Kasepuluh*, Gelar *Buwono* menjadi *Bawono*. Dan gelar *Khalifatullah Sayidin* diganti *Langgenging Toto Panotogomo*.

Kemudian di *Dhawuh Rojo*, Sri

Sultan mengubah nama dan gelar putri tertuanya GKR Pembayun menjadi *Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng Ing Mataram*. Dengan gelar baru *Mangkubumi* yang disandangnya. Artinya putri sulungnya itu bisa dan dimungkinkan menjadi penerus Kesultanan Yogya.

*“Soal Khalifatullah, saya hanya bisa menyampaikan (apa adanya. red) ini. Kalau lebih dari itu, artinya saya ngarang dhewe. Saya sekedar menyampaikan dhawuh... Saya dapat keterangannya hanya itu. Tidak berani melangkah jauh, hanya itu. Saya takut keliru,”* kata Sri Sultan saat menjelaskan maksud sabda raja di Dalem Wironegaran, Yogyakarta, Jumat (8/5/2015).

Namun hal mendasar yang disampaikan Sri Sultan saat itu adalah ketika dia menyatakan bahwa makna besar dibalik sabda raja itu adalah berakhirnya perjanjian antara Ki Ageng Giring dengan Ki Ageng Pemanahan.

*“Dasare, perjanjian Ki Ageng Giring sampun rampung. Mboten saged dipun ewahi,”* katanya menjelaskan dalam bahasa Jawa. Kalau diterjemahan dalam bahasa Indonesia seperti ini: *“Dasarnya, perjanjian Ki Ageng Giring sudah selesai. Tidak bisa diubah”*.

Kemudian Sri Sultan menjelaskan soal kerajaan Mataram. Ada Mataram Lama dan Mataram Baru. Menurut Sultan, Mataram Lama dimulai dari era Ken Arok di Singosari (Malang) sampai era Kerajaan Pajang. Sedangkan Mataram Baru adalah berdasar pada perjanjian antara Ki Ageng Giring Ki Ageng dan Pemanahan sampai sekarang.

*“Pada masa Mataram Lama ada perjanjian itu yang memisahkan Mataram Baru. Perjanjian itu sudah rampung. Saya tidak terkena perjanjian itu... Sekarang perjanjian itu sudah berakhir, dan sudah tidak ada lagi perpisahan antara Mataram Lama dengan Baru,”* imbuhnya untuk mempertegas kembali makna tambahan gelar *Suryaning Mataram*.

Sri Sultan tidak menjelaskan lebih jauh alasan membagi Mataram Lama

dan Mataram Baru. Sebab ada yang mengatakan, Mataram pascaperjanjian Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan adalah era Mataram Islam. Sebuah era dimana Wali Songo berusaha mengislamkan tanah Jawa dengan menciptakan kerajaan-kerajaan yang bernafaskan Islam di tanah Jawa, salah satunya lewat sukse di kerajaan Mataram. Bukan Mataram Baru.

Sabda Raja Sri Sultan HB X itu menjadi polemik. Termasuk dari keluarga Dalem Kraton sendiri. Sebab, ketika Sri Sultan HB X alias KGPH Herjuna Darpita diangkat menjadi pengganti HB IX itu melalui proses musyawarah oleh seluruh putra Sri Sultan HB IX untuk menghindari masalah di kemudian hari.

Ada alasan lain yang cukup serius, yakni selain KGPH Herjuna Darpita (HB X), masih ada putra raja HB IX lainnya yang juga memiliki hak tahta. Sejarah mengatakan, Sri Sultan HB V mengangkat adiknya sendiri KGPA Mangkubumi sebagai raja pengganti (Sri Sultan HB VI) karena Sri Sultan HB V ternyata tidak memiliki anak lelaki.

Beberapa pengamat justru melihat bahwa, sabda raja ini sebenarnya adalah dimulainya babak Mataram Baru, setelah berproses dari Mataram Lama (Mataram Hindu), kemudian berubah menjadi Mataram Islam dan kini Mataram Baru. Sebuah Mataram yang bukan lagi hanya sebatas Jawa. Tapi Indonesia dan jagad (dunia). Setidaknya, itu adalah jawaban Sri Sultan untuk menghadapi tantangan modernitas yang terus menerus menggerogoti “kesakralan” tradisi Islam Jawa di Kesultanan Yogyakarta.

Namun ada pertanyaan yang cukup menggelitik yang belum bisa dijawab tuntas. Seperti jawaban Ki Ageng Pemanahan ke Ki Ageng Giring: *“Kakak. Wallahu 'alam, bagaimana baiknya (apa yang terjadi. red) kelak, saya tidak tahu...”*.

Kita tidak pernah tahu, apakah Sabda Raja Sri Sultan HB X ini adalah titik awal menuju Mataram Baru atau justru titik awal kehancuran Mataram Wallahu 'alam... Andy Abdu Hamid/Zaenal Arifin



## Rencana Proyek Minapolitan Pekalongan Jalan di Tempat



Mega Proyek Minapolitan yang dicanangkan di Kota Pekalongan sejak tahun 2011 lalu jalan di tempat. Padahal proyek nasional senilai Rp1 triliun tersebut diharapkan bisa meningkatkan perekonomian nelayan dan masyarakat Pekalongan umumnya.

Belum terealisasinya proyek tersebut disebutkan karena anggaran yang direncanakan pemerintah belum cair. Baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Jawa Tengah.

"Proyek itu digagas sejak zaman era Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad. Tapi, sampai Bu Menteri Susi Pudjiastuti ini belum ada perkembangan lagi," kata Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan

Kelautan Kota Pekalongan, Aris Sindarcahaya, kepada Aktual, Sabtu (16/5) pekan lalu.

Menurutnya, Pemerintah Kota Pekalongan sebenarnya telah mempersiapkan berbagai program penunjang Minapolitan di wilayah zona pantai sejauh 6,15 km. Diantaranya budidaya udang paname, informasi mangrove, taman mangrove, laborat, teknokrat, tambak, fasilitas penunjang budidaya dan pelabuhan PPNP.

"Kita sudah siapkan program penunjang Minapolitan, dari arah timur kelurahan Degayu hingga Pabean, termasuk penyusunan Detail Engenering Desain (DED) sudah dibuat, namun profilnya belum," beber Aris.

Ia juga menyinggung ketidakjelasan rencana normalisasi sungai untuk tambak oleh Balai Besar wilayah Sungai (BBWS) Pamali Juwana senilai Rp 13,2 miliar. Padahal, normalisasi sungai itu penting dilakukan guna mendukung Proyek Minapolitan.

Begitu halnya rencana pembangunan pelabuhan *onshore* sebesar Rp263 Miliar yang akan diberikan melalui PPNP dan dana-dana dekon dari Dinas Perikanan dan Kelautan.

"Saya bingung mau ngomong proyek itu jalan *kok* belum ada realisasi. Mau ngomong tidak jalan masih terus diupayakan," pungkask dia. / Muhammad Dasuki-Sumitro

## KPUD Mulai Lelang Logistik Pilkada

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) di Sulawesi Selatan akan melakukan lelang logistik terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada akhir tahun ini.

Lelang logistik dilakukan dengan menerapkan sistem yang tepat kepada para tender yang akan mengajukan permohonan untuk memenangkan lelang logistik.

"Kita lakukan lelang elektronik, ini cukup ampuh untuk mencegah penyelewangan anggaran," kata Ketua KPU Sulawesi Selatan, Iqbal Latif,

Senin (11/5).

Pihaknya tidak akan membatasi jumlah peserta lelang, namun fungsi supervisi dan pengawasan akan diperketat. /Najamuddin Arfah-Sukardjito



## Duh, Sertifikat Halal Palsu Marak di NTB



Ketua MUI Nusa Tenggara Barat Saiful Muslim mengungkapkan banyak pelaku usaha di daerahnya yang memalsukan label halal dan menempelkannya pada produk yang dihasilkan.

Mereka adalah para pelaku usaha yang bergerak dalam usaha makanan di Kota Mataram. Yakni dengan menempelkan keterangan halal pada spanduk dan atau iklannya. Padahal, MUI belum memberikan sertifikat halal.

Berdasarkan data yang ada, jumlah usaha kecil mikro (UKM) yang sudah memiliki sertifikat halal sekitar 600 UKM dari ribuan UKM di provinsi itu.

"Kami tidak dalam posisi mengawasi. Sebab, kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap makanan yang tidak ada halalnya, kemudian ada orang keberatan dikemudian hari kita tidak bertanggung jawab," kata Saiful di Mataram, Jumat (15/5).

"Sebagai gambaran saja, dari ratusan hotel di Lombok baru 10 hotel yang sudah mengantongi sertifikat halal, selebihnya tidak ada. Begitu juga dengan UKM yang sudah memiliki sertifikat halal baru 600 dari ribuan UKM di NTB," sambungnya. Ant/ Karel Stefanus Ratulangi

## Wartawan Dilarang Meliput Presiden Jokowi



Sejumlah wartawan dan kontributor di Kota Jayapura, Provinsi Papua, mengaku kecewa saat melaksanakan peliputan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Lapas Abepura. Sebab, mereka dibatasi oleh petugas jaga dan protokoler kepresidenan.

"Kemarin itu, saya dilarang masuk oleh petugas, kata mereka wartawan dibatasi karena ruangnya kecil," kata Alberth, kontributor Trans TV di Jayapura, Papua, Minggu (10/5).

Ia mengaku kecewa dengan perlakuan tersebut karena tidak mendapatkan hasil yang maksimal saat peliputan kunjungan Presiden Jokowi ke Lapas Abepura, Sabtu (9/5) sore. Padahal, dirinya sudah ditugaskan oleh kantornya.

"Percuma kami buat ID Card. Tapi masuk saja dibatasi," kata Alberth yang akrab disapa Altop oleh rekan-rekan wartawan di Jayapura.

Nola Kobe, reporter dari TVRI siaran lokal Papua, bersama kameramennya Budi, mengeluhkan hal sama.

"Masa kita dilarang masuk? Padahal kita ingin *back up* berita lokal Papua," kata repoter TVRI 'Lensa Papua' itu.

Lita, salah satu wartawan media *online* nasional di Jayapura, menyesalkan sikap diskriminasi petugas. Nyatanya wartawan tertentu tetap diizinkan masuk, sementara dirinya bersama puluhan wartawan lainnya dilarang.

"Saya dapat info, dari pengacara lima orang tapol yang diberikan grasi bahwa Presiden Jokowi meminta agar semua wartawan masuk. Tapi rupanya penjaga pintu tidak berikan izin," kata Lita.

Pada saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Lapas Abepura untuk berikan grasi kepada lima tapol, sejumlah wartawan asing dan perwakilan wartawan lokal serta nasional mendapatkan akses masuk.

"Padahal ada wartawan yang bisa masuk hanya pakai kaos oblong dan sandal jepit. Ini jadi aneh, terkesan pilih kasih dan diskriminasi," tambah Ricardo Hutahaean, kontributor Metro TV di Papua.

Kalapas Abepura Bagus Kurniawan menampik adanya pembatasan atau melarang wartawan untuk meliput dalam pemberian grasi. Meski ia mengakui seluruh kegiatan di Lapas Abepura diatur dari protokoler kepresidenan. Ant/Andy Abdul Hamid-Soemtro

## Pemkab Aceh Utara Belum Terima Jadwal Kunjungan Dubes Myanmar

Pemkab Aceh Utara hingga Selasa (26/5) belum menerima jadwal kunjungan Dubes Myanmar untuk Indonesia ke lokasi warga Rohingnya di Kuala Cangko, Aceh Utara.

Hal itu disampaikan Asisten II Pemkab Aceh Utara, Abdul Aziz ketika dikonfirmasi Aktual.co. Dia menyebutkan pihaknya masih menunggu jadwal kedatangan Dubes Myanmar tersebut.

"Yang sudah datang Dubes Bangladesh. Myanmar kita belum dikabari kapan jadwalnya. Jika datang, tentu kita akan sambut dengan baik," ujar Aziz.

Untuk penanganan sanitasi dan kebutuhan mandi, sambung Aziz, pihaknya sudah menyiapkan. Sedangkan untuk makanan sudah ditanggung pembiayaannya oleh IOM dan UNHCR.

"Kita hanya fasilitasi tempat saja. Bantuan masyarakat juga luar biasa banyak. Selama ini untuk makan masih menggunakan bantuan masyarakat," ujar Aziz.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI menyebutkan dalam waktu dekat Dubes Myanmar di Jakarta akan mengunjungi pengungsi Rohingnya di Aceh. Namun, sampai hari ini belum ada kepastian kapan kunjungan itu dilakukan. Saat ini pengungsi Rohingnya tersebar di Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Tamiang, Aceh Timur dan Kota Langsa. /Karel Stefanus Ratulangi





# Soeharto, Raja Jawa Versi Ben Anderson

Dhia Prekasha Yoedha

**B**egitu dicalonkan kembali sebagai presiden oleh Ropim Golkar, Suharto tanggal 19 Oktober 1977 pidato panjang tanpa teks dengan banyak kata-kata berbahasa Jawa tentang *lengser keprabon*, *madeg pandito*. Atas pidato itu, Indonesianis asal Universitas Ohio Amerika Serikat, Ben Anderson menanggapi sebagai berikut: Mengapa Suharto omong seperti ini? Sedangkan waktu Peristiwa 27 Juli, tidak. Itu karena dia tahu sekarang Indonesia dilanda krisis ekonomi. Dia mengerti tak bisa lagi omong seolah semuanya lancar. Artinya dia harus omong seolah rendah hati, mawas diri, dan sebagainya.

Jadi cuma omongan seorang bos yang sebenarnya galak. Tapi karena ada skandal besar di keluarga dan di kantor maka harus pura-pura rendah hati. Walau maksud sebenarnya siapa yang berani melawan, bakal saya *gebugin*. Ini cuma sandiwara.

Raja jaman dulu tak banyak mikirin pendapat rakyat. Tapi kalau lihat sejarah Dinasti Mataram, kepercayaan rakyat itu penting pada saat tertentu. Bukan percaya si raja itu baik. Tapi apa rakyat percaya raja masih punya wahyu. Kalau rakyat merasa wahyu raja sudah pindah, ya sulit ditarik kembali. Kesetiaan rakyat bisa lenyap dalam waktu singkat. Dan calon raja yang baru bisa dapat sokongan dalam banyak bentuk. Masalahnya psikologi masyarakat. Dulu itu penting dan saya kira tetap ada efeknya sampai sekarang. Tapi sampai mana ini bakal berpengaruh dalam bulan-bulan mendatang, saya gak bisa pastikan.

Menarik Suharto omong tentang falsafah pewayangan bukan falsafah babad. Padahal babad ini sejarah nyata dinasti Jawa. Suasana dan moralitas di wayang dan babad beda jauh. Di wayang sampai batas tertentu, norma-norma moralitas satria sejati lumayan terbukti. Tetapi babad itu penuh kisah kudeta, pengkhianatan, tipu muslihat, guna guna, segala macam kebusukan dan kekejaman mengerikan.

Dalam babad sulit dicari tokoh seperti Arjuna atau Yudistira. Dalam wayang tak ada tokoh Ken Arok, Pakubuwono X, dan lainnya. Setahu saya di Babad Tanah Jawi tak pernah ada raja *lengser keprabon*. Kalau di-*lengser keprabon*-kan ada, sering.

Dari ucapannya terlihat dia tak punya konsep kepresidenan. "Presiden" baginya konsep kosong atau semu. Tapi "raja" itu konsep yang cocok dengan

idenya tentang kebudayaan dan tradisi Jawa.

Kalau Suharto berpidato resmi yang penuh istilah kebarat-baratan: konstitusi, pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya. Itu pidato ditulis stafnya di Sekneg. Tapi kalo ngomong spontan, cara bicaranya berubah 100%. Ingatlah ledakan marahnya di Pekanbaru di mana dia melepaskan diri dari bahasa resmi.

Kalau ngomong spontan yang nampak kejawennya. Dari mulut dan benaknya keluar konsep yang tak relevan dengan jaman modern, seperti pentingnya Hanacaraka. Pendek kata, dia lagi 'kebadaran.'

Suharto itu sosok *complicated* yang lahir dibesarkan dalam era peralihan dunia lama ke modern. Jaman raja-raja dulu tak ada pemilu, tak parpol, LSM, pers. Sikon sekarang sulit dibanding dengan jaman baheula.

Omongan *madeg pandito* tunjukkan aneka warna mentalitas Suharto. Ada unsur mental priyayi kecil jaman kolonial, unsur wayang, unsur Machiavelistis dari Babad Tanah Jawi, ada sedikit ajaran Ki Hajar Dewantoro, sisa nasionalisme jaman revolusi, juga pengaruh sistim militer yang semula diciptakan oleh tentara Prusia, dan sebagainya. Gado-gado. Karena itu, menarik.

Saya kira tidak ada (raja wayang mirip Suharto). Dalam wayang saya tak ingat ada tokoh yang berjiwa dingin. Tapi di Babad Tanah Jawi mungkin ada. Ya, Senopati itulah. Cari tipe Suharto, bagusnya di Babad Tanah Jawi. Jangan wayang.

Kenapa pakai bahasa klise "*oyo dumej, oyo gumunan, oyo kagetan*"? Pertama, meski klise dia percaya itu punya makna. Kedua, Suharto orang yang tertutup. Bagi dia klise-klise itu berguna untuk menyembunyikan perasaannya.

Kalau Suharto betul-betul omong spontan, itu seolah-olah dia nongol di depan umum cuma pakai kolor saja. Seolah topeng kepresidennya bisa tercopot. Lalu kelihatan aslinya. Di balik topeng itu dia mungkin orang Jawa yang paling dingin. Dinginnya bukan main.

Dingin dalam arti semuanya diperhitungkan. Kalau kejam, tidak karena marah. Tapi, karena pasang strategi. Dia orang yang hati-hati, curiga, jarang bertindak spontan. Kalau dia coba ramah, kita tak merasa ada kehangatan, kita malah kiri kanan di mana itu batu? Jangan jangan ada udang di baliknya? ■

Come and indulge yourself with 38 days of fabulous shopping and entertainment... only at **Jakarta Fair Kemayoran 2015.**

Enjoy great bargains on just about everything you need... Traditional Indonesian handicraft, gemstones, home appliances, electric and electronic gadgets, lifestyle equipment and many many more... Don't give a miss to our non - stop music concerts for 38 days!!

48



**JAKARTA FAIR**

KEMAYORAN

**2015**



Arena  
JIExpo  
**29<sup>th</sup> May**  
to  
**5<sup>th</sup> July**  
**2015**

The Biggest, The Longest, and The Most Complete Fair



Information: 021 - 26645000, 26645131

[www.jakartafair.co.id](http://www.jakartafair.co.id) | Jakarta Fair | @JIExpo @JakartaFairID | @jakartafairid



**Aktual** media pemberitaan berbahasa Indonesia yang menempatkan diri menjadi teman pembaca selama 24 jam dalam 7 hari seminggu melakukan perubahan :



aktual.co akan menjadi **aktual.com**



Perubahan hanya pada URL  
Isi dan konten tetap sama



**aktual.com**  
TERHANGAT TERPERCAYA

Menyajikan informasi terhangat dan terpercaya, disampaikan secara cepat, tepat, benar, serta makin progresif.